



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Tahun 2014 - 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAG HUKUM	KASUBBAG
f	W

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

**BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2**

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah RKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2009 - 2028 yang di dalamnya memuat tahapan RPJM Tahap ke II yaitu Tahun 2014-2019.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>W.</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas.

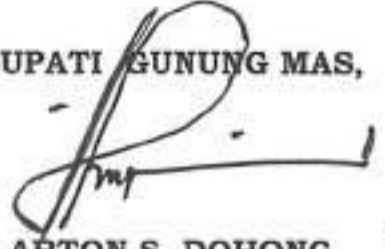
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh stakeholder di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan PD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 19-20 Maret 2018 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing PD (Perangkat Daerah) pedoman utama penyusunan APBD khususnya. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, untuk itu seluruh PD Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2019 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN X, II, III	
KABAG	

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

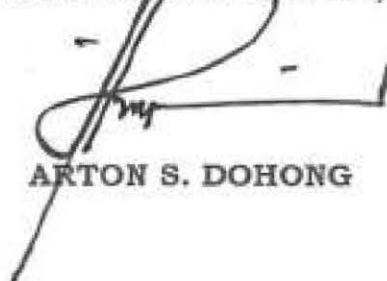
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

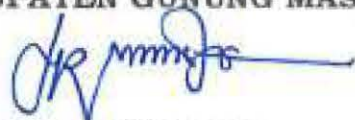
BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan tujuan	6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	12
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	12
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	48
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	65
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	75
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	75
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	84
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	121
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	127
4.2. Landasan Kebijakan RPJMD dan Substansi Penyusunan RKPD 2019	129
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019...	132
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	142
5.1. Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2019	155
5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2019	160
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	161
BAB. VII PENUTUP	162
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Di Kabupaten Gunung Mas	13
Tabel 2.2.	Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016	14
Tabel 2.3.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2015.....	14
Tabel 2.4.	Luas Areal IUPHHK/HPH/HTI dan Produksi Tahun 2015...	15
Tabel 2.5.	Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015	16
Tabel 2.6.	Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2016	18
Tabel 2.7.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	19
Tabel 2.8.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016 (jutaan rupiah).....	20
Tabel 2.9.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 (Jutaan Rupiah)	22
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015	23
Tabel 2.11.	Kondisi Pendidikan berdasarkan Aspek Kesejahteraan Sosial	25
Tabel 2.12.	Kondisi Kesehatan berdasarkan Aspek Kesejahteraan Sosial	26
Tabel 2.13.	Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	27
Tabel 2.14.	Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	28
Tabel 2.15.	Cakupan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	29
Tabel 2.16.	Cakupan pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	29
Tabel 2.17.	Cakupan pelayanan Tenaga Kerja berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	32

Tabel 2.18. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	33
Tabel 2.19. Cakupan pelayanan Pertanahan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	34
Tabel 2.20. Cakupan pelayanan Lingkungan Hidup berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	34
Tabel 2.21. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	35
Tabel 2.22. Cakupan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB Aspek Pelayanan Umum	36
Tabel 2.23. Cakupan pelayanan Perthubungan Aspek Pelayanan Umum	37
Tabel 2.24. Cakupan pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aspek Pelayanan Umum	37
Tabel 2.25. Cakupan pelayanan Penanaman Modal berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	38
Tabel 2.26. Cakupan pelayanan Kebudayaan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	39
Tabel 2.27. Cakupan pelayanan Perpustakaan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	39
Tabel 2.28. Cakupan pelayanan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	41
Tabel 2.29. Cakupan pelayanan Pariwisata berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	42
Tabel 2.30. Cakupan pelayanan Pertanian berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	43
Tabel 2.31. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.....	64
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kabupaten Gunung Mas	81
Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2018	114
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	115
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	117

Tabel 3.5.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	119
Tabel 4.1.	Kesinambungan Prioritas Pembangunan, Visi Misi dan Sasaran pada RPJMD	133
Tabel 5.1.	Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2019	150
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Rencana Kerja RKPD Tahun 2019	160
Tabel 6.1.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana Lainnya	6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas....	13
Gambar 2.2.	Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017	18
Gambar 2.3.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas Per Kecamatan Tahun 2017	18
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2016 (persen)	22
Gambar 4.1.	Pengelompokan Isu Strategis.....	130
Gambar 4.2.	Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2019 ...	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 yang disusun ini merupakan pelaksanaan Tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan Pedoman bagi PD untuk menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja-PD) dan untuk menyusun RKA PD Tahun 2019.

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah mendatang setiap PD di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD harus dapat menjabarkan visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci program dan kegiatan ke dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tanggal 4 Pebruari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382);

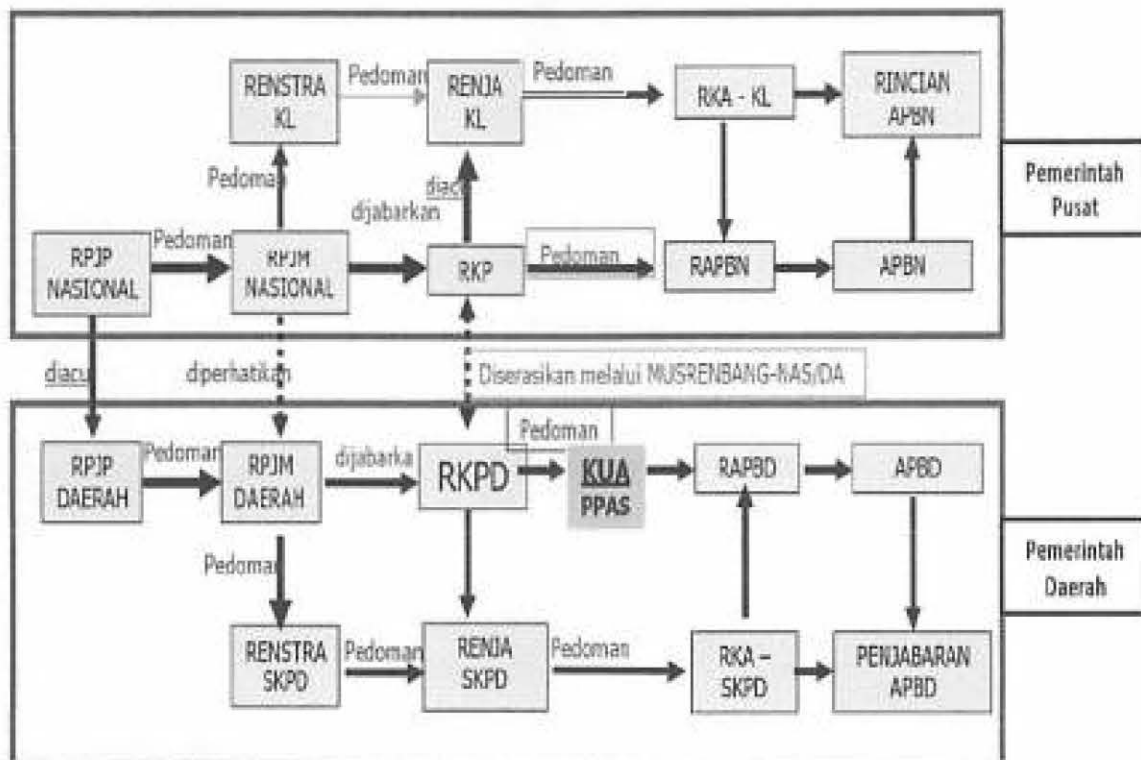
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD 2009-2028 dan merupakan RPJMD fase kelima 2014-2019 Kabupaten Gunung Mas.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2019;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu tahun 2019 menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD tahun 2019, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

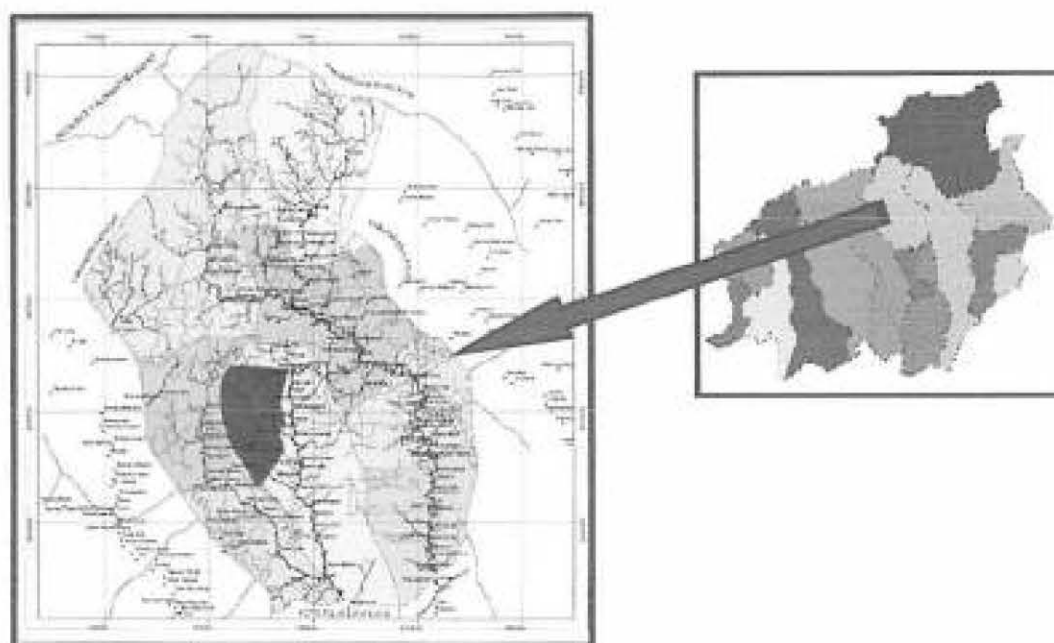
Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi $\pm 0^{\circ}$ - $18^{\circ}00'$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ}40'30''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ}01'00''$ bujur timur sampai dengan $114^{\circ}01'00''$ bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km^2 (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara $\pm 200 - 500$ meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan $\pm 8^{\circ} - 15^{\circ}$ dan perbukitan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ} - 25^{\circ}$ dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar).

Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai luasan 10.804 Km^2 , jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km^2 , luas Kabupaten Gunung Mas sebesar 7,04 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas



Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Gunung Mas

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	
Manuhing	Tumbang Talaken	1	11	1.113
Manuhing Raya	Tehang	1	5	601
Rungan	Jakatan Raya	1	13	710
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	1	8	738
Sepang	Sepang Simin	1	6	397
Mihing Raya	Kampuri	1	5	343
Kurun	Kuala Kurun	2	13	876
Tewah	Tewah	1	15	1.079
Kah. Hulu Utara	Tumbang Miri	1	11	1.589
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1	7	1.425
Miri Manasa	Tumbang Napoi	1	10	1.542
Rungan Barat	Rabambang	1	10	391
Jumlah		13	114	10.804

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

2. Kondisi Topografi

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas merupakan perbukitan dengan ketinggian antara ± 100–500 meter dari permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat kemiringan antara ± 8–15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15–250. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan.

Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar ± 28,75 Km.
2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar ± 86,25 Km.
3. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar ± 600 Km.
4. Sungai Miri dengan panjang sekitar ± 20 Km.

3. Keadaan Iklim

Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 27,1°C – 28,2°C. Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2014 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 604,7 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan kisaran curah hujan 41,0 mm (Sumber : *Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Air Laut (Meter)				
	0-25	25-50	50-100	100-500	500 Keatas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manuhing			V		
Manuhing Raya				V	
Rungan			V		
Rungan Hulu			V		
Rungan Barat			V		
Sepang			V		
Mihing Raya			V		
Kurun				V	
Tewah				V	
Kah. Hulu Utara					V
Damang Batu					V
Miri Manasa					V

Sumber : *Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017*

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2016

Bulan	Tahun					
	2014		2015		2016	
	HH	MM	HH	MM	HH	MM
Januari	11	138,3	17	357,0	17	357,0
Februari	10	149,4	14	425,0	14	425,0
Maret	19	294,8	8	161,0	8	161,0
April	19	575,9	10	230,0	10	230,0
Mei	13	223,2	11	411,0	11	411,0
Juni	14	207,7	9	253,0	9	253,0
Juli	5	41,0	0	0,0	0	0,0
Agustus	10	62,3	0	0,0	0	0,0

September	2	121,0	1	32,0	1	32,0
Oktober	6	123,0	5	174,0	5	174,0
November	14	312,3	13	470,0	13	470,0
Desember	21	604,7	11	209,0	11	209,0

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

4. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jaran g. pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 1.081.033,64 Ha meliputi Hutan Lindung (HL) 59.136,64 Ha, Hutan Produksi (HP) 375.965,50 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 275.375,00 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 263.468,75 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 107.087,75 Ha. Sedangkan luas lahan penghijauan yaitu 400 Ha. (Sumber : Dinas Kehutanan, 2016).

Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas areal 510.531 Ha.

Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2015

Jenis Izin Kind Of License	Di Gunung Mas Luas (Ha) /Area	Di Kabupaten lain Luas (Ha) /Area	Luas total Total Area (Ha)	Target Produksi Target Of Production (M ³)	Realisasi Produksi Realisation Of Production (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IUPHHK - HA	370.416	-	370.416	235.000	225.696,81
IUPHHK - HTI	2.355	-	2.355	68442	34.714,07
Gunung Mas	372.771	-	372.771	303.442	260.410,88

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar,

bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	2	3
1	PT. Agrolestari Sentosa	Kec. Manuhing dan Rungan
2	PT. Archipelago Timur Abadi	Kec. Kurun
3	PT. Flora Nusa Perdana	Kec. Rungan
4	PT. Kalimantan Hampanan Sawit	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
5	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Kec. Rungan, Manuhing
6	PT. Tantahan Panduhup Asi	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
7	PT. Berkala Maju Bersama I	Kec. Kurun, Tewah
8	PT. Berkala Maju Bersama II	Kec. Manuhing
9	PT. Kahayan Agro Plantation	Kec. Damang Batu, Kahayan Hulu Utara, Tewah

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Gunung Mas Tahun 2015

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan lainnya, sebagian besar petani dan masyarakat cenderung menanam dan memproduksi komoditi padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman karet masih menjadi tanaman yang paling banyak berproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah produksi karet pada tahun 2016 sebesar 20.405 ton dengan luas tanam seluas 118.772 Ha. Sedangkan komoditi kelapa hanya berproduksi sebesar 60,53 ton dengan luas tanam 432 Ha dan luas tanam kelapa sawit adalah 3.330 Ha akan tetapi belum menghasilkan karena usia tanam yang masih baru (Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017).

Dari 2 (dua) potensi pengembangan wilayah tersebut terpetakan juga potensi bencana longsor/erosi menurut type kerawanan per kecamatan pada tahun 2014. Untuk type relatif aman ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Manuhing, Rungan dan Sepang. Type agak rawan

meliputi semua kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Type cukup rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa sedangkan untuk type rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Manuhing Raya, Rungan Hulu, Tewah, padi Damang Batu dan Miri Manasa dan untuk type sangat rawan ada 2 (dua) kecamatan yaitu Damang Batu dan Miri Manasa (Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017).

7. Demografi

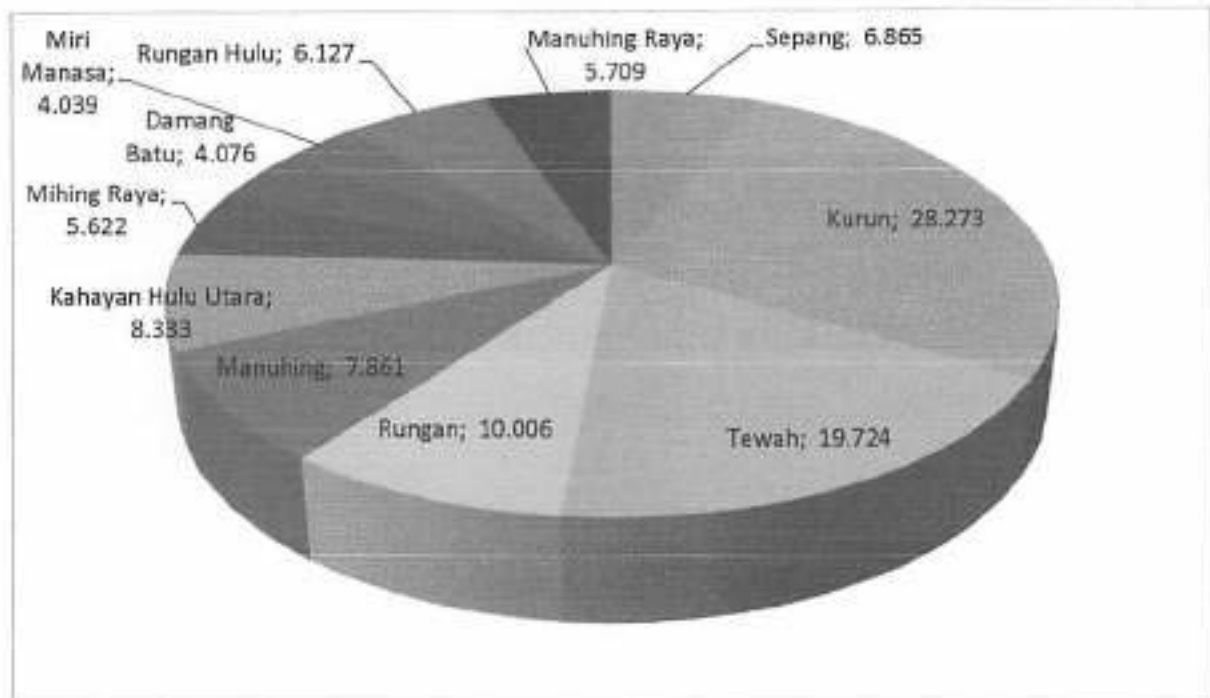
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2016 berjumlah 112.484, yang terdiri atas 59.803 laki-laki dan 52.681 perempuan. Dari hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tercatat penyebaran penduduk Gunung Mas terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Kurun, dengan tingkat kepadatan penduduk per Km² adalah 33 jiwa.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Rungan adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 28.273 jiwa, 19.724 jiwa dan 10.006 jiwa.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data sex ratio penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas



Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Sepang	3.655	3.210	6.865	114
Kurun	15.011	13.262	28.273	113
Tewah	10.490	9.234	19.724	114

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Kahayan Hulu Utara	4.390	3.943	8.333	111
Rungan	5.317	4.689	10.006	113
Manuhing	4.263	3.598	7.861	118
Mihing Raya	3.003	2.619	5.622	115
Damang Batu	2.197	1.879	4.076	117
Miri Manasa	2.119	1.920	4.039	110
Rungan Hulu	3.262	2.865	6.127	114
Manuhing Raya	3.016	2.693	5.709	112
Rungan Barat	3.080	2.769	5.849	111
Jumlah	59.803	52.681	112.484	114

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.

a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017, maka keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka PDRB Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku dalam kurun tiga tahun terakhir masing-masing adalah Rp. 2.982.610,5 (2013), Rp. 3.378.383,2 (2014*) dan Rp. 3.776.970,5 (2015**), Rp. 4.231.787,5 (2016*) (semua dalam juta rupiah).

Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2016 (%)

No	Sektor	2014	2015*)	2016**)
1	Pertanian	34,68	33,30	32,93
2	Pertambangan/Penggalan	13,52	12,36	11,67
3	Industri Pengolahan	8,83	8,88	8,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02

No	Sektor	2014	2015*)	2016**)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	10,75	11,56	11,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,87	9,20
8	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,68	1,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,76
10	Informasi dan Komunikasi	1,26	1,21	1,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55
12	Real Estate	2,55	2,74	2,81
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	5,61	6,09	6,41
15	Jasa Pendidikan	7,20	7,49	7,67
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,88	3,12	3,09
17	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31

Sumber : *Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas 2012-2016*

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2017 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (32,93 persen), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (11,67 persen) dan sektor konstruksi (11,79 persen). Sedangkan peranan terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.8. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2014-2016

Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,68	33,30	32,93
	31,42	29,92	29,61
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,54	0,69	0,48
a. Tanaman Pangan	0,15	0,15	0,15
b. Tanaman Hortikultural	27,98	26,22	26,16
c. Perkebunan	2,10	2,17	2,13
d. Peternakan	0,65	0,69	0,69
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,35	1,61	1,55
	1,61	1,77	1,77
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu			
3. Perikanan			
Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,36	11,67
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,03	0,03	0,02
	12,95	11,76	11,07
3. Pertambangan Bijih Logam	0,54	0,57	0,57

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya			
Industri Pengolahan	8,83	8,88	8,86
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
1. Ketenagaanlistrikan	0,01	0,02	0,02
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	10,75	11,56	11,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,87	9,20
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,68	1,67
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Darat	1,09	1,16	1,17
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angkutan sungai Danau dan Penyebrangan	0,47	0,47	0,46
5. Angkutan Udara	0,01	0,01	0,00
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,05	0,05	0,05
Penyediaan dan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,76
1. Penyediaan Akomodasi	0,11	0,12	0,12
2. Penyediaan Makan Minum	1,53	1,59	1,64
Informasi dan Komunikasi	1,26	1,21	1,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55
1. Jasa Perantara Keuangan	0,11	0,10	0,10
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,44	0,44	0,42
3. Jasa Keuangan Lainnya	0,04	0,04	0,04
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00
Real Estate	2,55	2,74	2,81
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61	6,09	6,41
Jasa Pendidikan	7,20	7,49	7,67
Jasa Kesehatan dan Keglatan Sosial	2,88	3,12	3,09
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Selama empat tahun terakhir berturut-turut sebesar 5,99% (2010), 6,57% (2011), 6,29% (2012), 6,87% (2013), 6,37% (2014) dan 6,96% (2015), 7,00% (2016). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
	1	2	3	4
1	2010	1.944.386,5	1.944.386,5	5,99
2	2011	2.272.733,9	2.072.078,5	6,57
3	2012	2.590.120,2	2.202.328,7	6,29
4	2013	2.982.610,5	2.353.541,9	6,87
5	2014	3.378.383,2	2.504.469,5	6,41
6	2015*)	3.776.970,5	2.678.816,1	6,96
7	2016**)	4.231.787,5	2.866.408,3	7,00

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan sebesar 6,41% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,96%. Pada Tahun 2016 Perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan sebesar 7,00%. Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas harga konstan yang terlihat semakin besar dari tahun ke tahun, maka hal tersebut menandakan bahwa angka inflasi ternyata semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2016 (%)



c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belum Pernah/Belum Tamat SD	5.558	266	5.824	2.494
Sekolah Dasar	19.924	318	20.242	4.939
Sekolah Menengah Pertama	18.243	213	18.456	6.905
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	986	-	986	-
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas/Diploma I/II/III	3.287	106	3.393	31
Jumlah/Total	56.786	1.575	58.361	17.005

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

d. Penduduk Miskin

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil pendataan dengan metode SUSENAS, Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 6.670 jiwa (5,83%) dari total jumlah penduduk 139.760 jiwa dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 630 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan

baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan;
- 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 3) Kestinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang;
- 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arrah kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan

keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

a) Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah.

Tabel 2.11
Kondisi Pendidikan

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.1	Angka melek huruf (%)	99,73	99,53	99,95
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	-	-	8,94
1.3	Angka Partisipasi Kasar			
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	120,48	120,19	116,41
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	90,8	89,17	100,99
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	49,33	67,29	61,15
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,34	103,3	95,84
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,35	66,64	65,64
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	47,26	47,69	36,49

b) Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.12
Kondisi Kesehatan

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1.	Rasio tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk (1000:1)	1:4.984	1:5.770
2.	Rasio dokter per satuan penduduk	28:107.500	30:109.949
3.	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	508:107.500	864:109.949
4.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	125 (35,51%)	198 (57,56%)
5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,86	86,86
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97	127
7.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
8.	Cakupan Kunjungan Bayi	91,3%	92%
9.	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup	10	7
10.	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup	159	223
11.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	86,86	92
12.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72	72
13.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	3	3

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

a) Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (human resources). pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam

memilih dalam membina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Angka melek huruf (%)	99,8
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116,93
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,29
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,21
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	63,22
6	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1 : 10
7	Angka Partisipasi Sekolah (%)	110,67
8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	133
9	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1 : 11
10	Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,54
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	92,3
12	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	20,13
13	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	25,48
14	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	30,49
15	Angka Harapan Lama Sekolah	11,74
16	Rata-rata Lama Sekolah	8,94
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,73
18	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,31
19	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,17
20	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,06
21	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,81
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,08

b) Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat

berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Angka Kelangsungan hidup Bayi	93,79
2	Angka Usia Harapan Hidup	72
3	Angka Gizi Buruk (%)	3
4	Angka kematian ibu	103/100.000 KLH
5	Angka Kematian Bayi	8/100 KLH
6	Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 9.975
7	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	89 : 112.484
8	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	35: 112.484
9	Rasio Dokter per satuan penduduk	35: 112.484
10	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	592 : 112.484
11	Cakupan Puskesmas	100
12	Cakupan Pembantu Puskesmas	0,69
13	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	90
14	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60,95
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,73
16	Cakupan Ibu Nifas	90,03
17	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	52,23
18	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,31
19	Cakupan pelayanan anak balita	80,26
20	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
21	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	99,4
22	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	101,95
23	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	0
24	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	0,21
25	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	
26	Penderita DBD yang ditangani	140,46
27	Penemuan Penderita Diare	1152
28	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0
29	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	8 Dokter spesialis
30	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	61%
31	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	98%
32	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pemicu peningkatan pelayanan bagi masyarakat maupun untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung

Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565
2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20
3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7450
4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78%
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	39%
7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	10,63%
8	Persentase penanganan sampah (%)	12,21%
9	Rasio Rumah Layak Huni	23,328%
10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	6,909
11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935
12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	4,4%
14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 Desa
15	% Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 Desa
16	% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	12,42%
17	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,81%
18	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98%
19	% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15%

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (hwa)	14844
2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39%
3	Rumah Layak Huni (unit)	26241
4	% Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	23,328%

e) **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling.

Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

f) **Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual, dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial)

secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas. Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertengahan keluarga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 berdasarkan PBDT 2015 yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan
 - Desil 1 : 21
 - Desil 2 : 295
 - Desil 3 : 716
 - Desil 4 : 411
- Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan
 - Desil 1 : 186
 - Desil 2 : 1965
 - Desil 3 : 3588
 - Desil 4 : 1687

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 penduduk Kabupaten Gunung Mas masuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 1.443 RTS atau 7.426 jiwa.

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

a) Tenaga Kerja

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan

prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

No	Indikator/ Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Kondisi Tahun 2015
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,44%
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,70%
3	SD/setingkat	0
4	SLTP/setingkat	1
5	SLTA/setingkat	16
6	Diploma I/II/III/setingkat	18
7	Diploma IV/Sarjana	18

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2015
1	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	2143
2	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta (orang)	-
3	Jumlah KDRT (orang)	1
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (kasus)	-
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Pelugas Tertali di dalam P2TP2A (kasus)	3
6	Jumlah Balita Iktu Posyandu (anak)	-

c) Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan

terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai 15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

d) **Pertanahan**

Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang pertanahan dengan indikator sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun	9
2	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	0
3	% Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	57,14%

e) **Lingkungan Hidup**

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaannya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerangi kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL UKM , dsb.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Pencemaran status mutu air	35%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	79%
3	Penegakan Hukum Lingkungan	100%

4	% Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	73,3%
5	% Standar Baku Mutu Udara	73,3%

f) **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian hari.

g) **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	373
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	4

h) Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan penduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi satu wilayah dimasa yang akan datang.

ambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	2,729
2	Rasio Akseptor KB (orang)	1500
3	Cakupan Peserta KB Aktif (orang)	17.595
4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	18
5	Terpadunya Program Kerja KB (Program)	2
6	Tersedianya Alokon KB di Klinik (buah)	65
7	Jumlah Sarana dan Prasarana KB (unit)	8
8	Keluarga Pra Sejahtera I	-
9	Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga (kelompok)	-
10	Jumlah Kelompok Tribina (Kelompok)	250 yang aktif Cuma 36
11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/Organisasi Kepemudaan	134 yang aktif cuma 10
12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	1

i) Perhubungan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Traffic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun sebelumnya menjadi 33 %.

j) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Website milik pemerintah daerah (buah)	33
2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	54
3	Jumlah Radio/TV lokal	1
4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0,000
5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	6
6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	2
7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	9
8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	7
9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	14
10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	2
11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624
12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	0
13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	2
15	Jumlah Badan Publik PPID	28
16	Pameran / expo	1
17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	85,8
18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	14
19	Media Luar Ruang (Papan Informasi, Balho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	17
20	% Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	49,16%

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap namun ingin memiliki simpanan dan mendapat kemudahan dalam sisi jasa pembiayaan barang hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Koperasi Aktif (%)	52%
2	Jumlah UMKM	2,943
3	Jumlah Industri	-
4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4
5	% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	27%
6	% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	40,90%

l) Penanaman Modal

Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	42
2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
3	Lamanya hari proses perizinan	10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06
5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa belajar menghargai orang lain.

n) Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi keperluan penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pertanian, dsb.

o) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan pengembangan pariwisata daerah.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	25

p) Perpustakaan

Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2017 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah perpustakaan	1
	a. Jumlah Perpustakaan umum	40
	b. Jumlah perpustakaan sekolah :	
	- SD/MI	166
	- SMP/MTs	56
	- SMA/MA	13
	c. Jumlah perpustakaan desa/keurahan	50
	d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0
	e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0
2	Jumlah anggota	1.478
3	Jumlah pengunjung	4.028
4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	30.130

q) Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah

ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena fungsi instansi berjalan dan disimpan untuk dipergunakan.

3) Fokus Urusan Pilihan.

a) Energi dan sumberdaya mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.

b) Kehutanan

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha. Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung seluas 737.557,60 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha

dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

c) Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis budidayanya dibagi dalam 2 jenis yaitu kolam (fresh water pond) dan keramba (Cage). Luas perairan perikanan darat pada tahun 2016 untuk jenis kolam seluas 79,60 Ha dan untuk jenis keramba sebanyak 334 unit. Sedangkan produksi perikanan darat menurut jenisnya pada tahun 2016, untuk kolam sebesar 2922,32 ton dan untuk keramba sebesar 440,74 ton. Untuk jenis komoditas perikanan tangkap yang dipasarkan komoditinya adalah ikan patin (301,10 ton), lais (31,90 ton), baung (15,10 ton), belida (8,70 ton), betok (7,50 ton), gabus (7,80 ton), gurame (4,80 ton), jelawat (4,70 ton), toman (6,20 ton) dan udang (2 ton). Sedangkan untuk perikanan kolam komoditinya adalah nila (142,93 ton), patin (301,10 ton), mas (60,62 ton), lele (73,33 ton) dan betok (7,50 ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	3.701,82
2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	260,60
3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	39
4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	207,88
5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	27,84

d) Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat

dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menamakan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes
- Objek wisata alam Sungai Hamputung
- Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
- Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
- Objek wisata budaya Belang Turumbang Korik
- Objek wisata budaya Betang Damang Batu Turumbang Anoi
- Objek wisata budaya Betang Turumbang Malehui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Kunjungan Wisata	9457
2	Jumlah objek wisata daerah	1
3	PDRB Sektor Pariwisata	70%

e) Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan merupakan suatu "sumbangsih nisbi" (relative contribution) sektor pertanian dalam perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun

demikian tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menandalkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2016
1	Pertanian	
	% PDRB Sektor Pertanian	7,58
2	Luas Panen Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ha)	939
	Padi ladang (Ha)	2.228
	Jagung (Ha)	59
3	Produksi Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ton)	2133
	Padi ladang (Ton)	4395
	Jagung (Ton)	150

f) Perdagangan

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa-jasa serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,85% terhadap nilai PDRB tahun 2016.

g) Perindustrian

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain industri agro dan hasil hutan meliputi industri meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.

Data tahun 2016 terlihat bahwa usaha perdagangan yang memiliki SIUP di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2.262 buah yang terdiri dari perdagangan besar, dan kecil/eceran. Berdasarkan banyaknya bentuk perusahaan yang memiliki SIUP adalah perusahaan perorangan sebanyak 210 buah.

h) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

- (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;
- (2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi lahan;
- (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (4) Pemerataan penyebaran penduduk;
- (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
- (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2017 sebanyak 93,22 %.

4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a) Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada PDRG atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebanyak 6,41% pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya dari 6,09 %.

b) Perencanaan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 2014-2019 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis

perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah selama periode 2010 -2016 anatara lain:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2009-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- 2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan kegiatan;
- 3) Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 4) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- 7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain :

- ✦ Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007. Penerbangan

ketika itu dilakukan hanya sebanyak 37 kali kedatangan dan 37 kali keberangkatan. Untuk tahun 2008 tidak ada penerbangan dan untuk tahun 2009 telah mulai dilakukan penerbangan pada awal bulan Maret bekerjasama dengan Perusahaan Penerbangan Avia-Star dengan jadwal penerbangan rabu dan jum'at setiap minggunya. Tahun 2010 penerbangan dilakukan tiap hari senin dan jum'at. Jumlah penerbangan tahun 2010 sebanyak 105 kedatangan dan keberangkatan, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 589 penumpang, yang berangkat 692 penumpang. Untuk tahun 2011 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 99 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang sebanyak 415 penumpang dan 544 penumpang untuk keberangkatan. Tahun 2012 terjadi peningkatan penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan yaitu 161 kali dan untuk penumpang datang sebanyak 384 penumpang dan 522 penumpang untuk keberangkatan. Sedangkan untuk tahun 2013 terjadi penurunan baik untuk kedatangan/keberangkatan maupun jumlah penumpang ataupun barang. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2013 sebanyak 41 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 107 orang dan keberangkatan sebanyak 120 orang. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan untuk kedatangan/keberangkatan pesawat berjumlah 83 kali, sedangkan jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan penumpang berangkat 255 orang. Selain penerbangan komersial yang merupakan kerjasama Pemerintah propinsi dan kabupaten, juga ada penerbangan perintis oleh MAF (pesawat type capung) yang juga melayani hal yang bersifat sosial. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2014 sebanyak 166 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan keberangkatan sebanyak 255 orang. Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun keberangkatan dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 64 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang 134 orang dan penumpang yang berangkat 142 orang. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun

keberangkatan yang berkurang yaitu 3 kali kedatangan dan 3 kali keberangkatan dengan jumlah penumpang yaitu 8 orang yang datang dan 14 orang yang berangkat.

- ✦ **Perthubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2014 yang terdiri atas ruas jalan negara 308,173 Km, ruas jalan provinsi 110,460 km, ruas jalan Kabupaten pada Tahun 2016 adalah 738,992 km. Tahun 2016 panjang ruas jalan kabupaten 738,992 Km. Jenis permukaan jalan beraspal pada Tahun 2016 meningkat menjadi 154,841 Km dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 113,662 Km.**
- ✦ **Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.**
- ✦ **Pada tahun 2016, jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2016 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 29.877.041 Kwh dengan jumlah dijual 26.877.651 Kwh, dipakai sendiri 151.570 Kwh dan susut/hilang sebesar 3.148967 Kwh. PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 mampu melayani 11.300 pelanggan.**
- ✦ **Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten, dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah pelanggan untuk tahun 2016 sebanyak 11.300 pelanggan. Jumlah ini meningkat 7,94% persen terhadap jumlah pelanggan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.721 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 sebesar 671.549 m³.**
- ✦ **Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 berjumlah sebanyak 6 Unit dengan status Kantor Pos Cabang dan 1 Unit dengan status loket Ekstensi.**
- ✦ **Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian. Sampai tahun 2017, sudah terdapat 4 buah bank yaitu BRI, Mandiri, BNI dan Bank Kalteng, baik berupa cabang**

pembantu, unit maupun kantor kas yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan tersebar di Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Rungan.

- ✦ Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan memadai berupa hotel dan losmen. Sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas terdapat 18 buah hotel dan losmen dengan total jumlah kamar sebanyak 325 kamar dan terbagi atas kamar dengan fasilitas AC sebanyak 98 kamar dan Non AC sebanyak 225 kamar.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu :

- a. Jumlah program dan kegiatan pada RKPD perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017.
- b. Jumlah Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2017 yang tidak direalisasikan pelaksanaannya dalam APBD perubahan Tahun 2017.
- c. Jumlah Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2017 namun masuk pelaksanaannya dalam APBD Tahun 2017.
- d. Jumlah presentase Program dan Kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2017.
- e. Jumlah Persentase Program dan Kegiatan yang tidak termuat atau tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2017 namun pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2017.
- f. Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2017 ini berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 122 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 101 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah 10 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 90,98 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,20 %.

2. DINAS KESEHATAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 69 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017 adalah 10 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah presentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 85,51 % dan jumlah Presentase kegiatan di luar RKPD Perubahan 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1,45 %.

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,70 %.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 212 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 165 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 24 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 89,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11,32 %.

5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 62 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 98,39 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,84 %.

6. DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 29 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 29 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah

100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

9. DINAS SOSIAL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD

Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,11 %.

10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,94 %.

11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 44 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,83 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,17 %.

12. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 31 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 91,89 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,11 %.

13. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 26 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7,69 %.

15. SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 129 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Tahun Perubahan 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 20 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 15 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 84,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11,63 %.

16. SEKRETARIAT DPRD

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

17. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,65 % dan

jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,17 %.

18. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 87 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 77 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 91,95 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3,45 %.

19. INSPEKTORAT KABUPATEN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 30 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 9,09 %.

20. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3,92 %.

21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,70 %.

22. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,26 %.

23. KECAMATAN SEPANG

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 52 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 92,31 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

24. KECAMATAN TEWAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,00 %.

25. KECAMATAN MANUHING

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,44 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,56 %.

26. KECAMATAN RUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 39 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,76 %.

27. KECAMATAN MIHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2016 adalah 98,04 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1,96 %.

28. KECAMATAN RUNGAN HULU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 98,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 9,26 %.

29. KECAMATAN DAMANG BATU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 32 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,06 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,94 %.

30. KECAMATAN MANUHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,38 %.

31. KECAMATAN MIRI MANASA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 90,70 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,33 %.

32. KECAMATAN KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 79 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 75 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,47 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,53 %.

33. KECAMATAN RUNGAN BARAT

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,35 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 16,28 %.

34. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 78 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 71 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 93,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,56 %.

35. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,08 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,88 %.

36. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,22 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,56 %.

- 37. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,26 %.
- 38. DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7,50 %.
- 39. DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 39 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,87 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,56 %.

40. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 6 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 92,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 12,00 %.

41. DINAS PERIKANAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 41 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,12 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,88 %.

42. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 4 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,51 %.

Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah antara lain adalah :

1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan).
2. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
3. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
4. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
5. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
6. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
7. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
8. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
9. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/keelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.
10. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam.
11. Masalah Stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Adapun tanda-tanda Stunting adalah :
 - Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya;

- Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya;
 - Berat badan rendah untuk anak seusianya;
 - Pertumbuhan tulang tertunda;
- Pada tahun 2016 angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih tinggi. Angka stunting di Gunung Mas berada di urutan ke-6 di Kalimantan Tengah yaitu 32,6%.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- 1) **Urusan Pendidikan**
 - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 8,9 Tahun
 - b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
 - c) Tidak meratanya pendistribusian Guru
 - d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
 - e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi

- 2) **Urusan Kesehatan**
 - a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
 - b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.
 - c) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat
 - d) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
 - e) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya
 - f) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
 - g) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

- 3) **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
 - b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru

- c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
 - d) Lemahnya perlindungan sumber mata air
 - e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantitasian
 - f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
 - g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - i) Belum adanya TPS di tiap kecamatan
 - j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
 - k) Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik hanya 24,51 % Tahun 2017
 - l) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
 - m) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun
 - n) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan
 - b) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
 - b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
 - c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
 - d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS
- 6) Sosial
- a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
 - b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
 - c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah

- 7) Tenaga Kerja
 - a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
 - b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru

- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 - c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
 - d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

- 9) Pertanahan
 - a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
 - c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

- 10) Lingkungan Hidup
 - a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena penambangan liar)
 - b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
 - c) Lemahnya fungsi pengendalian
 - d) Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

- 11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil

- 12) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
 - b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
 - c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
 - d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
 - e) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
 - f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
 - g) Belum ditetapkannya target PADes

- 13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
 - b) Rendahnya usia perkawinan pertama
 - c) Lemahnya institusi KB
 - d) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga
 - e) Lemahnya data kependudukan

- 14) Perhubungan
 - a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan
 - b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

- 15) Komunikasi dan Informatika
 - a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel

- b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel
 - c) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
 - d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan E Government
- 16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
 - b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
 - c) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi
 - d) Terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya
 - e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
 - f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
 - g) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
 - h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk
- 17) Penanaman Modal
- a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
 - b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
 - c) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
 - d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
 - e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal
- 18) Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet
 - b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjurangan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

- d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional

19) Statistik

- a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
- b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

20) Kebudayaan

- a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
- b) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
- c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
- d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

21) Perpustakaan

- a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
- c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

22) Kearsipan

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
- b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

23) Kehutanan

- a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
- b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

24) Kelautan dan Perikanan

- a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut

- b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

25) Pariwisata

- a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
- b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
- c) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
- d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

26) Pertanian

- a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
- b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
- c) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
- d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
- e) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
- h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian
- j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
- k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
- l) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar
- m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan local

- n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
- o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
- p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
- q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

27) Perdagangan

- a) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian
- b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
- c) Belum adanya pasar induk kabupaten
- d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

28) Perindustrian

- a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah
- b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
- c) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
- d) Akses teknologi terbatas

29) Administrasi Pemerintahan

- a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
- b) Reformasi birokrasi belum optimal
- c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
- d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja

30) Perencanaan

- a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
- b) Lemahnya data dan informasi pembangunan
- c) Sistem Perencanaan belum terintegrasi dengan Sistem Penganggaran

- d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

31) Keuangan

- a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
- b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
- c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
- d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal

32) Kepegawaian

- a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
- c) Masih rendahnya disiplin aparatur
- d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
- e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
- f) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	Uraian/Isi/Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan/Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Laku (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di revisi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (akhir tahun 2018) (NUTWulan I)		Pangsiat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)								(8)		(9)		(10)		(11)	(12)			
1	Uraian/Isi/Unsur Pemerintahan Daerah																										
1.1	Bidang Pendidikan																										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung pelaksanaan tugas pokok dinas		26.317.056.700		19.789.828.247		3.812.173.054		267.593.934								267.593.934	0,94%		20.507.422.181	76,21%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan jasa surat menyurat							19.500.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							201.016.112		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa administrasi kantor							34.534.120		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja							37.700.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan alat tulis kantor							242.143.200		60.087.000								60.087.000								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							15.860.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							112.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan petunjuk perjalanan							25.500.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan bahan logistik kantor							25.500.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kapal rajut koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							682.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran							607.327.623		207.508.834								207.508.834								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kapal rajut koordinasi ke dalam daerah							625.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kurun							124.240.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Tanah							113.360.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Sebatu							77.540.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kabaon-Hulu-Ujan							85.090.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rumbia							100.540.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhai							62.740.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Milze-Rawe							67.960.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Darawa-Batu							69.640.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Mini-Manass							77.590.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rumbia-Hulu							73.540.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhai-Batu							77.690.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rumbia-Batu							67.540.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		10.125.040.000		1.943.745.600		60.000.000		-									0,00%		1.943.745.600	19,20%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Peningkatan nilai/bekas mobil jabatan							30.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Peningkatan nilai/bekas kendaraan dinas/operasional							30.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui pelatihan & sertifikasi		1.635.000.000		721.141.409		129.900.000		-									0,00%		721.141.409	44,11%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							120.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan		517.400.000		621.808.110		249.200.000		-									0,00%		621.808.110	120,19%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pelaksanaan Laporan Rencana Kerja RKPD							33.000.000		-																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Deskripsi/Kuantitas) (Output)	Target RAB 2014 per 100 %		Rencana Capaian 2014 (RAB) per 100 %		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun berjalan yang direalisasi (2014)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direalisasi (2014)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD pada tahun 2014 (KUT/realisasi)		Penanggung Jawab	Kategori Anggaran		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp			K	Rp
11	Program Perawatan Kesehatan Sumber Daya Manusia	11.01 Ayojaga kesehatan & kualitas hidup melalui klinik & komunitas	61	1.036.000.000	68	700.277.702	171	475.400.000	11.01.01.01.01.01.1	66.400.000	11.01.01.01.01.01.1	66.400.000	11.01.01.01.01.01.1	66.400.000	15.443.412	374.127.917	15.443.412	374.127.917	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.02 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.02 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	78.728.000	68	124.987.419	171	124.987.419	11.02.01.01.01.01.1	66.800.000	11.02.01.01.01.01.1	66.800.000	11.02.01.01.01.01.1	66.800.000	0,00%	124.987.419	124.987.419	124.987.419	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.03 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.03 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	3.123.742.000	68	3.009.387.123	171	1.86.375.860	11.03.01.01.01.01.1	3.000.000	11.03.01.01.01.01.1	3.000.000	11.03.01.01.01.01.1	3.000.000	0,00%	3.009.387.123	3.009.387.123	3.009.387.123	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.04 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.04 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	15.228.743.800	68	16.744.206.056	171	200.000.000	11.04.01.01.01.01.1	15.200.000	11.04.01.01.01.01.1	15.200.000	11.04.01.01.01.01.1	15.200.000	0,00%	16.744.206.056	16.744.206.056	16.744.206.056	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.05 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.05 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	150.300.000	68	46.608.000	171	94.100.000	11.05.01.01.01.01.1	150.000.000	11.05.01.01.01.01.1	150.000.000	11.05.01.01.01.01.1	150.000.000	0,00%	46.608.000	46.608.000	46.608.000	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.06 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.06 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	3.437.200.000	68	61.893.130	171	15.324.000	11.06.01.01.01.01.1	3.400.000.000	11.06.01.01.01.01.1	3.400.000.000	11.06.01.01.01.01.1	3.400.000.000	0,00%	61.893.130	61.893.130	61.893.130	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.07 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.07 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	400.000.000	68	841.089.140	171	365.000.000	11.07.01.01.01.01.1	400.000.000	11.07.01.01.01.01.1	400.000.000	11.07.01.01.01.01.1	400.000.000	4,51%	841.089.140	841.089.140	841.089.140	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.08 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.08 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	250.000.000	68	90.000.000	171	90.000.000	11.08.01.01.01.01.1	250.000.000	11.08.01.01.01.01.1	250.000.000	11.08.01.01.01.01.1	250.000.000	0,00%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.09 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.09 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	32.441.330.234	68	52.628.116.287	171	5.380.074.999	11.09.01.01.01.01.1	32.441.330.234	11.09.01.01.01.01.1	32.441.330.234	11.09.01.01.01.01.1	32.441.330.234	0,00%	52.628.116.287	52.628.116.287	52.628.116.287	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.10 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.10 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	2.887.646.000	68	620.343.132	171	150.923.024	11.10.01.01.01.01.1	2.887.646.000	11.10.01.01.01.01.1	2.887.646.000	11.10.01.01.01.01.1	2.887.646.000	0,00%	620.343.132	620.343.132	620.343.132	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.11 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.11 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	180.000.000	68	688.728.082	171	40.400.000	11.11.01.01.01.01.1	180.000.000	11.11.01.01.01.01.1	180.000.000	11.11.01.01.01.01.1	180.000.000	10,19%	688.728.082	688.728.082	688.728.082	173	850.000	Manajemen	11.1
	11.12 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	11.12 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan	61	11.842.032.700	68	3.060.049.083	171	3.379.869.420	11.12.01.01.01.01.1	11.842.032.700	11.12.01.01.01.01.1	11.842.032.700	11.12.01.01.01.01.1	11.842.032.700	17,46%	3.060.049.083	3.060.049.083	3.060.049.083	173	850.000	Manajemen	11.1

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome/Impact)	Target RPJMD pada tahun 2014 dan 2015		Rencana Capaian Kinerja RPJMD dan RPJPD Tahun 2014 dan 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014 dan 2015				Rencana Kinerja Pada Tahun-tahun 2014-2015				Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direvisi (2014-2015)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun 2014 dan 2015 (Revisi)		Penyusunan Daftar Penanggung Jawab	Kategori	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
11	Program penguatan pembangunan sektor pelayanan sipil	Terlaksananya pelayanan yang cepat dan memuaskan	287.199.971	28.735.000	44.600.000	1.750.000	730.000	1.200.000	1.870.000	1.400.000	27.480.000	1.400.000	4.000.000	1.400.000	4.000.000	1.400.000	4.000.000	11,30%	11,30%	Dinas Sosial	010
	Pelayanan umum kepada warga dan tidak termasuk kepada ASN				28.180.000	-														Dinas Sosial	010
	Perawatan kesehatan keluarga masyarakat				20.100.000	-														Dinas Sosial	010
	Perawatan kesehatan jiwa dan gangguan jiwa				4.700.000	750.000														Dinas Sosial	010
	Program penguatan sarana kesehatan	Jumlah layanan kesehatan	3.200.194.738	4.495.890.000	1.200.000.000	63.750.000	82.700.000	1.200.000	1.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4,49%	4,49%	Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				28.200.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				207.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				890.180.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				175.010.000	20.500.000														Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				400.000.000	8.600.000														Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				51.200.000	8.000.000														Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				10.800.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				12.900.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				325.700.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				427.120.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				90.300.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				90.300.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				12.410.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				19.400.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				30.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				40.000.000															Dinas Sosial	010
	Program kesehatan jiwa				4																

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Outcome/Target (CI/CP)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Tipe Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp									
																				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Membangun Sistem Manajemen Risiko dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Outcome/Target (CI/CP)	8012.027.000	2.002.478.000	1.004.242.000	502.014.004	2.628.000	12.028.472	3.048.000	18.475.000	20.000.000	8.420.000	18,00%	2.489.443.819	30,17%	Dipertama	Kategori Kegiatan											
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	10.500.000	2.628.000	2.628.000	10.500.000	2.628.000	10,50%	10.500.000	2.628.000	10,50%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	140.400.000	12.028.472	12.028.472	140.400.000	12.028.472	8,57%	140.400.000	12.028.472	8,57%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	300.000	3.048.000	3.048.000	300.000	3.048.000	100,00%	300.000	3.048.000	100,00%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	19.878.000	3.048.000	3.048.000	19.878.000	3.048.000	15,34%	19.878.000	3.048.000	15,34%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	71.601.704	18.475.000	18.475.000	71.601.704	18.475.000	25,81%	71.601.704	18.475.000	25,81%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	100.380.000	20.000.000	20.000.000	100.380.000	20.000.000	19,92%	100.380.000	20.000.000	19,92%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	63.468.000	3.048.000	3.048.000	63.468.000	3.048.000	4,82%	63.468.000	3.048.000	4,82%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	6.120.000	8.420.000	8.420.000	6.120.000	8.420.000	137,25%	6.120.000	8.420.000	137,25%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	51.600.000	8.420.000	8.420.000	51.600.000	8.420.000	16,32%	51.600.000	8.420.000	16,32%	Dipertama
2	Membangun Sistem Manajemen Risiko dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Outcome/Target (CI/CP)	8012.027.000	2.002.478.000	1.004.242.000	502.014.004	2.628.000	12.028.472	3.048.000	18.475.000	20.000.000	8.420.000	18,00%	2.489.443.819	30,17%	Dipertama	Kategori Kegiatan											
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	10.500.000	2.628.000	2.628.000	10.500.000	2.628.000	10,50%	10.500.000	2.628.000	10,50%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	140.400.000	12.028.472	12.028.472	140.400.000	12.028.472	8,57%	140.400.000	12.028.472	8,57%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	300.000	3.048.000	3.048.000	300.000	3.048.000	100,00%	300.000	3.048.000	100,00%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	19.878.000	3.048.000	3.048.000	19.878.000	3.048.000	15,34%	19.878.000	3.048.000	15,34%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	71.601.704	18.475.000	18.475.000	71.601.704	18.475.000	25,81%	71.601.704	18.475.000	25,81%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	100.380.000	20.000.000	20.000.000	100.380.000	20.000.000	19,92%	100.380.000	20.000.000	19,92%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	63.468.000	3.048.000	3.048.000	63.468.000	3.048.000	4,82%	63.468.000	3.048.000	4,82%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	6.120.000	8.420.000	8.420.000	6.120.000	8.420.000	137,25%	6.120.000	8.420.000	137,25%	Dipertama
																		Program pengembangan sistem manajemen risiko	51.600.000	8.420.000	8.420.000	51.600.000	8.420.000	16,32%	51.600.000	8.420.000	16,32%	Dipertama

No	Unsur/Bagian Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun berjalan yang di revisi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2019 (Triwulan I)	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			(1)		(2)		(3)		I		II		III		IV						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10) = (8) x 100 %	(11) = (9) x 100 %	(12) = (10) x 100 %	(13)	(14)		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *)																				
	Program Peningkatan Keselamatan Petani	Peningkatan tingkat tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghargaan ketahanan pangan		1.290.470.000		645.403.500		467.982.900		2.950.000					2.950.000	0,50%		648.403.500	50,24%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelindungan tanaman padi dan palawija *)						112.000.000		2.950.000						2.950.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Peranginan Gangguan Usaha Perkebunan *)						84.000.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pendidikan dan Pengawasan Corporate Social Responsibility (CSR)						66.800.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemutakhiran Data Kewilayahan Petani *)						60.000.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelatihan Lapangan Petani Jaka Merah *)						66.722.900		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sosialisai Perumbuhan dan Pengembangan Pajalan dan Gapoktan *)						74.470.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan dan perikanan)	Meningkatnya ketahanan pangan dan perkebunan melalui penyalapan dan penelitian sarana produksi pangan daerah	3.830.093.000		14.480.999.227		2.171.870.000		20.425.000						20.425.000	0,94%		15.591.424.227	454,57%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pewangunan daerah rawan pangan						16.400.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan						16.550.000		2.515.000						2.515.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Kajian terbit pasokan dan pemasaran pangan						40.800.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan interaktivasi tanaman padi, palawija						1.271.000.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan pebasihan/perbibitan						348.388.000		2.950.000						2.950.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan						42.395.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						60.000.000		14.950.000						14.950.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi *)						56.790.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeran dan Lomba dalam rangka kegiatan tingkat NPS Tingkat Provinsi *)						66.475.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Lomba Cipta Menu B254 Tingkat Kabupaten *)						66.490.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Analisis Nelayan Bahan Makanan (NBM) *)						55.500.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar (SIP) *)						60.000.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan kawasan wisata pangan *)						49.000.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya SDM dalam hal penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.295.099.000		1.061.898.486		87.890.000		8.700.000						8.700.000	0,62%		1.015.598.486	65,91%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tingkat desa						8.700.000		8.700.000						8.700.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Perawatan dan pemeliharaan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tingkat desa						79.200.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan kuantitas hasil pertanian/perkebunan	35.936.804.180		18.925.428.538		1.304.660.000		129.600.000						129.600.000	0,90%		18.065.564.898	65,02%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						100.500.000		7.200.000						7.200.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *)						500.000.000		4.100.000						4.100.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pendampingan kegiatan APBD dan kegiatan APBD *)						245.280.000		40.325.000						40.325.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Refreshng Pengolahan data statistik dan informasi pertanian/perkebunan						60.000.000		17.380.000						17.380.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kelembagaan petani dan lembaga usaha						98.000.000		12.660.000						12.660.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kawasan produksi perkebunan *)						74.000.000		13.500.000						13.500.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembangunan Bidang Bawah Karet *)						85.280.000		-						-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengendalian Organisasi Penggabung Tanaman (OPT) komoditas perkebunan *)						45.500.000		2.800.000						2.800.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

NO	Uraian/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 sd 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd RPJPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direvisi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan RPJPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2018 (% Triwulan)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
	Penyusunan rencana bentuk KDI tentang perbaikan pelayanan publik pelaksanaan APBD					98.000.000	-															SPKAD		
	Penyusunan rencana bentuk KDI tentang perbaikan pelayanan publik pelaksanaan APBD					210.522.000	82.887.000								82.887.000								SPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen pengajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas					57.260.000	4.498.000								4.498.000								SPKAD	
	Revisi/kegiatan administrasi keuangan daerah					172.800.000	31.320.000								31.320.000								SPKAD	
	Penyusunan RPJPD dan RPJRU					14.400.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan laporan semester berjalan daerah					73.600.000	-								-								SPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah					52.800.000	14.280.500								14.280.500								SPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas					46.000.000	11.780.000								11.780.000								SPKAD	
	Monevarev Desehatan SDG Pelaksanaan APBD					30.700.000	7.440.500								7.440.500								SPKAD	
	Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kasda Kabupaten Gunung Mas					87.800.000	14.435.500								14.435.500								SPKAD	
	Penyusunan rencana KIIA dan rencana PDAS					20.800.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan rancangan KIIA Perubahan dan rancangan PDAS Perubahan					23.600.000	-								-								SPKAD	
	Pelaksanaan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas					50.500.000	12.185.000								12.185.000								SPKAD	
	Penelitian Kas Daerah					194.000.000	24.315.000								24.315.000								SPKAD	
	Penelitian Gai PMS					114.000.000	7.524.000								7.524.000								SPKAD	
	Revisi/kegiatan Laporan Realisasi Anggaran pada RPJPD					65.500.000	7.687.500								7.687.500								SPKAD	
	Peningkatan operasional pemeliharaan jaringan dan pemastan Sinda Kabupaten Gunung Mas					65.180.000	22.948.182								22.948.182								SPKAD	
	Peningkatan kualitas perangkat/peralatan Server dan jaringan Sinda Kabupaten Gunung Mas					300.500.000	84.000.000								84.000.000								SPKAD	
	Revisi/kegiatan rencana anggaran gaji PNS					37.000.000	-								-								SPKAD	
	Peningkatan pelayanan Tuntutan Perencanaan dan Lulusan Dasa Bual (DIBAL)					65.500.000	9.080.000								9.080.000								SPKAD	
	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)					161.300.000	55.621.680								55.621.680								SPKAD	
	Rekonsiliasi Realisasi Setoran PPK serta Penyusunan Rekapitulasi Riwayat dan Komposisi PMS untuk penyalangan DAU					58.710.000	15.691.201								15.691.201								SPKAD	
	Penyusunan Laporan Riwayat dan Rekapitulasi Perimbangan Pihak Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaj PNS se Kabupaten Gunung Mas					54.200.000	26.031.000								26.031.000								SPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Sinda Sinda Kabupaten					200.500.000	99.481.500								99.481.500								SPKAD	
	Penyusunan Rencana Milik Daerah					124.800.000	7.700.000								7.700.000								SPKAD	
	Revisi/kegiatan Rencana Milik Daerah					150.200.000	4.040.000								4.040.000								SPKAD	
	Revisi/kegiatan Data Rencana Milik Daerah					137.710.000	87.739.000								87.739.000								SPKAD	
	Peningkatan Pengembangan Aplikasi Perencanaan					130.400.000	-								-								SPKAD	
	Peningkatan Kabupaten Gunung Mas					-	-								-								SPKAD	
	Peningkatan dan Penyusunan Informasi Keuangan Daerah					81.200.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					-	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					71.100.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					-	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					71.100.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					-	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					100.000.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Laporan					130.000.000	36.034.448								36.034.448								SPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Lincir Kabupaten Gunung Mas					20.500.000	-								-								SPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas					24.400.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembelian					30.000.000	3.940.000								3.940.000								SPKAD	
	Penyusunan Laporan Pajak PBB 21, PBB 22, PBB 23, dan PBB Badan Penyelenggara Keuangan Daerah					58.800.000	1.580.000								1.580.000								SPKAD	
	Rekonsiliasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten					21.000.000	4.000.000								4.000.000								SPKAD	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD se Kabupaten Gunung Mas					21.500.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)					188.200.000	-								-								SPKAD	
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat SMDA, RMD dan SDCA					110.000.000	-								-								SPKAD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas					401.000.000	-								-								SPKAD	
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan RMD, RMD dan SDCA					117.000.000	-								-								SPKAD	
	Pembuatan Website Aplikasi Sinda Kabupaten Gunung Mas					21.084.894	-								-								SPKAD	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2019 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2014 - 2019. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2019 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional :

- 1) Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana, dengan cara :
 - a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan;

- b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan;
 - c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan.
- 2) Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi, dengan cara :
- a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;
 - b. Perbaikan Struktur Industri;
 - c. Peningkatan Daya Saing Industri;
 - d. Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik.
- 3) Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan, dengan cara :
- a. Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwisata;
 - b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
 - d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan.
- 4) Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan, dengan cara :
- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
 - b. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;
 - c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;
 - d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.
- 5) Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek,

pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier, dengan cara :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas;
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas;
- c. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa);
- d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi :

- 1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan kebijakan :
 - a. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
 - b. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
 - c. peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
 - d. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah;
 - e. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah.
- 2) Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten, dengan kebijakan :
 - a. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian;
 - b. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta;
 - c. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;
 - d. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah :

- 1) Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan berbasis potensi lokal serta UMKM; Pengembangan aktivitas usaha tersebut dalam rangka mendorong masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunanm perikanan dan peternakan

dengan bantuan stimulan seperti bibit tanaman, padi dan ternak/ikan;

- 2) Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku UMKM;

Peningkatan kemampuan ini meliputi sarana dan prasarana pertanian, seperti alat-alat pertanian, sarana irigasi serta kelengkapan infrastruktur lainnya. Selain itu juga kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi petani maupun kelompok tani dalam pengembangan kemampuannya sehingga meningkatkan perekonomian dalam UMKM.

- 3) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 4) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 5) Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian;

Peningkatan akses pasar dilakukan dengan melakukan kerjasama dalam hal dukungan dalam pemasaran hasil pertanian, artinya dukungan ini berupa harga yang terjangkau dan memadai dalam mengakomodir hasil pertanian yang dijual di pasar sehingga pendapatan petani dapat meningkat.

- 6) Revitalisasi dan pengembangan pasar – pasar desa;

Peningkatan dan pembukaan pasar – pasar desa diharapkan akan meningkatkan gairah petani maupun masyarakat dalam

memasarkan hasil pertanian atau ladangnya dan diharapkan dapat melayani kebutuhan pokok yang ada di sekitar pasar – pasar desa tersebut sebagai pusat sentra perekonomian masyarakat.

- 7) Peningkatan akses permodalan bagi budidaya pertanian, perkebunan dan UMKM;

Perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk pengembangan dan perluasan UMKM yang ada di pedesaan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam juta rupiah sebesar Rp.1.634.260,14 menjadi Rp.1.836.827,47 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 2.190.600,44, sedangkan proyeksi untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 diperkirakan naik menjadi 26,78%, 27,98% dan 29,12%.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) dalam juta rupiah pada tahun 2012 sebesar Rp.768.543,55 menjadi Rp. 820.424,81 pada tahun 2013, sedangkan perkiraan pada tahun 2014 sebesar Rp.978.438,63.

Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,22% dan pada tahun 2013 menguat menjadi 6,75%. Penguatan ini karena kinerja sektor ekonomi terutama seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai meningkat. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,9%, dan diproyeksikan pada tahun 2015 , 2016 dan 2017 sebesar 7%, 7,15% dan 7,2%.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.958.013,28 menjadi Rp. 17.510.271,40 pada tahun 2013, sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) tahun 2012 sebesar Rp. 7.504.575,24 menjadi Rp. 7.821.018,21 pada tahun 2013. Diperkirakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019, kenaikan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah 26,78%, 27,98% dan 29,12%.

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2013 sebesar 8,4% dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 7,8%. Sedangkan pada tahun 2015, laju inflasi diproyeksikan sebesar 6,9%, pada tahun 2016 sebesar 6,4%, tahun 2017 sebesar 5,1% dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,37 % per bulan maret 2018

d. Investasi

Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2013, nilai Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.835,3 Triliun, menurun pada tahun 2014 menjadi Rp. 980,4 Milyar, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar

adalah Rp. 1.270,1 Triliun, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.179,1 Triliun dan menurun pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.037,8 Triliun.

f. Penduduk dan Angkatan Kerja

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Berdasarkan data dari *Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017* jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar 112.484 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 59.803 jiwa dan perempuan sebesar 52.681 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 12,060 jiwa per Km². Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebesar 49.378 orang. Kepala Keluarga (KK) sebesar 33.843. Untuk angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 58.361 orang, bukan angkatan kerja (BAK) sebesar 17.005 orang, jumlah tenaga kerja sebesar 75.366 orang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 77,44 persen.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017*	Target Tahun 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi :					
	a. Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,96	7,00	7,15	7,25
	b. PDRB atas harga konstan	Juta Rp	978.438,63	1.240.464,50	1.587.546,46	
2.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	9.327.346,32	11.825.209,66	15.133.903,32	

3.	Laju Inflasi	%	6,9	6,4	5,1	4,5
4.	Angka Kemiskinan	%	6,17	5,85	5,83	5,16
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8	7	5	3
6.	Indeks Pembangunan Manusia		74,42	74,89	74,99	75,25

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 - 2016, perekonomian Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan

prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018-2019

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2018 dan 2019 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha - usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. **Kedua**, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. **Kelima**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Keenam**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2014-2019 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume rancangan APBD tahun 2019. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Penerimaan Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun didasarkan pada prinsip anggaran surplus dan defisit dan dinamis dengan kemungkinan dibentuknya dana cadangan. Pengertian Surplus adalah bahwa tercapainya tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk belanja modal, sementara defisit terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga mendorong pemerintah untuk bekerja secara terencana dan efisien. Perkiraan surplus dan defisit mengharuskan adanya perubahan setiap pertengahan tahun anggaran berjalan (APBD)

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp 13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan

retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
- g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- h) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH);
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU);

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian

pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Untuk DAU dan DAK diasumsikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2018;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gunung Mas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa kelompok belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran atau

belanja tidak langsung adalah antara lain ; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar terhimpunnya tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung akan dilaksanakan secara terarah dan terkendali agar alokasi anggaran belanja tidak langsung dapat tepat sasaran dan tepat manfaat guna mendukung operasionalisme kegiatan pemerintahan. Karena itu kebijakan di bidang pengeluaran belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Belanja Pegawai

Salah satu komponen dari belanja tidak langsung adalah biaya gaji dan pensiun. Pengendalian biaya ini akan ditempuh dengan menyetarakan laju pertumbuhan pegawai negeri dengan kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Pertambahan pegawai negeri ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, alokasi penempatan dan peningkatan kemampuan aparatur. Kebijakan ini merupakan upaya meningkatkan mutu, produktifitas dan sekaligus kesejahteraan pegawai negeri. Perbaikan penghasilan pegawai senantiasa diupayakan antara lain melalui perbaikan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya.

2. Mengendalikan Belanja Barang

Kebijakan pengeluaran belanja barang diarahkan pada pengendalian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan pemerintahan. Alokasi pengeluaran belanja barang diprioritaskan pada upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pengusaha kecil menengah dan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan belanja pemeliharaan diarahkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah

dan hasil-hasil pembangunan sebelumnya agar dapat berfungsi dengan baik.

3. Mengoptimalkan Belanja Subsidi

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya guna alokasi sumber-sumber keuangan daerah secara optimal, maka alokasi belanja bagi subsidi perlu dilakukan secara cermat dan kalkulatif agar tidak mengakibatkan berbagai distorsi ekonomi khususnya dibidang produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi sedapat mungkin tidak mengurangi atau menghambat pemupukan tabungan pemerintahan.

4. Mengoptimalkan Belanja Hibah

Belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat dengan arahan bahwa dana hibah tersebut dapat meningkatkan produktifitas output riil daerah.

5. Alokasi Belanja untuk Bantuan Sosial.

Belanja untuk bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk pemberian bantuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja ini tidak diberikan secara terus-menerus akan tetapi diberikan hanya dan jika peruntukannya jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)

pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (l) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- 4) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 5) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 6) **Belanja Bantuan Keuangan**
 - a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah

kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD

dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal

sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2016 Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp 89,92 triliun atau 24,42%. Secara Nasional pada Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 203,9 triliun.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16

Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 5) Surplus/Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
 - b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
 - c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2018 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- c) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk kebijakan Belanja Langsung, titik berat pembangunan di Kabupaten Gunung Mas adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dalam arti luas yang dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proiritas ini juga diarahkan dan didorong agar dapat saling memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah guna menunjang mobilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan menjadi salah satu perhatian penting oleh pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran pembangunan daerah. Selain itu peningkatan kemampuan saran air bersih, listrik, telekomunikasi akan ditingkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan kebutuhan pembangunan pada umumnya.
2. Pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia akan ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kualitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Upaya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya akan terus dilakukan. Selain itu, guna percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka upaya pemberian beasiswa kepada putra putri gunung mas yang berprestasi akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Pemberian beasiswa ini akan senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu sektor pendidikan diupayakan mendapat alokasi anggaran pembangunan yang memadai guna mendukung percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pembangunan pertanian, dan perikanan akan ditempuh melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Selain itu usaha penataan dan pembinaan kelembagaan usaha tani dan nelayan agar mampu mengakses berbagai informasi pasar dan jaringan pemasaran termasuk sumber pembiayaan akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Upaya peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur pertanian dalam arti luas juga akan ditingkatkan guna mendukung program ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai agar tercapai pertumbuhan produksi,

produktifitas dan kualitas produksi sebagai bagian dari upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

4. Pembangunan industri khususnya industri-industri berbasis pertanian (agro industri) diarahkan pada usaha penciptaan landasan struktur industri yang kuat yang didukung oleh kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi industri yang terus meningkat, sehingga diharapkan bahwa setiap kecamatan dapat menjadi basis-basis agroindustri yang mampu memanfaatkan dan menghasilkan produk bermuatan lokal (*local content*) yang tinggi disamping memiliki aksesibilitas pemasaran yang luas ditingkat regional maupun nasional pada umumnya.
5. Pembangunan kecamatan sebagai upaya optimalisasi fungsi pusat/sub pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Disamping itu, pembangunan kecamatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengahapus isolasi dan keterpencilan di beberapa wilayah, sehingga ketimpangan daya saing produksi dan pemasaran antar wilayah kecamatan semakin dapat diminimalisir. Selain itu kota Kuala Kurun sebagai ibukota kabupaten akan dibenahi menjadi kota yang memiliki daya dukung, daya tarik dan daya dorong bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Karena itu, kota Kuala Kurun diarahkan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan yang efektif.
6. Peningkatan peran serta masyarakat sejalan dengan upaya menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, maka anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan untuk menunjang berkembangnya potensi masyarakat, termasuk dunia usaha. Hal ini mengingat keterbatasan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah, sehingga sasaran pembangunan hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai potensi investasi masyarakat dan dunia usaha pada khususnya. Karena itu pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan swasta diupayakan dan diarahkan

untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi dan saling menunjang.

7. Efisiensi dan efektifitas pengeluaran biaya langsung akan diupayakan dengan lebih mempertajam alokasi pemanfaatan anggaran, menyempurnakan mekanisme penggunaan dan pengawasannya guna mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran penggunaan anggaran belanja langsung. Demikian pula penyertaan modal pemerintah pada BUMD akan dilakukan secara lebih selektif sebagai bagian dari upaya menjadikan perusahaan daerah sebagai badan usaha yang mandiri dan profesional.
8. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas juga diarahkan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan wilayah yang memadai bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aspek kegiatan pembangunan daerah dan wilayah. Dalam kaitan ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan akan dikembangkan melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Di samping itu, kegiatan investasi, pemantauan, perlindungan dan perhitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pola tata ruang wilayah akan dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 - 2018

- a). Tahun 2008, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 378,1 milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp. 8,7 milyar, dana perimbangan Rp. 364,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4,75 milyar.
- b). Tahun 2009, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 415,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 10,1 milyar,

dana perimbangan Rp. 400,7 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,05 milyar.

- c). Tahun 2010, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 478,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 12,3 milyar, dana perimbangan Rp. 460,5 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,47 milyar.
- d). Tahun 2011, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 573,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 16,8 milyar, dana perimbangan Rp. 551,03 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6,14 milyar.
- e). Tahun 2012, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 550,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 21,47 milyar, dana perimbangan Rp. 506,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 22,27 milyar.
- f). Tahun 2013, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 685,48 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,55 milyar, dana perimbangan Rp. 601,95 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 46,98 milyar.
- g). Tahun 2014, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 732,78 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 26,17 milyar, dana perimbangan Rp. 643,48 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 63,12 milyar.
- h). Tahun 2015, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 810,15 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 32,94 milyar, dana perimbangan Rp. 680,62 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 96,59 milyar.
- i). Tahun 2016, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.028 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,83 milyar, dana perimbangan Rp. 900,4 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 90,97 milyar.
- jj). Tahun 2017, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.060 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61 milyar, dana perimbangan Rp. 908,4 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,10 milyar.
- kj). Tahun 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.174 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61

milyar, dana perimbangan Rp. 984,8 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,05 milyar.

Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 - 2018

Tahun	APBD Per Tahun Anggaran (Rp Juta)		Persentase SILPA (%)
	Total Belanja	Jumlah SILPA	
	(A)	(B)	(B)/(A)
2008	438.192.239.937,80	57.834.926.830,98	13,20
2009	491.520.801.470,59	36.061.634.223,59	7,34
2010	483.814.782.012,00	55.839.488.727,00	11,54
2011	569.769.039.802,00	63.696.376.657,00	11,62
2012	574.310.527.288,05	33.970.320.811,05	5,91
2013	709.379.117.516,00	25.000.000.000,00	3,52
2014	748.674.657.448,00	26.651.190.773,77	3,56
2015	831.093.498.773,00	29.000.000.000,00	3,49
2016	1.048.280.811.494,00	56.314.000.000,00	5,37
2017	1.074.040.210.938,00	62.000.000.000,00	5,77
2018	1.174.939.364.639,10	10.000.000.000,00	0,85

Sumber : Bappeda, 2018

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.403.228.843,07	36.722.792.241,00	38.613.899.007,00	38.613.899.007,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.950.761.891,80	10.215.293.034,00	5.802.725.000,00	5.802.725.000,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.811.782.245,00	2.236.299.650,00	2.325.850.000,00	2.323.350.000,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.313.040.885,32	6.425.582.111,00	6.434.000.000,00	6.434.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.327.643.820,95	17.845.617.446,00	24.051.324.007,00	24.053.824.007,00	
1.2	Dana Perimbangan	824.244.037.834,00	863.775.454.453,00	984.862.135.237,10	984.862.135.237,10	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.533.552.619,00	64.466.675.953,00	99.390.833.237,10	99.390.833.237,10	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	564.028.300.000,00	559.898.689.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	119.474.468.065,00	174.696.316.551,00	197.615.887.000,00	197.615.887.000,00	
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik *)	53.207.717.150,00	64.713.772.949,00	87.855.415.000,00	87.855.415.000,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.180.123.278,55	132.848.275.842,04	147.363.330.395,00	147.363.330.395,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	18.952.680.000,00	18.675.200.000,00	20.175.200.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	22.036.093.558,55	24.213.229.842,04	22.731.161.395,00	22.731.161.395,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya **]	0	0	1.500.000.000,00	0	
1.3.6	Penerimaan Dana Desa *)	70.773.447.720,00	89.682.366.000,00	87.206.969.000,00	87.206.969.000,00	
1.3.7	Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	1.370.581.000,00	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	955.827.388.955,62	1.033.346.522.536,04	1.170.839.364.639,10	1.170.839.364.639,10	

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 S.D TAHUN 2019

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	TAHUN BERJALAN 2018	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2,1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	338.031.426.990,00	335.529.110.599,00	355.028.378.923,39	370.543.395.673,39	
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	16.771.500.000,00	25.043.101.500,00	29.473.816.750,00	13.958.800.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	459.797.970,00	451.801.430,00	1.596.010.000,00	1.596.010.000,00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	137.841.620.066,88	153.473.190.366,88	158.121.052.323,71	158.121.052.323,71	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	56.500.000,00	213.336.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	493.160.845.026,88	514.710.539.895,88	544.719.257.997,10	544.719.257.997,10	
2,2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	33.602.662.483,56	40.996.276.937,00	53.107.004.139,00	53.107.004.139,00	

2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.892.912.186,00	199.177.038.790,42	211.974.767.113,00	213.474.767.113,00	
2.2.3	Belanja Modal	284.796.315.108,54	308.517.740.064,96	365.138.335.390,00	368.188.335.390,00	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	483.291.889.778,10	548.691.055.792,38	630.220.106.642,00	634.770.106.642,00	
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	976.452.734.804,98	1.063.401.595.688,26	1.174.939.364.639,10	1.179.489.364.639,10	

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2016 s.d Tahun 2019**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	77.303.954.364,54	46.974.898.434,34	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		19.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.303.954.364,54	46.993.898.434,34	10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.550.000.000,00	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Perabahan Pinjaman Daerah				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.550.000.000,00	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	69.753.954.364,54	40.943.898.434,34	4.100.000.000,00	8.650.000.000,00

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Secara nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengacu kepada RPJMN dimana RKP Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2019 adalah *"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkuali"*. Maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Rancangan RKP Nasional Tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 - 4,5 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 perse;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen; dan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar** Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. **mempercepat pengurangan kemiskinan**
 - 1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
 - b. **meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat**
 - 1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) mencegah dan pengendalian penyakit
 - 4) mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) meningkatkan "gerakan masyarakat hidup sehat".
 - c. **meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**
 - 1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
 - d. **Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak**
 - 1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak; dan;
 - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
 - e. **meningkatkan tata kelola layanan dasar**
 - 1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.
2. **Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman** Dalam rangka

mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan konektivitas
 - 1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika
 - 1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
 - 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
 - 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
- e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
 - 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;

- g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
 - h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
 - i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
 - c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
 - d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
 - e. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.
- Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:
- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 - c. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 - d. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
 - e. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi energi primer;
- b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. meningkatkan aksesibilitas air;
- d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional keempat, antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi
Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
- c. Pemantapan ketahanan sumber daya air

- 1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan
 - 2) suplai air minum.
 - d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - e. Perencanaan pembangunan rendah karbon
Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
 - 2) menyelesaikan konflik sosial;
 - 3) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 - 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
 - 5) meningkatkan penanganan terorisme.
 - b. menjamin kesuksesan pemilu
 - 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
 - 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
 - 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
 - 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
 - c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - 1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
 - 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara;
dan
 - 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
 - d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
 - 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
 - 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
 - 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.

- e. memperkuat efektivitas diplomasi
 - 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
 - 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
 - 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
 - 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
- 2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
- 4) Stabilitas ekonomi daerah;
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
- 6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
- 7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 8) Pengelolaan industri pariwisata;
- 9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
- 10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 maka hal ini merupakan dasar bagi arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun prioritas program dan kegiatan PD jangka menengah daerah. Adapun tema RKP Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas adalah ***"Lanjutkan dan Mantapkan pembangunan di berbagai sektor dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Gunung Mas"***.

Program strategis untuk tahun 2019 ada 10 agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;

2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penuaan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2. Landasan Kebijakan RPJMD 2014-2019 Dan Substansi Penyusunan RKPD 2019

Langkah 1. Membaca dan mengelompokkan Isu/Masalah Strategis yang terdapat dalam RPJMD tahun ke 2019.

- **Kelompok 1: Program terkait dengan perbaikan kualitas pemerintahan.** Isu-isu pada kelompok ini terkait dengan membenahan internal kabupaten Gunung Mas . Pembenahan ini dilakukan di semua lini pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
- **Kelompok 2: Program terkait dengan penyediaan pelayanan umum dasar bagi masyarakat.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan pelaksanaan fungsi/peran pemerintah sebagai public servant (pelayan publik). Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan.
- **Kelompok 3: Program terkait dengan perbaikan kondisi fisik keruangan kabupaten.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan sediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dll)
- **Kelompok 4 : Program terkait dengan perbaikan aspek sosial.** Isu yang termasuk dalam kelompok ini terkait dengan modal sosial yang terancam oleh faktor eksternal, juga adanya kegagalan internal.

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kelompok 1 : Pemerintahan

1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (*Governance*) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan).
2. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
3. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk Warga

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan public.
3. Masalah penanganan Stunting.

Kelompok 3 : Infrastruktur Dasar Dan Tata Ruang

1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
2. Belum selesainya penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Pusat. (PERDA No. 8 Tahun 2003);
3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam.

Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi

1. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
2. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
3. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara garis besar, pengelompokan masalah strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

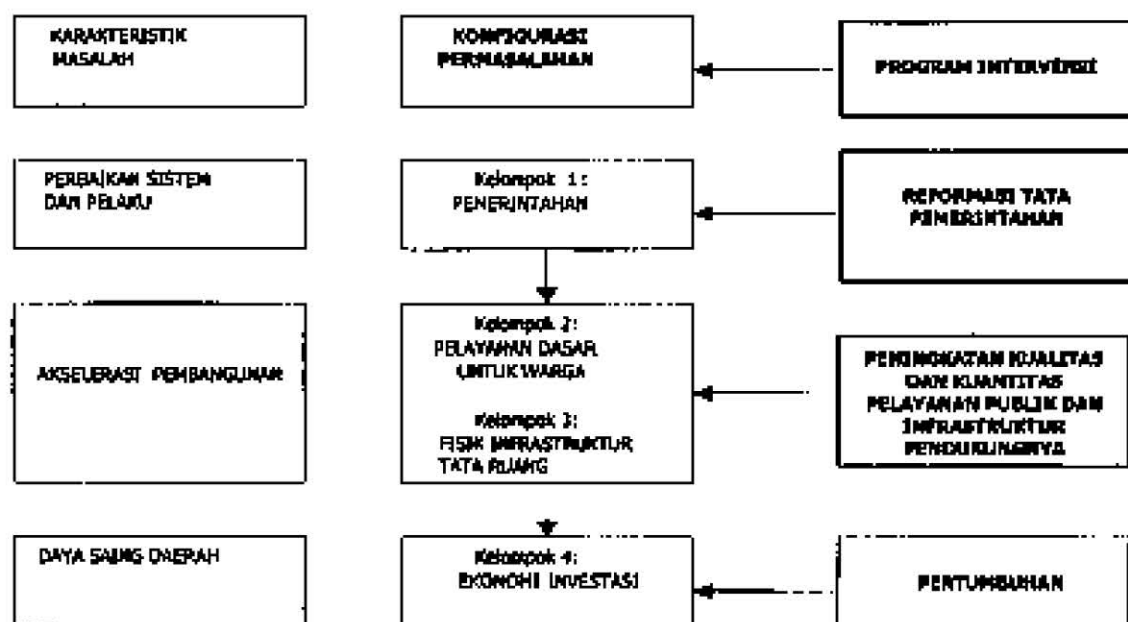
Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis



Langkah 2. Membuat Kerangka Relasi Antara Konfigurasi Permasalahan Dengan Program Intervensi

Kerangka program diinterpretasikan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik akan berdampak pada kemampuannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dasar maupun penunjang, yang akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat berupa ketahanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gunung Mas .

Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2019



Tiga Jenis Percepatan Pembangunan dalam RKPD 2019 hubungannya dengan Misi RPJMD 2014-2019 :

- **Perbaikan Tata Pemerintahan yang mencakup:**
 - Misi 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. (sistem dan pelaku).
- **Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan infrastruktur pendukungnya:**
 - Misi 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.
 - Misi 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.

- Misi 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.
- Misi 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.
- **Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial**
 - Misi 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.
 - Misi 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.

Langkah 3. Menentukan Prioritas Pelaksanaan Misi

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, intervensi pembangunan dalam RKPD 2019 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok intervensi yaitu :

1. Kelompok Intervensi Perbaikan sistem dan pelaku (pemerintah);
2. Kelompok Intervensi Akselerasi pembangunan;
3. Kelompok Intervensi Faktor daya saing daerah.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2019 ada 10 agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penuaan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan

9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Misi Pertama : Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan	1.Meningkatnya penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau. 2.Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat	Misi kedua : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat	1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. 2.Meningkatnya pendapatan masyarakat
3	Penaataan peningkatan investasi dan iklim	Misi keenam : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah	1.Meningkatnya investasi. 2.Meningkatnya Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani. 3.Meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2 dan S-
4	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan	Misi kedua : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat	1.Meningkatnya daya saing daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM. 2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan UMKM. 3.Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan. 4.Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. 5.meningkatnya pendapatan masyarakat. 6.meningkatnya sektor industri. 7.meningkatnya sector perdagangan
5	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang	Misi ketiga :Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional	1.Meningkatnya kapasitas dan infrastruktur 2.Meningkatnya konektivitas

6	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Misi Pertama : Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan	1.Meningkatnya penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau. 2.Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
7	Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Misi keenam : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah	1.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. 2.Meningkatnya prestasi olah raga
8	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi	Misi keempat : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan	1.Meningkatnya pelaksanaan RB. 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja. 3.Opini BPK terhadap laporan keuangan. 4.Meningkatnya kapabilitas APJP. 5.Meningkatnya maturitas SPIP. 6.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
9	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah	Misi keempat : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan	1.Meningkatnya pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu. 2.Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin. 3.Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah
10	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Misi kelima : Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat	1.Menurunnya pencemaran lingkungan. 2.Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) **Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

e) **Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) **Bidang Sosial**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.**

- a) **Tenaga Kerja**

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
 - 2) akreditasi lembaga pelatihan;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
 - 4) pengembangan infrastruktur yang kompeten;
 - 5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
 - 6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
 - 7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
 - 9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
 - 10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
 - 11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK)
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - 2) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - 3) meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - 4) peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
 - 5) meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - 6) peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
 - 7) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- c) Pangan
- 1) pertanian;
 - 2) penataan ruang;
 - 3) kehutanan;

- 4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B
- d) **Pertanahan**
- 1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
 - 3) menyusun GTRA Daerah;
 - 4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
 - 5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
 - 6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
 - 7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
 - 8) menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) **Lingkungan Hidup**
- 1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
 - 2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
 - 3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
 - 4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
 - 5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
 - 6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
 - 7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;

- 8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
- 9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
- 10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- 12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- 14) potensi daerah;
- 15) daya dukung dan daya tampung daerah;
- 16) kemampuan daerah;
- 17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- 18) pencegahan kerusekan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek
 - a) pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - b) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
 - c) pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
- 19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek
 - a) restorasi kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;

dan

c) rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek

a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b) penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan

c) pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kempaan

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:

a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;

b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan

c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;

2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;

- 4) pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
- 5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- 6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- 7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- 8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- 9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2019

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 tahun 2007 dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - e. Program Pendidikan Non Formal;
 - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
2. Kesehatan, meliputi :
 - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - g. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
 - m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
 - n. Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
 - q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - h. Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;
 - j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
 - l. Program Pembangunan Prasarana Sanitasi;
 - m. Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - n. Program Perencanaan Tata Ruang;
 - o. Program Pemanfaatan Ruang;
 - p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
- a. Program Pengembangan Perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
 - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
 - d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. Program pendidikan politik masyarakat;
 - f. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik;
 - g. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi;
 - h. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
6. Sosial, meliputi :
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah;
 - d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
 - a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - b. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
 - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
 - f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - g. Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi;
 - h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
 - a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
 - c. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

- d. Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak;
 - e. Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
 - b. Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan;
 - c. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
- a. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Program peningkatan pengendalian polusi;
 - e. Program pengendalian kebakaran hutan;
 - f. Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
 - g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana;
 - h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pendataan Penduduk.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
 - b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
 - c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
 - f. Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program pelayanan kontrasepsi;
 - c. Program Keluarga Sejahtera;
 - d. Program Pengendalian Penduduk;
 - e. Program Penyuluhan dan Pergerakan KB.
9. Perhubungan, meliputi :
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
 - c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
 - d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - b. Program pengembangan data/informasi;
 - c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Program kerjasama informasi dengan mas media;
 - e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - f. Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi;
 - g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
 - d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
12. Penanaman Modal, meliputi :
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi;

- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
 - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 14. Statistik, meliputi :
 - a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 15. Persandian, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah.
- 16. Kebudayaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 17. Perpustakaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
 - b. Program Pelayanan Perpustakaan;
 - c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 18. Kearsipan, meliputi :
 - a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
 - b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Arsip;
 - d. Program Pelayanan Kearsipan.

III. URUSAN PILIHAN

- 1. Kehutanan, meliputi :
 - a. Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA;
 - b. Program Penataan Kawasan TAHURA;
 - c. Program Pengembangan Ekowisata TAHURA;
 - d. Program Pembangunan Sarana Prasarana TAHURA;
 - e. Program Perlindungan dan Pengawasan.
- 2. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Program pengembangan budidaya perikanan;
 - b. Program pengembangan perikanan tangkap;
 - c. Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
 - e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
3. Pariwisata, meliputi :
- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - b. Program pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. Program Sarana Promosi Parawisata;
 - d. Program Analisis Pasar Pariwisata;
 - e. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
4. Pertanian, meliputi :
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
 - c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
 - d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
 - f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
 - g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - i. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
 - j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
5. Perdagangan, meliputi :
- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Perindustrian, meliputi :
- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
7. Transmigrasi, meliputi :
- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan, meliputi :
 - a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
 - b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;

- d. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Program Kerjasama Pembangunan;
 - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
 - j. Program Pembinaan Nilai Nilai Sejarah Lokal;
 - k. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - l. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
 - m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - o. Program Pembinaan Nilai Nilai Budaya;
 - p. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
 - r. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan;
 - s. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - t. Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan;
 - u. Program peningkatan sarana perekonomian;
 - v. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
 - w. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
 - x. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - y. Program peningkatan pelayanan staf ahli.
2. Pengawasan, meliputi :
 - a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
 3. Perencanaan, meliputi :
 - a. Program pengembangan data/informasi;
 - b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - c. Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar;

- d. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
 - g. Program Pengendalian Infrastruktur;
 - h. Program penelitian dan pengembangan IPTEK;
 - i. Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya.
4. Keuangan, meliputi :
- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Kepegawaian, meliputi :
- a. Program peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
 - b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Target capaian pembangunan Tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2019
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
Pertumbuhan PDRB (%)	7,25
Laju Inflasi (%)	4,5
Kenalkan PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (%)	33,67
Angka Kemiskinan (%)	5,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00%
Indeks Pembangunan Manusia (%)	75,25
Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Angka melek huruf (%)	99
Angka Partisipasi Kasar	
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	70
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	90
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	-
Angka Pendidikan yang ditamatkan	
Angka Partisipasi Murni	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,75
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	90
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	-
Fokus Layanan Urusan Wajib	
Pendidikan	
Pendidikan dasar	
SD/MI	
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	7,10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:22
SMP/MTs	
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	7,67
Angka Partisipasi Sekolah (%)	99
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:27
Pendidikan Menengah	
Rasio siswa terhadap guru	-
Angka Partisipasi Sekolah (%)	-
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-
Fasilitas Pendidikan	
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	75,00
Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	70,00
Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	-
Angka Putus Sekolah	
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,01
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	-

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	75,00
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,00
Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-
Angka Kelulusan	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-
Kesehatan	
Persentase Balita Gizi Buruk	5
Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	102
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10
Rasio Posyandu per satuan balita	150:satuan balita tahun 2019
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	154084:92
Rasio Dokter per satuan penduduk	94: penduduk Tahun 2019
Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk	530 : penduduk Tahun 2019
Cakupan Puskesmas	1,45
Cakupan Puskesmas Pembantu	0,74
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	97
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96
Cakupan Ibu Nifas	97
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	86
Cakupan Kunjungan Bayi	96
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	127
Cakupan pelayanan anak balita	97
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa	95

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
SD dan setingkat	
Cakupan peserta KB aktif	67
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2/100
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100
C. Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	100
D. Penderita DBD yang ditangani	100
E. Penemuan Penderita Diare	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	55
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
Cakupan Desa Siaga Aktif	100
Penataan Ruang	
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	272.778,69
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	43,50
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	155,00
Pekerjaan Umum	
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,708%
Rasio Jaringan Irigasi	65%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	10,50%
Rasio Rumah Layak Huni	28,613%
Pemukiman Layak Huni (Ha)	970
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935
Perumahan	
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	15.190
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	60%
Rumah Layak Huni (Unit)	19.200
Penataan Ruang	
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	25,66%
Perencanaan Pembangunan	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra PD dengan RPJMD	100,00%
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD	100,00%
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) dan turunannya	100,00%
Perhubungan	
Jumlah Bandara (buah)	-
Jumlah Dermaga Sungai (buah)	-
Jumlah penumpang / barang melalui bandara	
- jumlah penumpang (orang)	360
- jumlah barang (kg)	360
Lingkungan Hidup	
Jumlah duta lingkungan (orang)	26 orang
Jumlah Sekolah Adiwiyata (sekolah)	17 Sekolah
Pencemaran status mutu air (%)	100%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100%
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100%
Kependudukan dan Catatan Sipil	
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	70
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia
Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	80
Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	60
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	75
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	12,16
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	17,796
Rasio KDRT	3%
Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	6%
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	2,4
Rasio Akseptor KB	1500
Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	26.939
Keluarga Pra Sejahtera I	18

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Sosial	
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	0
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6,02%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	86%
Ketenagakerjaan	
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,9%
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,00%
Ketunagakerjaan	
Jumlah lulusan S1/S2/S3	1,363
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,5%
Koperasi dan UMKM	
Presentase Koperasi Aktif	82,53
Jumlah UMKM	2.987
Jumlah Industri	234
Jumlah Pasar Desa/Kec.	12
Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,26
Presentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	2,63
Penanaman Modal	
Jumlah Investor PMDN	125
Jumlah Investor PMA	20
Presentase Jumlah Perijinan dan non Perijinan	100
lamanya Hari Proses Perijinan	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	85
Presentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	100
Kebudayaan	
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	1
Jumlah Kunjungan Wisatawan	5000
Jumlah Objek Wisata Daerah	1
Kebudayaan	
Jumlah Grup/Sanggar Kesenian (Buah)	1
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pemuda dan Olahraga	
Jumlah Klub Olahraga (buah)	1
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1
Kepemudaan dan Olahraga	
Jumlah Organisasi Pemuda	1
Jumlah Organisasi Olahraga	1
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1
Jumlah Lapangan Olahraga	1
Pariwisata	
Kunjungan Wisata	5000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	100%
Kegiatan Pembinaan politik daerah	100%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	83
Jumlah LINMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	610
Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	154
Penegakan PERDA	20
Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Secara Online (%)	80
Ketahanan Pangan	
Regulasi ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	1
Ketersediaan pangan utama	8,2
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	127 desa/kel
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	96 desa/kel
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	447 orang
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TIG	3 desa/kel
Kearsipan	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pengelolaan arsip secara baku	
a. Umum	125
b. Pemerintahan	120
c. Politik	80
d. Keamanan dan ketertiban	90
e. Kesejahteraan rakyat	90
f. Perekonomian	90
g. Pekerjaan umum	100
h. Pengawasan	90
i. Kepegawaian	100
j. Keuangan	140
Statistik	
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	Ada
Komunikasi dan Informatika	
Website milik pemerintah daerah (buah)	34
Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	72
Jumlah Radio/TV lokal	1
Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0,020
Jumlah Kantor Pos (Unit)	6
Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	8
Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	8
Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	7
Jumlah Pusat Layanan internet Kecamatan	14
Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	3
Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624
Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	2
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	4
Jumlah Badan Publik PPID	15
Pameran/expo	3
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	80,10
Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	0
Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	15
Perpustakaan	
Jumlah perpustakaan	10
a. Jumlah Perpustakaan umum	44
b. Jumlah perpustakaan sekolah	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
- SD/MI	174
- SMP/MTs	64
- SMA/MA	21
c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	65
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0
e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0
Jumlah anggota	1550
Jumlah pengunjung	3750
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	54320
Fokus Layanan Urusan Pilihan	
Pertanian dan Peternakan	
Pertanian	
Luas Tanam Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ha)	1.150
Padi ladang (Ha)	3.994
Jagung (Ha)	28
Luas Panen Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ha)	1.100
Padi ladang (Ha)	3.918
Jagung (Ha)	27
Produktivitas Tanaman Pangan	
Padi sawah (Kwintal/Ha)	46,84
Padi ladang (Kwintal/Ha)	25,5
Jagung (Ton/Ha)	26,56
Produksi Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ton)	5.152
Padi ladang (Ton)	12.676
Jagung (Ton)	70
Populasi Ternak	
Kerbau (ekor)	180
Babi (ekor)	28.430
Ayam buras (ekor)	72.640
Ayam ras pedaging (ekor)	74.250
Sapi (ekor)	4.560
Produksi Ternak	
Kerbau (Ton)	2,8
Sapi (Ton)	93
Babi (Ton)	200
Ayam buras (Ton)	72
Ayam ras pedaging (Ton)	398,8
Produksi Telur	
Ayam buras (Ton)	29,5

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pengembangan/ perluasan area perkebunan	
Karet (Ha)	515
Kelapa Sawit (Ha)	1.006
Produksi Komoditi Perkebunan	
Karet (Ton)	48.595
Kelapa Sawit (Tbs) Ton	6.440
Transmigrasi	
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	97,5
Kehutanan	
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	15.400
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	40.065.650.000
Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	75 Km
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	2.000
Pembangunan KPHP (unit)	0
Pembangunan TAHURA	0
Pembangunan Hutan Desa dan HKm (Unit)	0
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	1
Energi dan Sumber Daya Mineral	
Luas wilayah yang ditingkatkan (Ha)	422,948 Ha
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD	12.998.184.000 dan 1.551.000.000
Rasio ketersediaan daya listrik	4,974 MW
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	87,34%
Jumlah Desa berlistrik	109 Desa
Kelautan dan Perikanan	
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	4.668
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	229.50
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	40
Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	330
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	28,94
Perdagangan	
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	13,26%

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Perindustrian	
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,63%
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	43,71%
Pertumbuhan Industri	50
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	468
Kebencanaan	
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	10
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana./jam)	2
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2019

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)													
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar													
1.01	Bidang Pendidikan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi skpd						3.912.173.054,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa surat menyurat										16.500.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										281.618.112,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										34.534.120,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										57.700.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan alat tulis kantor										242.143.200,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										15.850.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										112.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan penituran perundang-undangan										28.800.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan bahan logistik kantor										28.800.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										480.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										927.327.622,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										625.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kudu *)										124.240.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Tewah *)										110.360.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Secang *)										77.040.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara *)										85.050.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Buncan *)										103.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing *)										92.740.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Mhina Raya *)										67.690.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Damara Batu *)										89.640.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Miri Matasa *)										77.590.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Buncan Hulu *)										73.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing Raya *)										77.690.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Buncan Barat *)										81.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						60.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										30.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK *)									2.247.784.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan pagar sekolah *)									227.460.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus *)									11.750.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Monitoring dan Evaluasi BOS *)									61.500.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Peningkatan kegiatan DAK SD *)									245.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Peningkatan kegiatan DAK SMP *)									178.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP) *)									1.188.800.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Bimbingan Belajar Bahasa Inggris dan Matematika *)									7.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah *)									100.300.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK *)									450.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama (DAK) *)									150.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Jumlah pelatihan					137.840.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal									137.040.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi PTK					8.588.318.944,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyelenggaraan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan									20.060.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah *)									59.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang Sekolah Dasar / 1 Kelompok KKG/Gurukah *)									85.110.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *)									8.414.145.944,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Tertelaksananya pelatihan bagi peningkatan mutu pendidik & pendidikan					187.600.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyusunan dan Penilaian PAK *)									129.480.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak mampu *)									21.550.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *)									35.990.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								6.424.000.000,00				
	Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *)									6.424.000.000,00				
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								12.251.200.000,00				
	Peningkatan kegiatan BOS SD Negeri *)									12.251.200.000,00				
1-02	Bidang Kesehatan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					6.480.493.540,00		Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa surat menyurat									52.260.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									543.200.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa kebersihan kantor									95.637.290,00		Dinas Kesehatan		
	Pemediaan alat tulis kantor									110.304.250,00		Dinas Kesehatan		
	Pemediaan barang cetakan dan penggandaan									96.575.000,00		Dinas Kesehatan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Relaksanaan Fungsi Manajemen (DAK)									870.490.000,00		Dinas Kesehatan		
	Nusantara Sehat (DAK)									660.090.000,00		Dinas Kesehatan		
	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK)									477.784.800,00		Dinas Kesehatan		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat									166.210.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya									177.690.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Orientasi Konseling Masyarakat dan MP-ASI *)									18.710.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat									281.207.600,00		Dinas Kesehatan		
	Pengendalian kualitas dan pencemaran air *)									79.690.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelatihan Penimah Makanan Bagi Pemilik Tempat Pengolahan Makanan *)									30.767.600,00		Dinas Kesehatan		
	Orientasi Pengelolaan Air Minum Laku Sehat *)									61.030.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penyuluhan/arsitektur Studi Realita Kesehatan Lingkungan *)									138.850.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular									289.318.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penyempurnaan fosforin sarana nyamuk									64.825.000,00		Dinas Kesehatan		
	Sosialisasi Peningkatan KE Pencegahan Penyakit Tidak Menular *)									10.690.000,00		Dinas Kesehatan		
	Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV/AIDS *)									68.380.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *)									28.790.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik *)									37.730.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit *)									16.380.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Penguatan E-Sisnal dan SKDR *)									13.088.500,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Penguatan Tataaksana Penyakit Menular *)									12.788.500,00		Dinas Kesehatan		
	Tataaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Melalui Imunisasi *)									68.076.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan									380.124.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan									172.790.000,00		Dinas Kesehatan		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									65.690.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penyusunan Profil Kesehatan *)									32.053.500,00		Dinas Kesehatan		
	Penyusunan Profil Ketenagaan *)									16.625.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan DAK *)									17.437.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan *)									67.890.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Penyusunan KOMDAT dan SPM Tingkat Kabupaten Gunung Mas *)									13.088.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin									308.080.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan operasi katarak									224.080.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan sunatan massal									84.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan									9.274.139.810,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan puskesmas									112.750.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan puskesmas pembantu									242.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu									807.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan puskesmas keliling (DAK) *)									695.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) *)									600.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) *)									3.142.690.101,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan Puskesmas Pembantu *)									-		Dinas Kesehatan		
	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan *)									167.218.900,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan puskesmas (DAK)									3.817.479.939,00		Dinas Kesehatan		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-b									29.678.812.773,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan rumah sakit									19.864.924.990,00		Dinas Kesehatan		
	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK)									892.704.343,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan ambulans/mobil amarah (DAK)									4.508.961.940,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *)									4.432.022.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit *)									-		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan									5.651.848.850,00		Dinas Kesehatan		
	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu									2.790.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan *)									296.500.000,00		Dinas Kesehatan		
	Deklarasi GDF *)									71.695.000,00		Dinas Kesehatan		
	Jaminan Peserta JAMPERSAL (DAK) *)									2.496.903.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Mitra Peduli Kesehatan Jiwa *)									12.430.000,00		Dinas Kesehatan		
	Peningkatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga *)									16.420.850,00		Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita									32.030.500,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Orientasi Skining Hipotaloid Konpenita *)									19.847.000,00		Dinas Kesehatan		

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita *)									12.183.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								24.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan									24.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								129.264.850,00		Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Fasilitas Program Kesehatan Ibu dan Anak *)									35.129.300,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator dan Pengelola Layanan KIA *)									16.470.350,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *)									16.167.300,00		Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Buku Perujuk Pelayanan KIA *)									52.500.000,00		Dinas Kesehatan		
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan							terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien rujukan	1.927.290.300,00		Dinas Kesehatan		
	Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Akreditasi *)									1.124.800.000,00		Dinas Kesehatan		
	Survei Akreditasi Puskesmas *)									336.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Workshop Akreditasi Puskesmas *)									289.200.000,00		Dinas Kesehatan		
	Kali Banding Akreditasi *)									177.290.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								197.090.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok *)									13.930.000,00		Dinas Kesehatan		
	Sosialisasi Informasi tentang Peraturan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok *)									58.080.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Tim Deteksi Dini pada berbagai jenis Pelayanan Kesehatan *)									11.280.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemantauan terhadap Deteksi Dini Penyakit Akut Asap Rokok *)									43.400.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan Alat Deteksi Dini Penyakit Akut Asap Rokok *)													
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								97.767.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi *)									34.600.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Mellitus *)									11.483.500,00		Dinas Kesehatan		
	Peranganan dan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa *)									40.800.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelatihan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa *)									11.483.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								264.290.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									264.290.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								140.885.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									140.885.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								196.306.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									196.306.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								346.791.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									346.791.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								148.923.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									148.923.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								174.199.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									174.199.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								208.578.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									208.578.000,00		Dinas Kesehatan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Kelembaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								137.016.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									137.016.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								125.530.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									125.530.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								11.131.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									11.131.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								228.976.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									228.976.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								193.106.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									193.106.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								119.965.500,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									119.965.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								23.537.500,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									23.537.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								139.906.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									139.906.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								42.760.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									42.760.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						9.751.255.904,00		RSUD	
	Penyediaan jasa surat menyurat									4.300.000,00		RSUD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									619.560.000,00		RSUD		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									200.000,00		RSUD		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									10.400.000,00		RSUD		
	Penyediaan alat tulis kantor									82.159.900,00		RSUD		
	Penyediaan barang cetakan dan pencandaan									218.780.000,00		RSUD		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									26.497.816,00		RSUD		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									24.000.000,00		RSUD		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									3.360.000,00		RSUD		
	Penyediaan bahan logistik kantor									418.160.000,00		RSUD		
	Penyediaan makanan dan minuman									368.800.000,00		RSUD		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									352.000.000,00		RSUD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									7.876.518.400,00		RSUD		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									50.000.000,00		RSUD		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						1.191.029.792,00		RSUD	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									212.885.000,00		RSUD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									215.459.174,00		RSUD		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									85.075.618,00		RSUD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Peringkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									62.822.000,00	RSUD			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									11.588.000,00	RSUD			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									148.466.000,00	RSUD			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									454.786.000,00	RSUD			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					39.046.365,00	RSUD			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									39.046.365,00	RSUD			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi					473.406.000,00	RSUD			
	Pendidikan dan pelatihan formal									163.406.000,00	RSUD			
	Masing Masing Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal*)									320.000.000,00	RSUD			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses					68.412.000,00	RSUD			
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									48.975.000,00	RSUD			
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)									4.125.000,00	RSUD			
	Pemutakhiran data aset, kepekerjaan dan keuangan*)									3.550.000,00	RSUD			
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.762.000,00	RSUD			
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan obat dan perbekalan kesehatan					136.270.306,00	RSUD			
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan									136.270.306,00	RSUD			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat					200.000.000,00	RSUD			
	Peningkatan kesehatan masyarakat									200.000.000,00	RSUD			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat					84.100.000,00	RSUD			
	Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan									84.100.000,00	RSUD			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Persentase pengembangan lingkungan sehat					15.324.000,00	RSUD			
	Pencapaian pengembangan lingkungan sehat									15.324.000,00	RSUD			
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			tersedia dokumen standar pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan pada					261.665.000,00	RSUD			
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan									201.665.000,00	RSUD			
	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan*)									60.000.000,00	RSUD			
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			tersedianya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-ba					5.380.919.999,00	RSUD			
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)									156.923.034,00	RSUD			
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *)									3.613.000.000,00	RSUD			
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAU)									1.616.096.965,00	RSUD			
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan rumah sakit; pemelihara					221.246.050,00	RSUD			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit									221.246.050,00	RSUD			
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								109.220.000,00	RSUD			
	Penyusunan Dokumen Akreditasi *)									109.220.000,00	RSUD			
	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								6.700.000.000,00	RSUD			
	Pelayanan dan pendukung pelayanan *)									6.700.000.000,00	RSUD			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat					40.400.000,00	RSUD			
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah Sehat (USS)*)									40.400.000,00	RSUD			
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.379.895.420,00	DPU			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Majo	Keterangan	
					Hasil Program		Kebaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Penyediaan jasa surat menyurat										8.434.000,00		DPU	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										399.400.000,00		DPU	
	Penyediaan alat tulis kantor										290.800.000,00		DPU	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										128.200.000,00		DPU	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										8.636.000,00		DPU	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										10.080.000,00		DPU	
	Penyediaan bahan logistik kantor										81.600.000,00		DPU	
	Penyediaan makanan dan minuman										18.360.000,00		DPU	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										528.000.000,00		DPU	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Berbantuan										1.929.848.280,00		DPU	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										150.000.000,00		DPU	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor *)										8.642.140,00		DPU	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	20.204.000.000,00		DPU	
	Penyediaan peralatan gedung kantor										41.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										15.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										261.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										60.000.000,00		DPU	
	Perluasan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas (Kontrak Tahun Jamak Tahun 2016-2018 dengan total pagu Rp 9.000.000.000,00 *)										3.500.000.000,00		DPU	
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya *)										50.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Balai Kaharingan Kabupaten Gunung Mas Tahap II *)										2.800.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Gereja SKE Inok Turuwana Mri Tahap II *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Gedung Christian Centre Tahap II *)										1.977.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Pagar Kompleks Perumahan Dinas *)										600.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Rumah Dinas *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas *)										3.000.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas *)										2.700.000.000,00		DPU	
	Rehabilitasi Guest House Gunung Mas *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas *)										2.000.000.000,00		DPU	
	Perataan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas *)										800.000.000,00		DPU	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	198.000.000,00		DPU	
	Simbangan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										198.000.000,00		DPU	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	187.100.000,00		DPU	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										15.200.000,00		DPU	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun										12.800.000,00		DPU	
	Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah SKPD *)										38.400.000,00		DPU	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKAR/RKA Perubahan, DPA/DPPA, SPN dan TERPA *)										133.700.000,00		DPU	
	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								Persentase jumlah jalan & jembatan yg fungsional	29.495.337.462,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Tumbang Jutuh-Parempel-Harang Karamat (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp 80.000.000.000,00 *)										29.495.337.462,00		DPU	

NO	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keberangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangai Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Peningkatan jalan Tehah-Tumbang Miri (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp 80.000.000.000,-) *									26.522.817.300,00		DPU		
	Peningkatan jalan Tumbang Mwan-Sepang Simin (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp 80.000.000.000,-) *									28.204.926.000,00		DPU		
	Penyenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Bina Marga *									50.000.000,00		DPU		
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Jalan (DAK) *									139.500.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Simpang Dandang Tumbang Miri - Tumbang Sian (DAK) *									20.980.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Sepang Simin - km 20 (DAK) *									10.000.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Tikik Raut (DAK) *									10.000.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Brigjend Kotamso (DAK) *									5.000.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (DAK) *									5.000.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu Tanokoi (DAK) *									10.000.000.000,00		DPU		
	Program pembangunan jalan dan jembatan									68.822.400.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Pembangunan Jembatan Sei Hamputung Tahap II *									7.626.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Marjanan di Desa Tumbang Marjanan Tahap II *									1.750.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Tumbang Samui - Tukeu (DAK) *									16.276.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Tumbang Malahoi - Tumbang Kuyay (DAK) *									8.150.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Harang Kramat - Bereng Jun (DAK) *									16.276.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Menuju Oprit Jembatan Sei Kahayan di Kecamatan Sepang **)									2.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Simpang Jalan Kuala Kurun Linau - Tumbang Jubah - Luwak Kantor - Tumbang Basel (DAK) *									6.747.400.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Tumbang Siat - Tumbang Siruk **)									3.600.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Tumbang Siruk - Tumbang Napoi **)									3.500.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Tumbang Empas-Sepang Simin *)									5.600.000.000,00		DPU		
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									750.000.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Pembangunan Drainase di Kelurahan Jakaba Raya *)									250.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Drainase Jalan Perintis dan Jalan Nyai Balau dalam Kota Tehah (Lanjutan) *)									500.000.000,00		DPU		
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan									1.500.000.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Pemeliharaan rutin jalan (UPR) swakelola *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Pemeliharaan rutin jembatan (UPR) swakelola *)									500.000.000,00		DPU		
	Program peningkatan sarana dan prasarana kabinamargaan									18.000.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat									10.000.000,00		DPU		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa									19.602.600.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di Kabupaten Gunung Mas *)									423.000.000,00		DPU		
	Penyenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDA *)									50.000.000,00		DPU		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.1 Selata Tehah (DAK) *)									4.104.000.000,00		DPU		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.1 Gohong Rawai (DAK) *)									8.555.000.000,00		DPU		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.1 Selata Juni (DAK) *)									6.370.000.000,00		DPU		
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai									1.250.000.000,00		DPU		
		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												
	Normalisasi sungai Noharun *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Kelauk Lingkungan Embung Tumbang Rahuyan *)									250.000.000,00		DPU		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Meja	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan						8.010.000.000,00		DPU	
	Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tumbang Rahuyan *)									500.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Tamanggung Jayakerti (Kuala Kurun *)									300.000.000,00		DPU		
	Peningkatan jalan lingkungan jalan Brigjend Kalamas XII Kuala Kurun *)									300.000.000,00		DPU		
	Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tehang *)									200.000.000,00		DPU		
	Peningkatan jalan lingkungan dan Pembangunan Box Culvert di Desa Tanjung Riu (Lanudun) *)									500.000.000,00		DPU		
	Karya Bhakti Membangun Desa (Swakelola) *)									750.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan RTA Mono di Sepang Simit *)									500.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Sangaran (Kuala Kurun *)									1.600.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Produksi Desa Batu Nirusuh *)									500.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan dan Pembangunan Box Culvert di Kelurahan Tumbang Mariko *)									400.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pahlawan di Kelurahan Tumbang Miti *)									400.000.000,00		DPU		
	Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Maa Kecamatan Tewah *)									500.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hendrik Timang Kelurahan Jakatan Raya *)									320.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pandih Batu Kelurahan Tumbang Talakan *)									400.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lintang Kelurahan Kampuri *)									140.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Bogor Kelurahan Kurun *)									100.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Simpang Jalan Provinsi ke Desa Hujung Sumat *)									800.000.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Warga Dalam Kelurahan Tewah *)									500.000.000,00		DPU		
	Program Pembangunan Peverangan Jalan Umum *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Peningkatan Sarana dan Prasarana PJU						3.275.724.941,00		DPU	
	Perbaikan rekening PJU kota Kuala Kurun *)									450.000.000,00		DPU		
	Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Tiang PJU kota Kuala Kurun (Swakelola) *)									68.720.000,00		DPU		
	Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Tewah dan Kota Kuala Kurun (Swakelola) *)									43.004.941,00		DPU		
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kebersihan Perumahan dan PJU *)									24.000.000,00		DPU		
	Penggantian Tiang P.U dengan P.U Tenaga Surya *)									2.700.000.000,00		DPU		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perumahan *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan						1.759.900.000,00		DPU	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan perumahan (swakelola) *)									1.759.900.000,00		DPU		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Presentase Peningkatan pengelolaan sampah rumah lingkungan						2.182.350.000,00		DPU	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan *)									2.182.350.000,00		DPU		
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi			Terbangunnya Sarana dan Prasarana sanitasi permukiman						150.000.000,00		DPU	
	Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mee *)									80.000.000,00		DPU		
	Review Rencana Program Investasi Kecptkanyaan *)									40.000.000,00		DPU		

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Fagu Indikator	Prairaan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) *)									40.000.000,00		DPU		
	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)									2.551.852.432,00		DPU		
	Peningkatan kegiatan SLBM *)	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi								366.852.432,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tumbang Malaboi (DAK) *)									320.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Batu Nalau (DAK) *)									200.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Sarangan (DAK) *)									200.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tumbang Palanai (DAK) *)									200.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Kelurahan Tewah (DAK) *)									240.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Kuala Kurun (DAK) *)									320.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tewah Palanai (DAK) *)									200.000.000,00		DPU		
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Desa Tumbang Malaboi *)									240.000.000,00		DPU		
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kelurahan Tewah *)									165.000.000,00		DPU		
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kuala Kurun *)									100.000.000,00		DPU		
	Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum *)	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi								11.120.900.000,00		DPU		
	Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional Program PAMSIMAS II *)									88.900.000,00		DPU		
	Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah (DAK) *)									4.900.000.000,00		DPU		
	Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun (DAK) *)									4.619.500.000,00		DPU		
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Air Minum (DAK) *)									4.000.000,00		DPU		
	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahlan Tamuk (DAK) *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) *)									490.000.000,00		DPU		
	Program peningkatan/pembaugunan jaringan irigasi dan rawa *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								9.457.600.310,00		DPU		
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Jun (DAK) *)									1.365.800.000,00		DPU		
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Tewah (DAK) *)									4.070.000.000,00		DPU		
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Gohong Rawai (DAK) *)									1.940.000.000,00		DPU		
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Sumber Daya Air (DAK) *)									103.200.310,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Jun (DAK) *)									725.500.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Tewah (DAK) *)									822.600.000,00		DPU		
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Gohong Rawai (DAK) *)									822.500.000,00		DPU		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								295.000.000,00		DPU		
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang									70.000.000,00		DPU		
	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang									50.000.000,00		DPU		
	Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah R0TRK dan Peta Citra Kota Kuala Kurun *)									75.000.000,00		DPU		
	Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas *)									90.000.000,00		DPU		
	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								220.000.000,00		DPU		
	Penyusunan RPD Kawasan Strategis Perkotaan *)									220.000.000,00		DPU		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								154.280.000,00		DPU		
	Pengawasan pemanfaatan ruang									70.000.000,00		DPU		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prekursor Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Kebaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Tercapainya rencana aksi daerah penanganan gangguan keamanan serta kerjasama	127.437.300,00		Kesbangpol		
	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing *)									38.800.000,00		Kesbangpol		
	Penanganan Konflik di Daerah *)									38.100.000,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan *)									16.760.000,00		Kesbangpol		
	Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM) *)									73.877.100,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Kewaspadaan Diri Masyarakat di Daerah *)									88.900.200,00		Kesbangpol		
	Program penertibnagan karnantibmas dan pencegahan tindak	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Terbukanya Kominda	161.301.800,00		Kesbangpol		
	Komoditas Intelektual Daerah *)									41.880.000,00		Kesbangpol		
	Rencana Aksi Daerah *)									119.421.800,00		Kesbangpol		
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							terlaksananya kegiatan sarasehan dan sosialisasi peningkatan bela negara	133.482.000,00		Kesbangpol		
	Forum Pembeuran Kebangsaan (FPK) *)									84.377.000,00		Kesbangpol		
	Forum Bela Negara (FBN) *)									83.815.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental *)									25.500.000,00		Kesbangpol		
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							terlaksananya kegiatan sarasehan dan sosialisasi peningkatan bela negara	338.482.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa *)									83.710.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara *)									85.210.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda *)									83.530.000,00		Kesbangpol		
	Sarasehan Pembeuran Kebangsaan Untuk Memperkokoh Peratuan Bagi Tamas, Toga dan Tokoh Adat *)									83.295.000,00		Kesbangpol		
	Ikut Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalimantan *)									123.747.000,00		Kesbangpol		
	Program pendidikan politik masyarakat	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Terseleenggaranya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tlg Orm	302.851.500,00		Kesbangpol		
	Penyusunan data base partai politik									25.701.500,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Demokratisasi *)									63.028.000,00		Kesbangpol		
	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik *)									121.500.000,00		Kesbangpol		
	Pelatihan Teknis dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Cemas dan Parpol *)									81.128.000,00		Kesbangpol		
	Desk Pilkada Kabupaten Gunung Mas *)									81.800.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik *)	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah								119.999.900,00		Kesbangpol		
	Peningkatan kerjasama Pemerintah dalam rangka ketahanan Sosial Budaya *)									81.800.000,00		Kesbangpol		
	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan ketahanan ekonomi dan sosial budaya se Kabupaten Gunung Mas *)									16.898.900,00		Kesbangpol		
	Sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kekokohan umat Beragama *)									81.500.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Peningkatan kerjasama dalam rangka ketahanan sosbud, nonev, sarasehan & sos	81.800.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Sosial Budaya *)									81.800.000,00		Kesbangpol		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.078.381.766,00		SatpolPP		
	Penyediaan jasa surut menyurat									7.820.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									73.500.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									87.350.520,00		SatpolPP		
	Penyediaan alat tulis kantor									37.269.090,00		SatpolPP		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keturan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyediaan sarana catokan dan penggantian									20.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									11.778.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									68.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									14.200.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan bahan kosistik kantor									74.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan makanan dan minuman									5.335.000,00		SatpolPP		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									224.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									3.463.083.156,00		SatpolPP		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									60.000.000,00		SatpolPP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	167.142.536,00		SatpolPP		
	Peremajaan rutin/berkala gedung kantor									22.142.536,00		SatpolPP		
	Peremajaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									100.000.000,00		SatpolPP		
	Peremajaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									48.000.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengalasan pakaian dinas PNS	4.892.000,00		SatpolPP		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									4.892.000,00		SatpolPP		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi	108.000.000,00		SatpolPP		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									108.000.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Tertekannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	18.000.000,00		SatpolPP		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD									14.200.000,00		SatpolPP		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									4.800.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemertapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Meningkatnya kemampuan SD aparat satpol pp dalam operasi penegakan PERD	510.040.000,00		SatpolPP		
	Pengendalian kebiasaan dan gangguan dari kegiatan masyarakat									69.840.000,00		SatpolPP		
	Pendidikan anagata Linmas *)									69.000.000,00		SatpolPP		
	Pengadaan Pakaian Hanga, Peluang, Pengamanan TPS *)									400.200.000,00		SatpolPP		
	Program pemeliharaan kemitraan dan pencegahan tindak	Pemertapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Terpeliharanya dan terciptanya kemitraan & pencegahan tindak kriminal	410.500.000,00		SatpolPP		
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pengawasan *)									236.500.000,00		SatpolPP		
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pengawasan Perda dan Peraturan lainnya *)									175.000.000,00		SatpolPP		
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban	Pemertapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							Terkendalinya keamanan dan kenyamanan pd rumah jabatan	222.000.000,00		SatpolPP		
	Pemberbukan Satuan Keamanan Rumah Jabatan *)									222.000.000,00		SatpolPP		
100	Bidang Sosial													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.387.265.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa surat menyurat									3.177.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									97.500.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									13.285.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									39.700.000,00		Dinsos		
	Penyediaan alat tulis kantor									84.375.000,00		Dinsos		
	Penyediaan sarana catokan dan penggantian									10.000.000,00		Dinsos		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									13.000.000,00		Dinsos		

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									18.600.000,00		Dinsos		
	Penyediaan bahan logistik kantor									52.600.000,00		Dinsos		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									240.600.000,00		Dinsos		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									631.910.000,00		Dinsos		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									185.600.000,00		Dinsos		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					176.626.000,00		Dinsos		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									33.725.000,00		Dinsos		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									76.700.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.600.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									26.600.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									26.600.000,00		Dinsos		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					68.700.000,00		Dinsos		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									68.700.000,00		Dinsos		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi					69.600.000,00		Dinsos		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									69.600.000,00		Dinsos		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					43.600.000,00		Dinsos		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									7.800.000,00		Dinsos		
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									2.320.000,00		Dinsos		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									1.880.000,00		Dinsos		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)									8.000.000,00		Dinsos		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									12.100.000,00		Dinsos		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									10.600.000,00		Dinsos		
	Penataan dan Pelaporan Berang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)									1.000.000,00		Dinsos		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									2.250.000,00		Dinsos		
	Penyusunan Analisa Jabatan dan SOP dan Standart Operasional Prosedur (SOP) SKPD *)									2.250.000,00		Dinsos		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			adanya lokasi KAT adanya persiapan dalam pembangunan sarana dan prasarana					336.400.000,00		Dinsos		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin									175.100.000,00		Dinsos		
	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BIDT) *)									155.300.000,00		Dinsos		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			terlaksananya penanganan masalah strategis untuk kesejahteraan masyarakat					67.000.000,00		Dinsos		
	Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dalam Keluarga *)									67.000.000,00		Dinsos		
	Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial								123.000.000,00		Dinsos		
	Pengembangan dan Pemberdayaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah *)									123.000.000,00		Dinsos		
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			Terlaksananya pemberdayaan berupa pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat					258.050.000,00		Dinsos		
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma									66.000.000,00		Dinsos		
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma									190.050.000,00		Dinsos		
	Program Pemberdayaan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial								999.400.000,00		Dinsos		
	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperindaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial *)									42.300.000,00		Dinsos		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Kelasan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)									167.600.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)									601.200.000,00		Dinsos		
	KOMDA Lansia *)									68.000.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Karang Taruna *)									40.200.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi *)									80.000.000,00		Dinsos		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial						249.500.000,00		Dinsos		
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut langsung cepat darurat dan kejadian luar biasa									191.100.000,00		Dinsos		
	Peningkatan dan pelayanan program Keluarga Harapan (PKH *)									68.400.000,00		Dinsos		
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara)			Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial						26.000.000,00		Dinsos		
	Sosialisasi Pencegahan penanggulangan penyakit HIV AIDS *)									12.000.000,00		Dinsos		
	Sosialisasi penanggulangan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya *)									13.000.000,00		Dinsos		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2-01	Bidang Tenaga Kerja													
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat				terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausaha		268.850.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai									268.850.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat				adanya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan daerah		167.348.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Penyusunan dan Penetapan UMK Tahun 2019 *)									48.448.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Penyelesaian prosedur, penyelesaian permasalahan hubungan industrial *)									43.236.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *)									74.670.000,00		Distransakerkop & UMK		
	Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi *)			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat						37.813.300,00		Distransakerkop & UMK		
	Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja *)									37.813.300,00		Distransakerkop & UMK		
2-02	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		99.623.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan jasa surat menyurat									5.100.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									117.600.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan jasa kebersihan kantor									6.750.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan jasa perbaikan peralatan kerja									11.673.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan alat tulis kantor									88.119.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan barang ceptakan dan pengandaian									23.650.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									6.330.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan bahan bekas dan peraturan perundang-undangan									3.600.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan bahan logistik kantor									26.400.000,00		Dinas P3A		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									192.000.000,00		Dinas P3A		
	Pemediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									454.500.000,00		Dinas P3A		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Parangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)																(4)
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)											120.000.000,00		Dinas P3A			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Jumlah sarana prasana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						325.325.000,00		Dinas P3A			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor											121.725.000,00		Dinas P3A			
	Pengadaan peralatan gedung kantor											97.400.000,00		Dinas P3A			
	Pengadaan mebel											77.500.000,00		Dinas P3A			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan											19.700.000,00		Dinas P3A			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakelan dinas PNS						29.460.000,00		Dinas P3A			
	Pengadaan pakelan dinas beserta perengkapannya											29.460.000,00		Dinas P3A			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						48.000.000,00		Dinas P3A			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan											48.000.000,00		Dinas P3A			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						21.340.000,00		Dinas P3A			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											8.580.000,00		Dinas P3A			
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)											12.760.000,00		Dinas P3A			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial										334.075.000,00		Dinas P3A			
	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) *)											91.500.000,00		Dinas P3A			
	Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bagi Focal Point SKPD *)											81.300.000,00		Dinas P3A			
	Pelatihan bagi Pekerja perempuan *)											47.050.000,00		Dinas P3A			
	Sosialisasi bagi perempuan dalam Jabatan Publik *)											47.350.000,00		Dinas P3A			
	Pusat Pembelajaran Keluarga *)											36.875.000,00		Dinas P3A			
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial										127.000.000,00		Dinas P3A			
	Pembinaan dan Pengembangan P2TP2A *)											63.000.000,00		Dinas P3A			
	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) *)											64.000.000,00		Dinas P3A			
	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak *)	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial										224.000.000,00		Dinas P3A			
	Penyuluhan Pola Asuh Anak Berdasarkan Hak Anak *)											137.340.000,00		Dinas P3A			
	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak *)											39.670.000,00		Dinas P3A			
	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perkawinan Usia Anak *)											47.090.000,00		Dinas P3A			
	Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak *)	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial										199.979.000,00		Dinas P3A			
	Penyediaan Informasi P2TP2A *)											37.500.000,00		Dinas P3A			
	Pemutakhiran Data Terpadu Perempuan dan Anak *)											162.479.000,00		Dinas P3A			
	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Perempuan	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial										71.200.000,00		Dinas P3A			
	Penyuluhan Pencegahan KDRT terhadap Perempuan dan Anak *)											71.200.000,00		Dinas P3A			
204	Bidang Pertanahan																
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)	Pemertapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah										28.000.000,00		Dishutan			
	Kerjasama Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *)											28.000.000,00		Dishutan			
	Program pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pertanahan	Pemertapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah				tersedianya tanah pemda, sertifikat tanah pemda dan sertifikasi secara gratis kpd						162.000.000,00		Dishutan			
	Pengawasan Tapal Batas antar Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas *)											162.000.000,00		Dishutan			

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)		Pemertapan keaminan dan keterlibatan serta penyelesaian batas wilayah							33.600.000,00		Dishutban		
	Pemecahan Tata Batas Antar Daerah *)									33.600.000,00		Dishutban		
2.05	Bidang Lingkungan Hidup													
	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Bencana		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang		terpantunya ancaman bencana di kecamatan dan terlaksananya pelatihan dan si					213.100.000,00		DLH		
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya bencana *)									136.100.000,00		DLH		
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran *)									79.000.000,00		DLH		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.472.647.000,00		DLH		
	Penyediaan jasa surat menyurat									9.800.000,00		DLH		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									79.000.000,00		DLH		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									10.000.000,00		DLH		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									26.424.112,00		DLH		
	Penyediaan alat tulis kantor									81.549.000,00		DLH		
	Penyediaan barang obahan dan penggandaan									37.450.000,00		DLH		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									8.600.000,00		DLH		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.318.000,00		DLH		
	Penyediaan bahan logistik kantor									52.000.000,00		DLH		
	Penyediaan makanan dan minuman									7.675.000,00		DLH		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									448.000.000,00		DLH		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									664.840.388,00		DLH		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									150.000.000,00		DLH		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi		Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					238.046.000,00		DLH		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									28.825.000,00		DLH		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									100.560.000,00		DLH		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									31.060.000,00		DLH		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									87.920.000,00		DLH		
	Program peningkatan disiplin aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi		Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan paksaan dinas PNS					24.570.000,00		DLH		
	Pengadaan paksaan dinas beserta perlengkapannya									24.570.000,00		DLH		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi		Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					296.660.000,00		DLH		
	Pendidikan dan pelatihan formal									296.660.000,00		DLH		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi		Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					18.800.000,00		DLH		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									18.800.000,00		DLH		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan		Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang		Data Kualitas Air					1.469.074.000,00		DLH		
	Pemantauan Kualitas Lingkungan									616.788.000,00		DLH		
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup									93.260.000,00		DLH		
	Sosialisasi Pengeduan Kasus Lingkungan *)									34.400.000,00		DLH		
	Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 *)									161.750.000,00		DLH		
	Sosialisasi pengeduan Emas Ramah Lingkungan *)									194.360.000,00		DLH		
	Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 *)									93.600.000,00		DLH		
	Pelatihan Bank Sampah *)									259.436.000,00		DLH		
	Sosialisasi Penilaian Kota Sehat/Adipura *)									46.660.000,00		DLH		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikator	Praktisan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
15	01									(4)				
										174.100.000,00		Disdukcapi		
										173.700.000,00		Disdukcapi		
										32.879.000,00		Disdukcapi		
										120.800.000,00		Disdukcapi		
										900.201.000,00		Disdukcapi		
										248.150.000,00		Disdukcapi		
										48.000.000,00		Disdukcapi		
										157.350.000,00		Disdukcapi		
										42.800.000,00		Disdukcapi		
										38.000.000,00		Disdukcapi		
										38.000.000,00		Disdukcapi		
207	07													
										1.842.334.000,00		DPMD		
										9.000.000,00		DPMD		
										203.200.000,00		DPMD		
										8.400.000,00		DPMD		
										119.232.000,00		DPMD		
										56.300.000,00		DPMD		
										2.000.000,00		DPMD		
										71.000.100,00		DPMD		
										9.000.000,00		DPMD		
										43.100.000,00		DPMD		
										300.000.000,00		DPMD		
										699.909.312,00		DPMD		
										240.000.000,00		DPMD		
										78.400.000,00		DPMD		
										8.000.000,00		DPMD		
										6.000.000,00		DPMD		
										25.000.000,00		DPMD		
										30.000.000,00		DPMD		
										9.400.000,00		DPMD		
										64.200.000,00		DPMD		
										32.130.000,00		DPMD		
										32.130.000,00		DPMD		
										15.200.000,00		DPMD		
										1.400.000,00		DPMD		
										13.740.000,00		DPMD		
										1.100.000.000,00		DPMD		
										600.000.000,00		DPMD		
										500.000.000,00		DPMD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat							Frekuensi Fasilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	342.755.000,00		DPMD		
	Rapat Koordinasi Satker DPMD *)									166.960.000,00		DPMD		
	Advokasi Poksana Posyandu *)									69.465.000,00		DPMD		
	Lomba Pakaral Posyandu *)									106.335.000,00		DPMD		
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat							Frekuensi Fasilitas Peningkatan Ekonomi masyarakat pedesaan	172.402.000,00		DPMD		
	Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *)									62.382.000,00		DPMD		
	Pembinaan Pelaporan Keuangan BUMDesa *)									65.170.000,00		DPMD		
	Sosialisasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) *)									54.850.000,00		DPMD		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat							Jumlah Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	478.110.000,00		DPMD		
	Lomba Desa *									196.260.000,00		DPMD		
	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat *									160.000.000,00		DPMD		
	Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa *)									121.850.000,00		DPMD		
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Frekuensi Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.541.612.100,00		DPMD		
	Pelatihan Kepala Desa dan Lain-lain *)									203.370.000,00		DPMD		
	Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa *)									164.500.000,00		DPMD		
	Pemilihan Kepala Desa *)									1.612.205.100,00		DPMD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Keuangan Desa *)									61.400.000,00		DPMD		
	Peningkatan Kualitas Updating Profil Desa *)									110.000.000,00		DPMD		
	Pengamanan PILKADES Serentak *)									290.000.000,00		DPMD		
	Workshop Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *)									210.237.000,00		DPMD		
	Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							pemasyrakatan Teknologi tepat guna	183.915.000,00		DPMD		
	Pendampingan dan Pembinaan Desa Program Pamsimas *)									35.500.000,00		DPMD		
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna *)									72.600.000,00		DPMD		
	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengembangan POSYANTEK/WARTEK/WARTEKDES *)									76.415.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								85.350.000,00		DPMD		
	Tim Verifikasi Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa *)									85.350.000,00		DPMD		
	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								148.410.000,00		DPMD		
	Pembinaan Administrasi Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) *)									148.410.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.600.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.600.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.600.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.600.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.600.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.600.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.120.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.120.000,00		DPMD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								9.500.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									9.500.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								49.400.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									49.500.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.400.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.400.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								21.150.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									21.150.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.400.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.400.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								14.400.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									14.400.000,00		DPMD		
2-04	Bidang Peningkatan Penduduk dan Keluarga Berencana													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.014.737.180,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa surat menyurat									8.600.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									88.600.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									8.401.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan alat tulis kantor									54.518.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									17.315.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									3.220.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									5.490.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan bahan logistik kantor									75.600.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan makanan dan minuman									1.000.000,00		Didaldu & KB		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									116.000.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									507.216.000,00		Didaldu & KB		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									125.000.000,00		Didaldu & KB		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		283.436.070,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									36.500.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan perabot gedung kantor									86.500.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan Fagar dan Perataan Halaman (Gedung/Lapangan/Rumah **)									10.000.000,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.577.520,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									71.863.450,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									8.200.000,00		Didaldu & KB		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS		26.310.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									26.310.000,00		Didaldu & KB		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi		82.500.000,00		Didaldu & KB		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									82.500.000,00		Didaldu & KB		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/3	1/3		
(1)	(2)																	(4)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									16.634.500,00		Didai duk & KB					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD										1.544.500,00		Didai duk & KB					
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										1.000.000,00		Didai duk & KB					
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)										13.250.000,00		Didai duk & KB					
	Program Keluarga Berencana	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									163.000.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan TKBK *)										73.580.000,00		Didai duk & KB					
	Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat Kabupaten Gunung Mas *)										29.500.000,00		Didai duk & KB					
	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									187.085.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Kecamatan *)										51.690.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan KB-Kes-PKK Tingkat Kabupaten *)										48.730.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan KB Perusahaan *)										35.115.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan Bulan Bakti KB Kes Bhayangkara Tingkat Kecamatan *)										51.560.000,00		Didai duk & KB					
	Program Keluarga Sejahtera *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									285.000.000,00		Didai duk & KB					
	Pelatihan Pendidik Sebaya *)										57.187.000,00		Didai duk & KB					
	Advokasi dan KIE tentang Generasi Berencana *)										62.979.000,00		Didai duk & KB					
	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok UPPKS *)										65.834.000,00		Didai duk & KB					
	Pembinaan Kelompok BKB										99.000.000,00		Didai duk & KB					
	Program Pengendalian Penduduk *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									298.317.250,00		Didai duk & KB					
	Lomba Karya Tulis dan Pidato Kependudukan *)										59.400.000,00		Didai duk & KB					
	Penyusunan Aplikasi Pendataan Kependudukan *)										101.960.000,00		Didai duk & KB					
	Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan *)										43.020.000,00		Didai duk & KB					
	Pembinaan Petugas Pengelola Laporan Data Statistik Rutin (Rak KB *)										33.011.150,00		Didai duk & KB					
	Sosialisasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga *)										23.946.100,00		Didai duk & KB					
	Program Penyuluhan dan Pergerakan KB *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									282.300.000,00		Didai duk & KB					
	Sosialisasi Program KBPK bagi petugas Pemukiman se-Kabupaten Gunung Mas *)										31.800.000,00		Didai duk & KB					
	Advokasi dan KIE tentang Program KBPK *)										44.660.000,00		Didai duk & KB					
	Pelayanan, Penyelenggaraan dan Rapat Pembinaan Penyuluh KBPK *)										50.170.000,00		Didai duk & KB					
	Pembinaan dan Penilaian Kader KBPK *)										155.700.000,00		Didai duk & KB					
	Program Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Penyuluh	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									807.247.000,00		Didai duk & KB					
	Pengadaan Sarana Pendataan *)										42.500.000,00		Didai duk & KB					
	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB *)										602.851.000,00		Didai duk & KB					
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB *)										161.916.000,00		Didai duk & KB					
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									2.584.140.000,00		Didai duk & KB					
	Pembinaan Program KBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKB/Sub-PPKB *)										782.000.000,00		Didai duk & KB					
	Operasional Balai Penyuluh KB *)										450.000.000,00		Didai duk & KB					
	Operasional Distribusi Aikon *)										19.500.000,00		Didai duk & KB					
	Operasional Penggerakan di Kampung KB *)										1.080.000.000,00		Didai duk & KB					
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB *)										272.640.000,00		Didai duk & KB					
2.03	Bidang Perhubungan																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.346.369.750,00		Dishub					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Relevansi Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.260.000,00		Dishub		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									163.660.000,00		Dishub		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									14.267.500,00		Dishub		
	Penyediaan alat tulis kantor									55.678.000,00		Dishub		
	Penyediaan barang cetakan dan pencetakan									30.235.000,00		Dishub		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									9.195.000,00		Dishub		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									8.000.000,00		Dishub		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									18.200.000,00		Dishub		
	Penyediaan bahan logistik kantor									81.600.000,00		Dishub		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									224.000.000,00		Dishub		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pencukung Administrasi Teknis Perkantoran									478.190.400,00		Dishub		
	Rapat-rapat koordinasi (ke dalam daerah *)									212.500.000,00		Dishub		
	Penyediaan bahan logistik pengujian kendaraan bermotor *)									62.713.450,00		Dishub		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	241.511.550,00		Dishub		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									9.720.000,00		Dishub		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									48.500.000,00		Dishub		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									9.001.550,00		Dishub		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									122.650.000,00		Dishub		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									28.630.000,00		Dishub		
	Peningkatan kualitas gedung kantor *)									25.000.000,00		Dishub		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	60.400.000,00		Dishub		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									50.400.000,00		Dishub		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	112.000.000,00		Dishub		
	Pendidikan dan pelatihan formal									112.000.000,00		Dishub		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	63.800.000,00		Dishub		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD									23.800.000,00		Dishub		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.650.000,00		Dishub		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									2.800.000,00		Dishub		
	Penyusunan Laporan Rencana, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)									13.250.000,00		Dishub		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.500.000,00		Dishub		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang							peningkatan kelancaran arus transportasi	11.000.000,00		Dishub		
	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas-Perengkapan Dermaga Sungai *)									11.000.000,00		Dishub		
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang							Peningkatan sarana prasarana angkutan	239.466.000,00		Dishub		
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan									82.269.000,00		Dishub		
	Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jalan darat *)									51.600.000,00		Dishub		
	Pelatihan Petugas Pakir *)									12.286.000,00		Dishub		
	Sosialisasi dan Penerapan Simpatik Transportasi Sungai *)									43.302.000,00		Dishub		
	Pengawasan dan Pengendalian Rutin LLASDP *)									50.000.000,00		Dishub		
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang							Jumlah Fasilitas Peningkatan keselamatan lalu lintas	437.687.000,00		Dishub		
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas									127.500.000,00		Dishub		
	Pengadaan Marka Jalan (DAU) *)									300.000.000,00		Dishub		

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Kelembutan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)												(4)		
	Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi darat *) (Fonem Lelu Lintas dan Angkutan Jalan *)												48.000.000,00	Dishub	
	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor												65.187.000,00	Dishub	
	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang												141.816.700,00	Dishub	
	Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor *)												35.450.000,00	Dishub	
	Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor *)												57.765.700,00	Dishub	
	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor *)												8.600.000,00	Dishub	
	Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor *)												40.600.000,00	Dishub	
2:13	Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												1.048.078.340,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi														Diskominfo Statistik & Persandian
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran												4.500.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan jasa surat menyurat												87.600.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												11.796.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan jasa kebersihan kantor												25.294.340,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												56.877.112,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan alat tulis kantor												6.850.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan												7.350.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												59.820.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												26.400.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												57.150.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan bahan logistik kantor												120.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah												448.640.388,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran												38.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)														Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												359.265.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi														Diskominfo Statistik & Persandian
	Pembangunan gedung kantor												300.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												7.765.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional												42.500.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Program peningkatan disiplin aparatur												23.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi														Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengadaan pelajaran khusus hari-hari tertentu												23.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												84.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi														Diskominfo Statistik & Persandian
	Pendidikan dan pelatihan formal												84.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja												47.945.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi														Diskominfo Statistik & Persandian
	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai														Diskominfo Statistik & Persandian

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Esasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan								
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3					
(1)	(3)																			(4)	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran											2.200.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun											2.200.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DFA-SKPD *)											22.846.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)											20.600.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										238.276.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh*)											30.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rokaman *)											166.075.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pendataan desa yang tidak bersignal *)											43.200.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										36.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi											36.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										3.922.866.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah *)											3.424.800.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pembinaan dan pengelolaan radio *)											460.600.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruang *)											37.866.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										166.990.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Persandian, Diklat Pembentukan Sandiman dan Diklat Fungsional Sandiman*)											86.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengamanan informasi strategis *)											22.890.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyelenggaraan Persandian Daerah *)											48.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										410.042.400,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *)											273.712.400,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *)											112.900.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *)											18.450.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										34.500.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengkajian dan Pengembangan TataKelola E- Government *)											34.500.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										31.109.260,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)											31.109.260,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Aplikasi dan Informatika *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										179.266.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditrapkan Oleh Pemerintah Pusat *)											76.000.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)											108.266.000,00									Diskominfo Statistik & Persandian

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Mula	Keberangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
01	(3)								(4)					
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Penyebar luasan informasi penyelenggaraan penda & informasi yg bersifat penyuluhan						128.846.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum *)									84.896.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Pengadaan Cetak Informasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)									42.260.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								270.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyebarluasan informasi Program dan Kegiatan SKPD *)									270.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Ma	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Terpeliharanya peralatan komunikasi kecamatan						1.490.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rutin alat/materai teknologi komunikasi dan informatika *)									1.490.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
211	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.198.793.104,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan jasa surat menyurat									3.300.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									127.900.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									150.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									8.125.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan alat tulis kantor									81.750.500,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									30.825.140,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									85.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									11.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan bahan logistik kantor									30.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									310.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									404.692.484,00		Distransnakerkop & UKM		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									100.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						238.856.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									76.600.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									67.800.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor									18.656.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Pemeliharaan rutin/bekala mobil jabatan									25.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional									30.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Pemeliharaan rutin/bekala peralatan gedung kantor									23.000.000,00		Distransnakerkop & UKM		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						68.500.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									68.500.000,00		Distransnakerkop & UKM		

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan								
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3					
(1)	(2)																(4)				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi	113.500.000,00		Distransakerkop & UKM
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan																		113.500.000,00		Distransakerkop & UKM
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																Tetaplananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ser	27.675.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran																		2.900.000,00		Distransakerkop & UKM
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun																		2.000.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKPA dan DPA-SKPD *)																		8.585.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *)																		2.300.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *)																		13.750.000,00		Distransakerkop & UKM
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pemertan dan peningkatan iklim investasi																pemberdayaan koperasi dan UMKM	436.750.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penerbitan koperasi simpan pinjam dan pembubaran koperasi tidak aktif *)																		54.400.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penilaian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi *)																		46.900.000,00		Distransakerkop & UKM
	Bimbingan Peningkatan Nilai tambah Produk Usaha kecil Menengah *)																		35.400.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi *)																		85.000.000,00		Distransakerkop & UKM
	Rapatb Teknis Operator dan Penerbitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah *)																		42.350.000,00		Distransakerkop & UKM
	Pertemuan Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Plasma antar Koperasi Dengan Perusahaan Besar, Kelapa sawit *)																		79.700.000,00		Distransakerkop & UKM
	Pemerfaatan Pasar Rakyat *)																		19.400.000,00		Distransakerkop & UKM
	Pembangunan Pasar Rakyat Tugas Pembantuan *)																		74.900.000,00		Distransakerkop & UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Pemertan dan peningkatan iklim investasi																menyediakan sistem pendukung bagi UKM	117.395.000,00		Distransakerkop & UKM
	Monitoring Dana Bergulir *)																		38.900.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA *)																		32.395.000,00		Distransakerkop & UKM
	Pendataan UMKM *)																		47.900.000,00		Distransakerkop & UKM
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan *)	Pemertan dan peningkatan iklim investasi																jumlah pedagang kaki lima yang terbina	74.375.000,00		Distransakerkop & UKM
	Penyediaan tenda Bazar Ramadhan dan Bazar Natal *)																		36.000.000,00		Distransakerkop & UKM
	Bimbingan Peningkatan Nilai Tambah Produk Usaha Kecil Menengah dan Penyediaan Alat Kemasan Makanan *)																		38.375.000,00		Distransakerkop & UKM
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pemertan dan peningkatan iklim investasi																Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tlg UKM	54.550.000,00		Distransakerkop & UKM
	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah																		54.550.000,00		Distransakerkop & UKM
2:12	Bidang Penanaman Modal																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.600.766.322,00		DPNPTSP
	Pemediaan jasa surut menyurat																		3.450.000,00		DPNPTSP
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																		102.000.000,00		DPNPTSP
	Pemediaan jasa kebersihan kantor																		16.045.000,00		DPNPTSP
	Pemediaan jasa perbaikan peralatan kerja																		7.018.748,00		DPNPTSP

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)															(4)	
	Penyediaan alat tulis kantor											88.810.110,00					OPMPTSP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											75.100.000,00					OPMPTSP
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											6.300.000,00					OPMPTSP
	Penyediaan bahan legistik kantor											28.400.000,00					OPMPTSP
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah											184.000.000,00					OPMPTSP
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran											400.642.464,00					OPMPTSP
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)											60.000.000,00					OPMPTSP
	Penilaian Administrasi Kepegawaian *)											2.000.000,00					OPMPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat							237.543.678,00					OPMPTSP
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor											32.000.000,00					OPMPTSP
	Pengadaan peralatan gedung kantor											127.000.000,00					OPMPTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											10.000.000,00					OPMPTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan											25.000.000,00					OPMPTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											20.000.000,00					OPMPTSP
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Buruh **)											23.543.678,00					OPMPTSP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS							15.000.000,00					OPMPTSP
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu											15.000.000,00					OPMPTSP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi							72.000.000,00					OPMPTSP
	Mengikuti studi banding/visitas singkat non formal *)											72.000.000,00					OPMPTSP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai							29.850.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											1.650.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun											1.150.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)											2.550.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/OPPA - SKPD *)											3.100.000,00					OPMPTSP
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)											1.100.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan laporan tahunan realisasi anggaran (TEPRA) *)											18.900.000,00					OPMPTSP
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD *)											1.600.000,00					OPMPTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemetaan dan peningkatan iklim investasi			Tersedianya data investor dan investasinya							692.500.000,00					OPMPTSP
	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal											373.000.000,00					OPMPTSP
	Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal *)											72.500.000,00					OPMPTSP
	Potensi dan peluang investasi *)											147.000.000,00					OPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)	Pemetaan dan peningkatan iklim investasi										308.140.000,00					OPMPTSP
	Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal *)											182.540.000,00					OPMPTSP
	Pengumpulan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Penanaman Modal *)											126.000.000,00					OPMPTSP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										369.975.000,00					OPMPTSP
	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di OPMPTSP *)											18.900.000,00					OPMPTSP
	Sosialisasi pelayanan perizinan *)											11.850.000,00					OPMPTSP
	Pelayanan Terpadu di Kecamatan *)											197.200.000,00					OPMPTSP
	Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik *)											84.900.000,00					OPMPTSP
	Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik *)											45.825.000,00					OPMPTSP

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Seseran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Ragu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuangan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Percepatan Pelaksanaan Usaha Kabupaten Gunung Mas *)									38.000.000,00		DPMPTSP		
	Pendataan dan Pembinaan Perzinan dan Non Perzinan *)									61.000.000,00		DPMPTSP		
	Pelayanan Perizinan (MB *)									2.300.000,00		DPMPTSP		
2:11	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga													
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									21.982.522,00		Disparpora	
	Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti PU *)										21.982.522,00		Disparpora	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.525.768.586,00		Disparpora	
	Penyediaan jasa surut memuat										12.900.000,00		Disparpora	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										64.200.000,00		Disparpora	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										7.385.000,00		Disparpora	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										58.600.000,00		Disparpora	
	Penyediaan alat tulis kantor										72.458.486,00		Disparpora	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										38.375.000,00		Disparpora	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										4.500.000,00		Disparpora	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										83.000.000,00		Disparpora	
	Penyediaan bahan bahan dan peruntukan perundang-undangan										6.420.000,00		Disparpora	
	Penyediaan bahan kopik kantor										42.480.000,00		Disparpora	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										312.600.000,00		Disparpora	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran										634.010.100,00		Disparpora	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										200.000.000,00		Disparpora	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									95.000.000,00		Disparpora	
	Perbaikan rutin/bekas gedung kantor										15.000.000,00		Disparpora	
	Pemeliharaan rutin/bekas kendaraan dinas/operasional										80.000.000,00		Disparpora	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									84.000.000,00		Disparpora	
	Simbangan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										84.000.000,00		Disparpora	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									44.900.000,00		Disparpora	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										20.100.000,00		Disparpora	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										20.100.000,00		Disparpora	
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)										4.700.000,00		Disparpora	
	Program peningkatan peran serta pemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									1.242.055.000,00		Disparpora	
	Pembinaan organisasi kepemudaan										20.565.000,00		Disparpora	
	Pembinaan Drum Band *)										207.905.000,00		Disparpora	
	Pembinaan Pasikbra *)										830.185.000,00		Disparpora	
	Seleksi Pasikbra Tingkat Provinsi/Kabupaten *)										175.815.000,00		Disparpora	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									466.925.000,00		Disparpora	
	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga										435.665.000,00		Disparpora	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi										31.260.000,00		Disparpora	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									12.900.000,00		Disparpora	
	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga										12.900.000,00		Disparpora	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Ragu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program Sarana Promosi Pariwisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								326.720.000,00		Disparpora		
	Pembelian Putra dan Putri Pariwisata *)									127.120.000,00		Disparpora		
	Festival Budaya *)									99.300.000,00		Disparpora		
	Festival Makanan Tradisional *)									99.300.000,00		Disparpora		
	Program Analisis Pasar Pariwisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								73.310.000,00		Disparpora		
	Penyusunan Buku Profil dan Potensi Wisata Kabupaten Gunung Mas *)									73.310.000,00		Disparpora		
	Program Pengembangan Pasar Pariwisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								50.000.000,00		Disparpora		
	Bahan Promosi Pariwisata *)									50.000.000,00		Disparpora		
	Pembudayaan Masyarakat dan Standarisasi Kepariwisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								170.600.000,00		Disparpora		
	Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sedar Wisata dan Potensi Masyarakat di Destinasi Pariwisata *)									170.600.000,00		Disparpora		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Tersedianya pakan khusus dan tertentu dan peralatan olah raga					43.900.000,00		Disparpora		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi									43.900.000,00		Disparpora		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								103.940.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga									85.860.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan (Tampaha*)									8.880.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan (Kuyun*)									8.300.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								24.000.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									24.000.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								50.325.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									50.325.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								79.925.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									79.925.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								29.855.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									29.855.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								16.905.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									16.905.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								26.735.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibraks *)									26.735.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								30.943.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									29.793.000,00		Disparpora		
	Pembinaan kepada kegiatan Karang Taruna Kelurahan *)									2.150.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								34.232.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									34.232.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								17.750.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									17.750.000,00		Disparpora		
2-14	Bidang Statistik													
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Pencapaian dan peningkatan iklim investasi			Tersedianya data dan informasi statistik daerah					427.767.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah									166.900.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyusunan profil Kabupaten *)									31.200.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional PDDB Kabupaten Gunung Mas *) Sosialisasi Statistik Sektoral *)									87.200.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan Pengumpulan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik *)									42.200.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program pengembangan data/informasi *)	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								96.107.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)									67.600.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					Tersedianya data dan informasi statistik daerah			67.600.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan *)									38.900.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
2-15	Bidang Kebudayaan													
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								7.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pendidikan Karakter Budaya Anti Bullying *)									7.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					terawat dan terjagaanya potensi objek kekayaan budaya kab. Gunung mas			336.820.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala									150.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya *)									206.820.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					terlaksananya kegiatan penyelenggaraan festival budaya ming marasa se-kab. G			116.387.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mhing Marasa *)									116.387.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								800.221.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)									800.221.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*)	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah			199.275.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*)									199.275.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *)	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah			19.925.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nila-Nilai Sejarah Daerah *)									19.925.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)	Penaataan dan peningkatan iklim investasi					Terlaksana festival budaya daerah			160.750.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)									160.750.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								72.885.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									72.885.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								81.275.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									81.275.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim investasi								105.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mhing Marasa *)									80.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keleuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)															
	Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *)									25.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								85.880.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									85.880.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								78.115.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									78.115.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								48.640.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									48.640.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								50.290.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									50.290.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								88.345.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									88.345.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								55.340.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									55.340.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								79.095.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									79.095.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								50.725.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									50.725.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penataan dan peningkatan iklim investasi								65.880.960,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
	Penyelenggaraan kekutsertaan Festival Mhing Manasa *)									65.880.960,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
2:17	Bidang Perpustakaan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.328.547.484,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan jasa surat menyurat									8.100.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									44.540.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									50.671.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan alat tulis kantor									88.217.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									11.670.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									25.805.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									168.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									8.980.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyediaan bahan logistik kantor									29.870.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			

NO	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									295.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									508.814.484,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	(Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									92.560.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat				332.352.516,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									18.560.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									46.413.275,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									42.060.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									13.821.731,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									211.617.460,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS				22.050.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									22.050.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi				132.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									132.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai				21.225.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									5.400.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.825.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								39.075.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan *)									39.075.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Pelayanan Perpustakaan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								7.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Lomba Perpustakaan Desa *)									7.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya layanan perpustakaan, lomba bercerita, pelatihan pengelola perpustakaan				142.700.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk meneguhkan jiwabaca masyarakat pembelajar									25.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Pengembangan minat dan budaya baca									37.700.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat									42.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									37.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
2-10	Bidang Kearsipan													
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan				10.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah									10.000.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Pengembangan Sumber Daya Arsip *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								94.950.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Workshop Pengelolaan Kearsipan *)									94.910.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Program Pelayanan Kearsipan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								43.610.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif (SOED *)									18.180.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data *)									27.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
5	Urusan Priban													
3-02	Bidang Kehutanan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.270.161.250,00		Dishutban		
	Penyediaan jasa surat menyurat									1.350.000,00		Dishutban		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									69.400.000,00		Dishutban		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.291.500,00		Dishutban		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									55.100.000,00		Dishutban		
	Penyediaan alat tulis kantor									87.518.000,00		Dishutban		
	Penyediaan tenaga penerangan dan pengendalian									36.000.000,00		Dishutban		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									7.973.670,00		Dishutban		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									14.820.000,00		Dishutban		
	Penyediaan bahan kopik kantor									85.400.000,00		Dishutban		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									200.000.000,00		Dishutban		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									615.968.000,00		Dishutban		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									110.000.000,00		Dishutban		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								143.267.750,00		Dishutban		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									2.800.000,00		Dishutban		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									8.000.000,00		Dishutban		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									12.807.750,00		Dishutban		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		Dishutban		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									95.000.000,00		Dishutban		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								37.050.000,00		Dishutban		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									37.050.000,00		Dishutban		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								168.800.000,00		Dishutban		
	Pendidikan dan pelatihan formal									168.800.000,00		Dishutban		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								26.860.000,00		Dishutban		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.135.000,00		Dishutban		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									2.225.000,00		Dishutban		
	Penyusunan Laporan Rencana, Renja SKPD *)									4.690.000,00		Dishutban		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									5.000.000,00		Dishutban		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.810.000,00		Dishutban		
	Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								132.120.000,00		Dishutban		
	Pemeliharaan dan Pembersihan Kawasan TAHURA *)									132.120.000,00		Dishutban		
	Program Penataan Kawasan TAHURA *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								1.320.641.000,00		Dishutban		
	Penataan dan Pembagian Blok Kawasan TAHURA *)									297.268.000,00		Dishutban		
	Rencana Pengelolaan Kawasan TAHURA *)									291.343.000,00		Dishutban		
	Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base *)									137.705.000,00		Dishutban		
	Rencana Pengelolaan dan Pembangunan Blok Koleksi Tumbuhan dan Sawa *)									336.895.000,00		Dishutban		

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA *)									49.440.000,00		Dishuthan		
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TAHURA *)									157.100.000,00		Dishuthan		
	Perencanaan dan Diskusi Publik Penyusunan Pembagian Blok dan Rencana Pengelolaan TAHURA *)									50.800.000,00		Dishuthan		
	Program Pengembangan Ekowisata Tahura *)			Penataan dan peningkatan iklim investasi						742.720.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Sarana Outbound *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Rumah Pohon *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pelatihan Petugas Outbound *)									70.720.000,00		Dishuthan		
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *)			Penataan dan peningkatan iklim investasi						957.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Perbaikan Jalan dan Jembatan Tahura Lapak Jaru *)									220.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Pengkajian Solusiel *)									120.000.000,00		Dishuthan		
	Rehab dan Perbaikan Dam Air Terjun Sawin Kameloh *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pengadaan Papan Nama Kawasan dan Papan Larangan *)									118.000.000,00		Dishuthan		
	Perbaikan Garis *)									50.000.000,00		Dishuthan		
	Program Perlindungan dan Pengawasan *)			Penataan dan peningkatan iklim investasi						166.550.000,00		Dishuthan		
	Patrol, Pemantauan dan Penjagaan Kawasan *)									166.550.000,00		Dishuthan		
	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Perencanaan Kawasan *)			Penataan dan peningkatan iklim investasi						972.000.000,00		Dishuthan		
	Mencatat dan Mengusulkan Permohonan Sertifikat Tanah Milik Peranda *)									113.500.000,00		Dishuthan		
	Menjaga dan Memeriksa Usulan Permohonan Sertifikat oleh Masyarakat Mabin *)									98.400.000,00		Dishuthan		
	Melakukan Verifikasi dan Validasi Administrasi Tanah yang ada di Bekas *)									102.000.000,00		Dishuthan		
	Memberikan Fasilitas Kepada Tim Dalam Negosiasi Harga Tanah *)									177.700.000,00		Dishuthan		
	Memberikan Pelayanan Administrasi Garis Rugi *)									430.300.000,00		Dishuthan		
3.00	Bidang Kelautan dan Perikanan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.452.135.900,00		Diskan		
	Pemediaan jasa surat menyurat									7.300.000,00		Diskan		
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									134.400.000,00		Diskan		
	Pemediaan jasa administrasi keuangan									600.000,00		Diskan		
	Pemediaan jasa kebersihan kantor									6.000.000,00		Diskan		
	Pemediaan alat tulis kantor									34.400.000,00		Diskan		
	Pemediaan barang cetakan dan pengandaian									25.400.000,00		Diskan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									7.100.000,00		Diskan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									9.600.000,00		Diskan		
	Penyediaan bahan logistik kantor									73.800.000,00		Diskan		
	Pemediaan makanan dan minuman									8.200.000,00		Diskan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									288.000.000,00		Diskan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									709.077.600,00		Diskan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									160.000.000,00		Diskan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	228.140.800,00		Diskan		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									35.250.000,00		Diskan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									48.950.000,00		Diskan		
	Pemeliharaan rupa/berkala kendaraan dinas/operasional									81.000.000,00		Diskan		
	Pemeliharaan rupa/berkala perlengkapan gedung kantor									11.897.100,00		Diskan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(b)	(c)																	(d)
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor											13.213.596,00		Diskan				
	Peningkatan kualitas gedung kantor *)											21.080.000,00		Diskan				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										43.360.000,00		Diskan				
	Pencapaian raihan khusus tahunan tertentu											43.360.000,00		Diskan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										128.090.000,00		Diskan				
	Pendidikan dan pelatihan formal											66.000.000,00		Diskan				
	Simbangan teknis implementasi peraturan perundang-undangan											72.090.000,00		Diskan				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										13.200.000,00		Diskan				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											13.200.000,00		Diskan				
	Program pengembangan budidaya perikanan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										1.573.855.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pelayanan pada kelompok pembudidaya ikan *)											171.825.000,00		Diskan				
	Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Rakyat *)											548.800.000,00		Diskan				
	Pelatihan Usaha Perikanan *)											84.780.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pengelolaan BBI *)											405.210.000,00		Diskan				
	Peningkatan sarana dan prasarana BBI *)											29.000.000,00		Diskan				
	Pembinaan kelembagaan dan perikanan usaha *)											60.240.000,00		Diskan				
	Penyusunan bahan publikasi/penyuluhan *)											15.000.000,00		Diskan				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana BBI *)											249.000.000,00		Diskan				
	Program pengembangan perikanan tangkap	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										138.060.000,00		Diskan				
	Sosialisasi Perindungan/luas perikanan *)											63.420.000,00		Diskan				
	Peningkatan pelayanan pada kelompok nelayan *)											75.640.000,00		Diskan				
	Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										238.972.000,00		Diskan				
	Lomba masak serba ikan *)											108.065.000,00		Diskan				
	Gerakan memasyarakatkan makan ikan *)											28.000.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pelayanan pada POKLAHSAR *)											24.000.000,00		Diskan				
	Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan *)											81.087.000,00		Diskan				
	Program pengembangan kawasan budidaya laur, air payau dan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										112.000.000,00		Diskan				
	Kajian kawasan budidaya laur, air payau dan air tawar											100.000.000,00		Diskan				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar *)											12.000.000,00		Diskan				
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										19.160.000,00		Diskan				
	Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan *)											19.160.000,00		Diskan				
3.04	Bidang Pariwisata																	
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pencapaian dan peningkatan iklim investasi										179.364.066,00		Disparpora				
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri											68.514.066,00		Disparpora				
	Perencanaan Desa Wisata *)											110.840.000,00		Disparpora				
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pencapaian dan peningkatan iklim investasi										1.663.342.400,00		Disparpora				
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata											163.382.000,00		Disparpora				

NO	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pengembangan Statistik Kepariwisata/Pengumpulan dan Penyelesaian Data Kepariwisata *)									88.000.000,00		Disparpora		
	Masterplan Kawasan Wisata Sekota Juli dan Batu Suli *)									380.000.000,00		Disparpora		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekota Juli *)									999.950.400,00		Disparpora		
3-85	Bidang Pertanian													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.054.708.904,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									140.400.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									300.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									13.575.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									27.351.104,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan alat tulis kantor									103.380.910,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									63.468.200,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.120.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan logistik kantor									51.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									624.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									884.011.780,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									30.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								583.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembangunan gedung kantor									322.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									161.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional									100.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								184.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pendidikan dan pelatihan formal									160.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									24.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								84.440.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Rkhsar realisasi kinerja SKPD									8.540.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									15.900.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengukuran	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								212.875.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan RKAR/KAP dan DPA/DPPA *)									8.200.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keberhasilan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah *)									146.600.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Pengukuran Kinerja OPD *)									8.475.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								497.892.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Perlindungan tanaman padi dan palawija *)									112.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *)									84.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembinaan dan Pengawasan Corporate Social Responsibility (CSR) *)									98.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemutakhiran Data Kelembagaan Petani *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pelatihan Lapangan Petani Jaha Merah *)									68.722.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Potan dan Geopdan *)									74.470.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								2.171.870.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penanganan daerah rawan pangan									18.400.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan									18.550.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Kijat rantai pasokan dan pemasaran pangan									40.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija									1.271.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan perbenihan/perbibitan									340.380.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan									42.395.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Sistem Kawaspadaan Pangan dan gizi *)									54.700.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HP5 Tingkat Provinsi *)									59.475.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *)									55.490.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) *)									55.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) *)									58.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan kawasan mandiri pangan *)									49.320.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								87.590.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan level guwa									8.700.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan level guwa									79.290.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								3.334.680.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

NO	Usran/Bidang Usran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Fagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keleuan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)									(4)					
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pendampingan kegiatan APBDN dan kegiatan APBD *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Refreshing Pengolahan data statistik dan informasi pertanian/perkebunan													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kawasan produksi perkebunan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembangunan Batang Bawah Karet *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) komoditas perkebunan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeliharaan Kebun Entres Karet *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Bibit Karet Unggul Siap Sair *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Bibit Unggul Kopi *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Jaha Merah *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengadaan Prasarana Kebun Entres Karet *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Padi Organik *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pertemuan teknis penyuluh pertanian dan perkebunan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Latihan dan Kunjungan (LAKU) Penyuluh Pertanian Lapangan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan (DAU) *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan (DAK) *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada hewan/ternak *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelatihan Penanganan Daging yang ASUH *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak (Vaksinasi/Rabies) *)													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prairaan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Jumlah ternak per tahun					3.588.922.500,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak									455.300.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat									2.563.322.500,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat									88.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Statistik Peternakan *)									56.550.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sosialisasi Potensi Peternakan *)									57.750.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Jumlah pemasaran ternak per tahun					113.285.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan									64.285.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengalihan informasi permintaan pasar atas hasil produk peternakan masyarakat									49.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								145.536.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH-U *)									145.536.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal					86.410.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembudayaan pengembangan kelompok produk pangan lokal/industri pangan lokal *)									36.760.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan/Gemar Makan Pangan Lokal *)									29.650.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Dokumen penantunan dan peta risiko pangan dan jumlah desa mandiri pangan					16.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) *)									16.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Jumlah terapan teknologi peternakan					107.795.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna *)									107.795.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								3.437.375.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pertanian *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi *)									89.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian *)									484.875.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi *)									93.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK) *)									630.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK) *)									30.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAK) *)									1.380.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

NO	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAU) *)									69.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Inventarisasi dan Penataan iKos Sapred dan Pengacat Pupuk *)									20.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revisi/aksi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								10.900.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan									10.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (kelurahan kutun*)									6.180.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (kelurahan lampang*)									3.800.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revisi/aksi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								10.050.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan									6.050.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (kelurahan *)									4.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3.00	Ridani Perencanaan													
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								45.214.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									45.214.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penataan dan peningkatan iklim investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	[Pemeran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		

No	Unsur/Bagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Proses Daerah	Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program				Pagu Indikatif	Praktean Maju	Keterangan
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif			
					Target	Total Tahun	Target	Total Tahun	Target	Total Tahun	12/3
					Target	Total Tahun	Target	Total Tahun	Target	Total Tahun	12/3
(1)	(1)	Perdagangan Jasa Tenaga Penjualan Administrasi Tertulis	Padang							567.690.000,00	Dispendag
		Realisasi kegiatan ke dalam daerah *)	Padang							107.600.000,00	Dispendag
		Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Padang							205.171.500,00	Dispendag
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Padang							8.660.000,00	Dispendag
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Padang							25.000.000,00	Dispendag
		Pemeliharaan ruko/berkas gedung kantor	Padang							18.621.500,00	Dispendag
		Pemeliharaan ruko/berkas mobil jabatan	Padang							35.000.000,00	Dispendag
		Pemeliharaan ruko/berkas kendaraan operasional	Padang							80.000.000,00	Dispendag
		Pemeliharaan ruko/berkas peralatan gedung kantor	Padang							14.000.000,00	Dispendag
		Pengadaan kertas gedung kantor *)	Padang							35.000.000,00	Dispendag
		Program peningkatan disiplin aparatur	Padang							42.640.000,00	Dispendag
		Pengadaan pelatihan dinas beserta pendampingannya	Padang							42.640.000,00	Dispendag
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang							139.000.000,00	Dispendag
		Sebuah bursa informasi penting berupa pendang-undangan	Padang							139.000.000,00	Dispendag
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Padang							25.220.000,00	Dispendag
		Pengadaan pelaporan kegiatan peningkatan	Padang							1.810.000,00	Dispendag
		Pemilihan pelaporan kegiatan setiap tahun	Padang							1.810.000,00	Dispendag
		Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)	Padang							8.490.000,00	Dispendag
		Program Penerimaan Akuntansi Kinerja Instansi	Padang							1.910.000,00	Dispendag
		Pengadaan Penerimaan Fiskal dan Keuangan SKPD *)	Padang							11.400.000,00	Dispendag
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Padang							474.996.000,00	Dispendag
		Pengadaan kemampuan kerja melalui	Padang							474.996.000,00	Dispendag
		-Kembali industri usaha tangga terdapat PDRB sektor industri - Perumahan	Padang							474.996.000,00	Dispendag
		Program pengembangan wilayah transgrasi	Padang							210.400.000,00	Dispendag
		Pengadaan kemampuan kerja melalui	Padang							210.400.000,00	Dispendag
		pendayaan ekonomi masyarakat	Padang							210.400.000,00	Dispendag
		Pengadaan Unit Kelengkapan Transgrasi dan Masyarakat	Padang							89.400.000,00	Dispendag
		Pengembangan Kawasan Transgrasi Tugas Pembantuan *)	Padang							121.000.000,00	Dispendag
		Program Pengembangan Energi Program	Padang							27.160.000,00	Dispendag
		Bidang Administrasi Pemerintahan	Padang							27.160.000,00	Dispendag
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Padang							27.160.000,00	Dispendag
		Pembinaan kemampuan kerja pegawai dan analisis	Padang							27.160.000,00	Dispendag
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang							8.473.446.000,00	Dispendag
		Pembinaan kemampuan kerja, reformasi	Padang							8.473.446.000,00	Dispendag
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang							48.600.000,00	Dispendag
		Pengadaan jasa surat menyurat	Padang							48.600.000,00	Dispendag
		Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Padang							539.600.000,00	Dispendag

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Referensi	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyediaan alat tulis kantor									257.784.000,00		Setda		
	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian									143.050.000,00		Setda		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									49.500.000,00		Setda		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									131.000.000,00		Setda		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									171.300.000,00		Setda		
	Penyediaan bahan kodifikasi kantor									1.013.000.000,00		Setda		
	Penyediaan makanan dan minuman									200.000.000,00		Setda		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									1.384.000.000,00		Setda		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									2.849.006.000,00		Setda		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									250.000.000,00		Setda		
	Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga KDH dan WKDH *)									898.000.000,00		Setda		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)									48.275.000,00		Setda		
	Mengikuti kunjungan kerja pemerintah daerah ke dalam daerah dan luar daerah *)									291.000.000,00		Setda		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					2.096.077.400,00		Setda		
	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									453.542.400,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/bekala rumah jabatan									325.000.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor									229.435.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional									348.100.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/bekala peralatan gedung kantor									100.000.000,00		Setda		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					196.160.000,00		Setda		
	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									196.160.000,00		Setda		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi					909.859.900,00		Setda		
	Pendidikan dan pelatihan formal									46.000.000,00		Setda		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan									50.000.000,00		Setda		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									200.000.000,00		Setda		
	Bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah *)									64.500.000,00		Setda		
	Peningkatan Sumber Daya Anggota POKJA *)									325.000.000,00		Setda		
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas *)									84.000.000,00		Setda		
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Desa *)									70.618.000,00		Setda		
	Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN *)									59.820.000,00		Setda		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					814.914.100,00		Setda		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									31.600.000,00		Setda		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									31.600.000,00		Setda		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)									44.804.100,00		Setda		
	Penyusunan LKPD Bupati Gunung Mas *)									80.810.000,00		Setda		
	Penyusunan LRPD Kabupaten Gunung Mas *)									38.800.000,00		Setda		
	Penyusunan EKPPD Kabupaten Gunung Mas *)									45.400.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									119.300.000,00		Setda		
	Penyusunan Laporan SPN Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)									20.800.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Kinerja Penda) *)									399.660.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan LAKIP Sekretariat Daerah *)									22.770.000,00		Setda		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terjunluangnya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Kab Gunung dan bersus					1.327.320.000,00		Setda		
	Bimbingan Umat beragama *)									49.400.000,00		Setda		

NO	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Keterangan						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3			
(1)	(3)																		
	Penyusunan Laporan Data Lembaga Keagamaan Penerima Bantuan/Subsidi Pemerintah *)										2.400.000,00		Setda						
	Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Hibah Lembaga Keagamaan Rumah Bedah dan Kegiatan Keagamaan *)										43.200.000,00		Setda						
	Penyelenggaraan Safas Keagamaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										1.185.320.000,00		Setda						
	Pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji Kabupaten Gunung Mas *)										46.900.000,00		Setda						
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								meningkatnya standar pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.272.825.000,00		Setda						
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri										243.825.000,00		Setda						
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah										200.800.000,00		Setda						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *)										300.300.000,00		Setda						
	Keprotokolan dan pengamanan KCH dan WKCH *)										130.300.000,00		Setda						
	Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya *)										400.300.000,00		Setda						
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								terlaksananya inventarisasi dan penataan aset	76.700.000,00		Setda						
	Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)										76.700.000,00		Setda						
	Program peningkatan sistem pengawas internal dan pengendalian keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tertanganinya laporan masyarakat dalam pengembangan sarana & prasarana etc	60.835.000,00		Setda						
	Penanganan laporan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan investasi lainnya *)										60.835.000,00		Setda						
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									73.950.000,00		Setda						
	Rapat Kerjasama Antar Daerah *)										42.750.000,00		Setda						
	Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Daerah dan Regional *)										31.200.000,00		Setda						
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan	370.100.000,00		Setda						
	Penyusunan rencana kerja/rancangan peraturan perundang-undangan										46.900.000,00		Setda						
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan										18.340.000,00		Setda						
	Penyusunan Produk Hukum Daerah *)										75.750.000,00		Setda						
	Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Produk Hukum Desa *)										36.750.000,00		Setda						
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas dan SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *)										37.460.000,00		Setda						
	Kejurukama permasalahan peraturan perundang-undangan *)										156.400.000,00		Setda						
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								tersusunnya laporan kepegawaian SKPD, evaluasi penyusunan anjab, laporan kepegawaian	667.375.000,00		Setda						
	Penyusunan Laporan Kepegawaian SKPD *)										55.985.000,00		Setda						
	Penyusunan Analisis Jabatan *)										30.800.000,00		Setda						
	Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan *)										146.290.000,00		Setda						
	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum *)										28.510.000,00		Setda						
	Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										77.300.000,00		Setda						
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										73.700.000,00		Setda						
	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										261.290.000,00		Setda						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersusunnya desain organisasi perangkat daerah kabupaten						135.690.000,00		Setda	
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas *)										135.690.000,00		Setda	
	Program peningkatan sarana perokoedemian *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terkoordinir dan terfasilitasinya penyaluran rasikin						440.683.000,00		Setda	
	(Penyaluran Raskin *)										440.683.000,00		Setda	
	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terselesainya permasalahan sengketa tanah adat						212.000.000,00		Setda	
	Orientasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah *)										89.570.000,00		Setda	
	Orientasi penyusunan produk Hukum Keadanan (Hukum Adat *)										68.528.000,00		Setda	
	(Penyuluhan Hukum *)										55.905.000,00		Setda	
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tertaksananya penyuluhan peningkatan kesadaran hukum & HAM						106.210.000,00		Setda	
	Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bermuansa HAM dan Evaluasi Pelaksanaan HAM *)										73.370.000,00		Setda	
	(Lomba Kesadaran Hukum *)										92.840.000,00		Setda	
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			monev dari pelayanan perijinan						144.490.000,00		Setda	
	Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)										40.000.000,00		Setda	
	Bimbingan Teknis Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										92.790.000,00		Setda	
	Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) *)										11.700.000,00		Setda	
	Program peningkatan pelayanan staf ahli *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			peningkatan keahlian sesuai bidangnya						105.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang politik, hukum dan pemerintahan *)										65.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang kemasyarakatan dan SDM *)										65.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan *)										65.000.000,00		Setda	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.935.420.943,00		Setwan	
	Penyediaan jasa surat merosul										11.700.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										153.304.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										350.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										61.890.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										62.500.000,00		Setwan	
	Penyediaan alat tulis kantor										71.590.000,00		Setwan	
	Penyediaan barang habis pakai dan penggantian										118.250.000,00		Setwan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										14.610.000,00		Setwan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										25.250.000,00		Setwan	
	Penyediaan bahan besan dan peraturan perundang-undangan										2.106.000.000,00		Setwan	
	Penyediaan bahan ekspik kantor										236.320.000,00		Setwan	
	Penyediaan makanan dan minuman										345.930.000,00		Setwan	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										400.000.000,00		Setwan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										1.089.218.943,00		Setwan	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										282.500.000,00		Setwan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						1.448.980.542,00		Setwan	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										447.250.000,00		Setwan	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										784.850.000,00		Setwan	
	Pemeliharaan rtm/berkala gedung kantor										27.280.542,00		Setwan	
	Pemeliharaan rtm/berkala mobil jabatan										115.000.000,00		Setwan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Peringkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									62.500.000,00	Setwan			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan patelan dinas PNS					184.220.000,00	Setwan			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									304.410.000,00	Setwan			
	Pengadaan beban khusus hari-hari tertentu									79.410.000,00	Setwan			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					428.000.000,00	Setwan			
	Simbangan teknis implementasi penurun perundang-undangan									164.000.000,00	Setwan			
	Perkemisan Nasional ASDEKS *)									184.000.000,00	Setwan			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses					44.205.000,00	Setwan			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									20.725.000,00	Setwan			
	Penyusunan Laporan Rensbra, Renja SKPD *)									2.300.000,00	Setwan			
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									8.930.000,00	Setwan			
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									13.150.000,00	Setwan			
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan SDM bagi anggota DPRD					7.418.839.000,00	Setwan			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah									103.385.000,00	Setwan			
	Kegiatan Reses									304.204.000,00	Setwan			
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD									1.508.000.000,00	Setwan			
	Perkemisan Nasional/Regional dan Rapat Kerja *)									2.101.000.000,00	Setwan			
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah *)									2.148.000.000,00	Setwan			
	Rapat-rapat peripurna dan pelantikan *)									124.750.000,00	Setwan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD *)									437.500.000,00	Setwan			
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								4.500.000,00	Setwan			
	Investasi dan penilaian aset SKPD *)									4.500.000,00	Setwan			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					197.587.500,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan jasa surat menyurat									7.320.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									31.330.980,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									9.802.894,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan alat tulis kantor									40.248.330,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									18.324.100,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.480.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan bahan logistik kantor									36.840.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan makanan dan minuman									64.660.000,00	Kec. Kurun			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									112.000.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									325.683.252,00	Kec. Kurun			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									167.500.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tampang *)									2.025.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tampang *)									7.300.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tampang *)									1.700.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tampang *)									11.712.642,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tampang *)									4.950.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Tampang *)									3.960.000,00	Kec. Kurun			
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tampang *)									6.360.000,00	Kec. Kurun			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Tampang *)									4.000.000,00	Kec. Kurun			

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikatiff	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Tampang*)									10.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tampang*)									2.188.550,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kurun*)									1.350.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kurun*)									6.800.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Kurun*)									1.320.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kurun*)									10.336.920,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kurun*)									1.642.300,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kurun*)									3.300.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kurun*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Kurun*)									4.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan Kurun*)									-		Kec. Kurun		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Kurun*)									12.600.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kurun*)									2.643.080,00		Kec. Kurun		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								283.438.592,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									67.600.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan perlengkapan gedung kantor									74.800.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan mebelkur									-		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.445.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									66.480.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									13.350.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Tampang*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tampang*)									17.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Tampang*)									1.740.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tampang*)									1.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kurun*)									23.600.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan mebelkur Kelurahan Kurun*)									5.200.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Kurun*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kurun*)									1.903.592,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kurun*)									1.920.000,00		Kec. Kurun		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								33.330.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									28.290.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Kurun*)									5.040.000,00		Kec. Kurun		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								32.000.000,00		Kec. Kurun		
	Simbangan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									32.000.000,00		Kec. Kurun		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								23.720.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kaitar realisasi kinerja SKPD									3.150.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.670.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									3.200.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan RKAR/KA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									4.650.000,00		Kec. Kurun		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Parangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)													
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)											9.750.000,00	Kec. Kurun	
	Program Pembinaan Daerah Berwawasan *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan											132.080.100,00	Kec. Kurun	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damangkepaka adat *)											17.810.000,00	Kec. Kurun	
	Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantu Adat Kelurahan Kurun *)											3.300.000,00	Kec. Kurun	
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)											27.000.000,00	Kec. Kurun	
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan Kurun *)											63.000.000,00	Kec. Kurun	
	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan *)											21.385.000,00	Kec. Kurun	
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	terselenggaranya kegiatan PKK, terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi m											219.223.900,00	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)											55.529.900,00	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandang *)											51.180.000,00	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)											51.870.000,00	Kec. Kurun	
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandang Intan Kahanan *)											-	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada kegiatan STQ *)											60.650.000,00	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan Kelurahan Tampang *)											10.656.000,00	Kec. Kurun	
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan Kelurahan Kurun *)											19.348.000,00	Kec. Kurun	
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											8.000.000,00	Kec. Kurun	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)											8.000.000,00	Kec. Kurun	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran											484.566.600,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa surat menyurat											2.550.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											22.638.432,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan											80.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor											5.279.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan alat tulis kantor											22.666.600,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											2.400.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor											3.610.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor											8.000.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan peralatan rumah tangga											2.715.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan bahan logistik kantor											6.255.000,00	Kec. Tewah	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah											24.000.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran											199.306.189,00	Kec. Tewah	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)											117.600.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)											1.005.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)											2.400.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)											931.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)											3.108.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)											1.821.200,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)											1.050.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)											8.000.000,00	Kec. Tewah	
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)											1.800.000,00	Kec. Tewah	

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Praktisan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)													(4)		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)											4.060.000,00			Kec. Tewah	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)											12.560.000,00			Kec. Tewah	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis (Perkantoran Kelurahan*)											25.381.800,00			Kec. Tewah	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat				142.380.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor											7.860.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan perabotan rumah jabatan/dinas											8.740.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan peralatan gedung kantor											8.880.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan mebelkur											6.080.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan											3.080.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											8.130.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											62.560.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor											4.750.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *)											5.000.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)											1.000.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (kelurahan*)											2.500.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan Pagel dan Penataan Halaman Gedung Laboran/Tunah Kelurahan**)											34.000.000,00			Kec. Tewah	
	Program peningkatan disiplin aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS				22.000.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu											15.750.000,00			Kec. Tewah	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kelurahan*)											6.300.000,00			Kec. Tewah	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi				8.000.000,00			Kec. Tewah	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan											8.000.000,00			Kec. Tewah	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Tertakannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses				20.280.000,00			Kec. Tewah	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											17.620.000,00			Kec. Tewah	
	Penyusunan pelaporan keuangan semederan											210.000,00			Kec. Tewah	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun											450.000,00			Kec. Tewah	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)											2.100.000,00			Kec. Tewah	
	Program Pembinaan Daerah Bawahahan *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan				80.388.000,00			Kec. Tewah	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)											18.280.000,00			Kec. Tewah	
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Lei Adat Kelurahan *)											2.108.000,00			Kec. Tewah	
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)											60.000.000,00			Kec. Tewah	
	Program pembinaan sosial, kesgamaan dan kemasayarakatan *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					terselenggaranya kegiatan PKK, terselenggaranya kegiatan keanggotaan bagi m				64.610.000,00			Kec. Tewah	
	Pembinaan kepada kegiatan keagamaan *)											31.400.000,00			Kec. Tewah	
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasayarakatan *)											18.650.000,00			Kec. Tewah	
	Penyelenggaraan kegiatan kemasayarakatan *)											8.400.000,00			Kec. Tewah	
	Pemeliharaan kegiatan gotong royong Kelurahan *)											5.160.000,00			Kec. Tewah	
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									2.770.960,00			Kec. Tewah	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)											2.770.960,00			Kec. Tewah	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				634.310.000,00			Kec. Kahut	
	Pemediaan jasa surge menyurat											1.850.000,00			Kec. Kahut	
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											7.500.000,00			Kec. Kahut	
	Pemediaan jasa administrasi keuangan											63.288,00			Kec. Kahut	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.150.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan alat tulis kantor									35.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									6.360.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									4.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									38.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan bahan logistik kantor									19.800.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan makanan dan minuman									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									24.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									50.072.308,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									210.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									840.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									2.363.196,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									8.877.500,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									4.200.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.600.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									37.500.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									47.542.000,00		Kec. Kahut		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					131.400.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									20.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala peribatas gedung kantor									8.400.000,00		Kec. Kahut		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									50.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *)									3.500.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan *)									2.500.000,00		Kec. Kahut		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					32.000.000,00		Kec. Kahut		
	(Kursus singkat non formal *)									32.000.000,00		Kec. Kahut		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sec					4.800.000,00		Kec. Kahut		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									4.800.000,00		Kec. Kahut		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan					33.280.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat kerja Camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									8.280.000,00		Kec. Kahut		
	Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan PKK dan Dharma Wanita Persatuan, kegiatan keagama					71.740.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									25.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									6.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									13.740.000,00		Kec. Kahut		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					558.300.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa surat menyurat									2.805.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									8.300.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									79.258,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan alat tulis kantor									27.888.000,00		Kec. Sepang		

NO	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maje	Keterangan	
					Kasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Penyediaan barang cebakan dan penggandaan									8.735.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									4.600.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									58.100.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan logistik kantor									21.500.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan makanan dan minuman									14.250.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									48.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									184.508.424,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									50.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)									4.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									450.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									2.400.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									7.105.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan barang ceakan dan penggandaan Kelurahan *)									2.730.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									18.760.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.400.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									4.000.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									15.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									50.327.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					83.495.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									7.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									20.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									31.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									18.870.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan *)									4.125.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan *)									2.500.000,00		Kec. Sepang		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi					32.000.000,00		Kec. Sepang		
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									32.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					7.500.000,00		Kec. Sepang		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja SKPD									3.270.000,00		Kec. Sepang		
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun									4.310.000,00		Kec. Sepang		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya					33.750.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									4.750.000,00		Kec. Sepang		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									24.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan festival tadarok bingkai kecamatan sepang dalam rangka					63.050.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									21.200.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									33.620.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									3.440.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									4.790.000,00		Kec. Sepang		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Masi	Keterangan	
					Hasil Program		Keuangan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						452.798.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa surat menyurat									2.890.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									9.088.360,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									128.120,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									8.014.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan alat tulis kantor									32.998.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									7.200.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan bahan logistik kantor									41.400.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan makanan dan minuman									13.500.000,00		Kec. Manuhing		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									27.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									101.435.616,00		Kec. Manuhing		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									102.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									517.356,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									2.765.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									19.048.260,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									2.700.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									2.600.040,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									5.040.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)									9.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									5.400.000,00		Kec. Manuhing		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									20.400.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									47.702.808,00		Kec. Manuhing		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						187.700.000,00		Kec. Manuhing	
	Pembangunan rumah jabatan									63.600.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									19.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									19.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									17.800.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									31.300.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									11.600.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan *)									4.500.000,00		Kec. Manuhing		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan *)									1.900.000,00		Kec. Manuhing		
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan**)									60.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						18.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									18.000.000,00		Kec. Manuhing		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses						5.700.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									5.400.000,00		Kec. Manuhing		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kelurahan*)									300.000,00		Kec. Manuhing		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan						45.800.000,00		Kec. Manuhing	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									12.800.000,00		Kec. Manuhing		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									33.000.000,00		Kec. Manuhing		

NO	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keturan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							terselenggaranya kegiatan PKK dan Dama Wanita Persatuan, kegiatan keagamaan	127.582.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									23.850.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *)									38.450.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									40.900.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									4.685.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									19.997.000,00		Kec. Manuhing		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	605.983.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa surat menyurat									4.846.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									4.800.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.791.800,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									8.372.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan alat tulis kantor									31.840.714,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									10.856.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									6.046.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									57.600.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan bahan bolak kantor									36.808.000,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									32.600.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									221.807.136,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									127.500.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									2.844.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									1.200.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									1.219.250,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									9.682.200,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									562.200,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)									2.000.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan bahan bolak kantor Kelurahan *)									6.160.000,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									38.000.000,00		Kec. Rungan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	63.250.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									7.600.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.000.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									16.020.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									23.600.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									8.730.000,00		Kec. Rungan		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan *)									2.000.000,00		Kec. Rungan		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	16.120.000,00		Kec. Rungan		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									16.120.000,00		Kec. Rungan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi	36.000.000,00		Kec. Rungan		
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									36.000.000,00		Kec. Rungan		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, teraksasi	89.700.000,00		Kec. Rungan		
	Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan lomba desa) *)									-		Kec. Rungan		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									53.700.000,00		Kec. Rungan		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									36.000.000,00		Kec. Rungan		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							terselenggaranya kegiatan PKK, terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi masyarakat	127.760.000,00		Kec. Rungan		

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keberangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									46.740.000,00		Kec. Rungan		
	Perhelaksanaan Safari Ramadhan dan Safari Natal *)									11.520.000,00		Kec. Rungan		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									48.100.000,00		Kec. Rungan		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									23.400.000,00		Kec. Rungan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		519.615.100,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa surut menyurat									2.400.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									4.320.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									2.136.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor									14.888.464,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									3.037.600,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									3.090.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									8.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor									12.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									16.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									177.894.828,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									177.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa surut menyurat Kelurahan *)									1.200.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									1.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									3.181.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									11.048.800,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									1.620.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									7.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.280.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									8.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									12.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)									80.342.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		237.465.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pembangunan rumah dinas									200.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									14.380.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									13.480.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									4.890.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)									2.090.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)									2.726.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi		34.090.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Masing studi banding/kursus singkat non formal *)									34.090.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Tertaksatannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses		9.890.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									9.890.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan		33.493.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									6.610.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *)									2.793.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									24.090.000,00		Kec. Mihing Raya		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							terselenggaranya kegiatan PKK dan Darma Wanita Persatuan, kegiatan keagamaan	38.887.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									18.290.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan *)									5.535.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									3.967.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									5.315.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyelenggaraan kegiatan pokong royong Kelurahan *)									5.795.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.100.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)									2.100.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.827.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan jasa surut menyurat									4.500.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									38.680.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									2.775.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan alat tulis kantor									25.114.500,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									6.500.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									1.970.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan bahan kostik kantor									13.200.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan makanan dan minuman									15.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									45.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									147.398.424,00		Kec. Rungan Hulu		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									185.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan jasa surut menyurat Kelurahan *)									600.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									1.420.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									6.530.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									1.800.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									13.655.864,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan bahan kostik kantor Kelurahan *)									4.890.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)									1.350.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									8.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									15.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									73.649.212,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program Peningkatan Barana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah barang prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	45.580.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									5.580.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									15.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD *)									25.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi	44.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Mengajar studi banding/kursus singkat non formal *)									44.000.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	12.510.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan (k)rtisar realisasi kinerja SKPD									10.070.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									870.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									470.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									1.360.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya	40.830.000,00		Kec. Rungan Hulu		

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									8.900.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *)									2.630.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									30.650.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							berselegramnya kegiatan PKK, berselegramnya kegiatan keagamaan bagi m	45.550.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									20.360.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan Kabupaten *)									12.550.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pembinaan kepada kegiatan PSK Kelurahan *)									2.820.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									5.540.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Penyelenggaraan kegiatan otong royong Kelurahan *)									3.280.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.400.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Pelebaran Administrasi Terpadu Kecamatan (PATENI) *)									1.600.000,00		Kec. Rungan Hulu		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	679.766.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa surat menyurat									3.300.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									2.010.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									4.200.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan alat tulis kantor									28.616.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									4.350.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan bahan logistik kantor									59.700.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan makanan dan minuman									16.030.690,00		Kec. Damang Batu		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									12.000.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									151.598.424,00		Kec. Damang Batu		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									235.000.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									750.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									1.200.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan *)									1.705.960,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									6.715.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									1.350.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									16.800.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									6.400.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)									3.860.000,00		Kec. Damang Batu		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									4.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									20.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									101.115.616,00		Kec. Damang Batu		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	83.430.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									9.100.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									6.490.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									20.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									12.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									9.540.000,00		Kec. Damang Batu		
	Pembuatan Sumur Gali dan Pompa *)									26.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi	36.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									36.600.000,00		Kec. Damang Batu		
	Program Pembinaan Daerah Bawah *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan	29.226.000,00		Kec. Damang Batu		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									4.500.000,00		Kec. Damang Batu		

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)														
	Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantr Adat Kelurahan *)										1,430,000,00		Kec. Damang Batu		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										22,886,000,00		Kec. Damang Batu		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan peningkatan peran serta wanita			87,000,000,00		Kec. Damang Batu		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										23,520,000,00		Kec. Damang Batu		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)										18,650,000,00		Kec. Damang Batu		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)										14,830,000,00		Kec. Damang Batu		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			657,413,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan jasa surat menyurat										7,582,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor										24,561,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										8,625,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										41,500,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor										36,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan makanan dan minuman										6,400,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										28,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										99,320,816,00		Kec. Manuhing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										885,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)										1,589,384,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										936,500,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										9,548,692,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										1,462,500,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)										14,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										9,050,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										4,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										37,500,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										49,317,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat			128,340,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan										11,776,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas										8,880,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										12,784,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										20,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										36,000,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										7,700,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pengadaan Bangunan Tambahan Gedung Kantor *)										25,800,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)										2,100,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)										6,600,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi			24,600,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										24,600,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses			3,850,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										3,850,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan			31,505,000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Rapat kerja Camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										4,505,000,00		Kec. Manuhing Raya		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target				
(1)	(2)								(4)					
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									27.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terkunjungnya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Keb. Gumas dan tersus	14.266.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	(Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									13.350.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	(Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandang *)									19.140.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	(Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *)									1.795.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							monev dari pelayanan perijinan	13.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)									13.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.231.636,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan jasa surut menyurat)									1.740.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan jasa administrasi keuangan)									100.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan jasa keberagaman kantor)									3.370.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan alat tulis kantor)									12.935.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan barang cetakan dan penggandaan)									6.400.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor)									11.795.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan bahan logistik kantor)									58.216.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)									20.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran)									160.338.424,00		Kec. Miri Manasa		
	(Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									152.400.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan jasa surut menyurat Kelurahan *)									800.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan jasa keberagaman kantor Kelurahan *)									888.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									3.410.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									830.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									14.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									20.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)									75.529.212,00		Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	238.963.364,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan peralatan gedung kantor)									12.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/kecamatan/Gumas **)									24.220.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan rutin/berkala mobil labatan)									19.889.313,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)									26.560.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor)									20.236.273,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									16.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Rehabilitasi Gedung Pertemuan Umum *)									105.125.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)									5.832.788,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)									5.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pemeliharaan Sumur Gali dan Pompa *)									5.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan Body Kotak Dinas Kecil *)									7.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	13.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya)									9.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan*)									4.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui simtek & sosialisasi	36.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	(Monev studi banding/kursus singkat non formal *)									36.000.000,00		Kec. Miri Manasa		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)																(4)
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									13.300.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Rapat kerja camat, kadeslurah dan dangkepala adat *)										7.300.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Pemilihan perangkat desa *)										14.000.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										12.000.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									22.600.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										22.600.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									33.725.000,00			Kec. Miri Manasa			
	[Pembinaan Poskudima *)										33.725.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.200.000,00			Kec. Miri Manasa			
	[Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEM) *)										1.200.000,00			Kec. Miri Manasa			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									644.203.948,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan jasa surat menyurat										4.500.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										360.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan alat tulis kantor										28.630.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										10.760.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										3.785.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										65.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan bahan logistik kantor										23.640.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										32.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										249.314.040,00			Kec. Rungan Barat			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										125.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)										6.755.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										1.200.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)										3.764.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										11.285.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										2.447.100,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)										1.410.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										9.730.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										30.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)										45.844.808,00			Kec. Rungan Barat			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									71.200.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas										4.800.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Penyediaan perlengkapan gedung kantor										37.300.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										7.600.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										20.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										9.700.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor										2.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									36.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Sibinghan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										36.000.000,00			Kec. Rungan Barat			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.800.000,00			Kec. Rungan Barat			
	[Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										1.800.000,00			Kec. Rungan Barat			

NO	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan							
					Hasil Program		Ketepatan Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3				
(1)	(3)																			(4)
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											27.760.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)												6.000.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)												21.760.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											67.550.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan masyarakat *)												16.460.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Penyelenggaraan Safari Ramadhan dan Safari Natal *)												32.660.000,00			Kec. Rungan Barat				
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)												18.550.000,00			Kec. Rungan Barat				
4.02	Bidang Pengawasan																			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											905.473.494,00			Inspektorat				
	Penyediaan jasa surut memuat												2.400.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												45.000.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan jasa keberagaman kantor												11.500.150,00			Inspektorat				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												33.881.800,00			Inspektorat				
	Penyediaan alat tulis kantor												60.184.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan barang cetakan dan pencetakan												60.000.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												7.031.100,00			Inspektorat				
	Penyediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan												8.690.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan bahan kostik kantor												18.000.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan makanan dan minuman												19.690.000,00			Inspektorat				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah												264.000.000,00			Inspektorat				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran												378.490.444,00			Inspektorat				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)												65.000.000,00			Inspektorat				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											257.583.250,00			Inspektorat				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor												12.000.000,00			Inspektorat				
	Pengadaan peralatan gedung kantor												121.000.000,00			Inspektorat				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												40.000.000,00			Inspektorat				
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												30.000.000,00			Inspektorat				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional												53.863.250,00			Inspektorat				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											38.305.000,00			Inspektorat				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya												38.305.000,00			Inspektorat				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											270.000.000,00			Inspektorat				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan												270.000.000,00			Inspektorat				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											54.920.000,00			Inspektorat				
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran												2.000.000,00			Inspektorat				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												900.000,00			Inspektorat				
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)												12.000.000,00			Inspektorat				
	Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *)												40.000.000,00			Inspektorat				
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian mutu	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											2.048.390.000,00			Inspektorat				
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala												877.500.000,00			Inspektorat				
	Perangan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah												135.000.000,00			Inspektorat				
	Tindak lanjut hasil temuan hasil pengawasan												300.400.000,00			Inspektorat				
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan												120.000.000,00			Inspektorat				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Evaluasi LAKIP *)								56.790.000,00		Inspektoral			
	Revisi RKA-SKPD *)								56.400.000,00		Inspektoral			
	Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)*)								97.300.000,00		Inspektoral			
	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)*)								45.850.000,00		Inspektoral			
	Pengawasan Dana Desa *)								400.000.000,00		Inspektoral			
	Penyelenggaraan Rencana Aksi Pencegahan korupsi *)								57.000.000,00		Inspektoral			
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tekelolanya aparatur wecara terbit dan sesuai dengan aturan				20.000.000,00		Inspektoral			
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi *)								20.000.000,00		Inspektoral			
4/03	Bidang Perencanaan													
	Program Kerjasama Pembangunan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen hasil kerjasama pembangunan				328.688.000,00		BP3D/Bappeda			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan								60.000.000,00		BP3D/Bappeda			
	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *)								218.120.000,00		BP3D/Bappeda			
	Pemanfaatan Sistem Database Dukung Kebijakan Nasional (SDDKN) *)								44.478.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya data informasi promosi daerah & investasi, buku profil ekonomi				376.435.000,00		BP3D/Bappeda			
	Rapat Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi*)								68.600.000,00		BP3D/Bappeda			
	Pengembangan promosi daerah dan investasi *)								69.100.000,00		BP3D/Bappeda			
	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah *)								56.600.000,00		BP3D/Bappeda			
	Monitoring ke perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas *)								32.100.000,00		BP3D/Bappeda			
	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas *)								30.200.000,00		BP3D/Bappeda			
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BUMD di Kabupaten Gunung Mas *)								13.695.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							25.400.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								20.400.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Tampang*)								2.650.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Kurun*)								2.350.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							20.619.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								17.144.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)								3.475.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							11.856.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								10.600.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)								1.256.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							12.600.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								9.320.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)								3.280.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							16.860.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								12.250.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)								3.610.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							22.669.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								22.669.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							9.714.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD								6.220.000,00		BP3D/Bappeda			
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)								3.494.000,00		BP3D/Bappeda			
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							9.490.000,00		BP3D/Bappeda			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									7.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *)									2.490.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								13.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									13.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								11.210.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									8.740.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *)									2.470.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								11.080.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									7.750.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *)									3.330.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								12.375.092,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									3.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *)									2.775.092,00		BP3D/Bappeda		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.656.884.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa surat menyurat									4.817.100,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									152.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									14.126.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan alat tulis kantor									39.414.500,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									78.450.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									25.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan bahan bacaan dan perbaikan perundang-undangan									20.250.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan bahan logistik kantor									97.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan makanan dan minuman									20.025.000,00		BP3D/Bappeda		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									380.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									670.782.500,00		BP3D/Bappeda		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									85.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		365.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									91.295.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									19.905.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									80.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									120.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									45.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS		86.040.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									86.040.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi		160.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									160.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai		37.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD									25.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									4.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									8.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program pengembangan data/informasi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi						Tersedianya data dan informasi pembangunan		501.195.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan									136.185.000,00		BP3D/Bappeda		
	Monitoring dan evaluasi pembangunan *)									48.650.000,00		BP3D/Bappeda		

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) *)									173.960.000,00		BP3D/Bappeda		
	Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah *)									80.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan Data Informasi Pembangunan Berbasis WEB *)									48.200.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan dan Pengumpulan Data SIPD *)									18.330.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan C	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan wilayah						319.800.200,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian rencana tata ruang daerah *)									82.738.200,00		BP3D/Bappeda		
	Pembangunan pelaksanaan program percepatan sanitasi permukiman *)									78.750.000,00		BP3D/Bappeda		
	Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat *)									158.320.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								79.940.000,00		BP3D/Bappeda		
	Perencanaan peningkatan perumahan *)									79.940.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah						871.529.200,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan rancangan RPJMD									103.309.400,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									273.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penetapan RKPD									44.859.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan desa *)									59.919.800,00		BP3D/Bappeda		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah *)									48.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Penyusunan Renja SKPD *)									31.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan RAPBD oleh TAPD *)									146.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran APBD/DAK/Tugas Pembantuan *)									51.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan dan Revisi dan Perubahan DPA-SKPD *)									13.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Penyusunan Pra-RKA SKPD *)									20.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Simda Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas *)									77.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang ekonomi						284.046.900,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi *)									89.636.900,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan indikator Makro Daerah melalui KONREG PDRB *)									24.750.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan masterplan UMKM *)									86.280.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan *)									63.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang prasarana & SOA						66.100.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup *)									66.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program Pengendalian Infrastruktur *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya data pengendalian infrastruktur						173.190.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian pembangunan infrastruktur *)									173.190.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program penelitian dan pengembangan IPTEK *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Dokumen hasil penelitian dan pengembangan IPTEK						579.425.000,00		BP3D/Bappeda	
	Peningkatan peran dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan *)									40.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan *)									189.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Sistem Invesas Daerah (SIDa) di Kabupaten Gunung Mas *)									97.400.000,00		BP3D/Bappeda		

NO	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Page Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)									(4)				
	Pengembangan dan penguatan kelembagaan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan *)									51.625.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengembangan dan penguatan kelembagaan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi *)									51.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Metropolitan *)									140.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang sosbud					230.950.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya *)									118.650.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *)									16.800.000,00		BP3D/Bappeda		
	Strategi Penanggulangan Komiskinikn Daerah Kabupaten Gunung Mas *)									38.150.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Forum Koordinasi CSR *)									57.350.000,00		BP3D/Bappeda		
4.01	Bidang Keuangan													
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			tersedianya data inventarisasi dan data penataan aset kantor					13.050.000,00		BPPRD		
	(Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *)									13.050.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								6.370.000,00		BPPRD		
	(Penyusunan RKBU dan RKPBU *)									6.370.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.350.000,00		BPPRD		
	(Penataan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD *)									2.350.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								4.300.000,00		BPPRD		
	(Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)									4.300.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								20.000.000,00		BPPRD		
	(Inventarisasi dan penataan aset barang daerah *)									20.000.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								83.850.000,00		BPPRD		
	(Sosialisasi Pertanggungjawaban Dana Desa *)									83.850.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								48.410.100,00		BPPRD		
	(Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)									48.410.100,00		BPPRD		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.364.008.330,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.200.000,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									168.980.400,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									650.000,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									24.613.300,00		BPPRD		
	Penyediaan alat tulis kantor									142.438.450,00		BPPRD		
	Penyediaan barang cetakan dan pengoperasian									159.000.000,00		BPPRD		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									27.650.500,00		BPPRD		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penuntang-undangan									6.930.000,00		BPPRD		
	Penyediaan bahan logistik kantor									132.000.000,00		BPPRD		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									268.000.000,00		BPPRD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									821.467.488,00		BPPRD		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									128.000.000,00		BPPRD		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					270.983.000,00		BPPRD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									28.132.000,00		BPPRD		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									63.000.000,00		BPPRD		
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor									15.431.000,00		BPPRD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikator	Problema Maja	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									28.600.000,00		BPPRD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									84.600.000,00		BPPRD		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									84.900.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								44.100.000,00		BPPRD		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									44.100.000,00		BPPRD		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								112.600.000,00		BPPRD		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									112.600.000,00		BPPRD		
	Program peningkatas pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								43.620.000,00		BPPRD		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD									22.200.000,00		BPPRD		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									3.720.000,00		BPPRD		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									17.100.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.419.883.000,00		BPPRD		
	Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak dan Retribusi Daerah *)									122.600.000,00		BPPRD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas *)									154.825.000,00		BPPRD		
	Operasi Sisi Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan *)									102.600.000,00		BPPRD		
	Penyampaian SPRT PBB *)									384.300.000,00		BPPRD		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD *)									109.288.800,00		BPPRD		
	Penyusunan RKBU dan RKPBU *)									19.383.400,00		BPPRD		
	Rekonsiliasi Pendapatan Daerah *)									114.600.000,00		BPPRD		
	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB *)									152.600.000,00		BPPRD		
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah *)									84.600.000,00		BPPRD		
	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *)									55.600.000,00		BPPRD		
	Pemutakhiran dan Verifikasi Data BPHTB *)									60.600.000,00		BPPRD		
	Rapat-rapat Koordinasi regional PBB *)									36.600.000,00		BPPRD		
	Penyusunan Laporan Semesteran Pendapatan Daerah *)									9.248.000,00		BPPRD		
	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Akhir Tahun *)									9.248.000,00		BPPRD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi PBB *)									316.876.000,00		BPPRD		
	Intensifikasi dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah *)									157.600.000,00		BPPRD		
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan PPh OPD/PPH Pasal 21 *)									116.600.000,00		BPPRD		
	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah *)									69.600.000,00		BPPRD		
	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi *)									45.600.000,00		BPPRD		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.208.478.390,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa surat menyurat									28.280.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									399.620.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									760.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									24.612.338,00		BPKAD		
	Penyediaan alat tulis kantor									143.693.000,00		BPKAD		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									66.420.000,00		BPKAD		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									12.785.000,00		BPKAD		

NO	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Kebaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									18.600.000,00		BPKAD		
	Penyediaan bahan logistik kantor									128.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan makanan dan minuman									18.738.000,00		BPKAD		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									888.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									895.838.060,00		BPKAD		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									45.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum *)									58.845.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU *)									96.000.000,00		BPKAD		
	Penataan Administrasi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *)									15.000.000,00		BPKAD		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					2.970.381.000,00		BPKAD		
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional **)									1.584.443.000,00		BPKAD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									38.000.000,00		BPKAD		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									74.500.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									20.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									154.600.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									58.400.000,00		BPKAD		
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									488.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD *)									202.950.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *)									175.488.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum *)									77.000.000,00		BPKAD		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									80.000.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					87.600.000,00		BPKAD		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									87.600.000,00		BPKAD		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					200.000.000,00		BPKAD		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									200.000.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses					208.000.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									10.040.000,00		BPKAD		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									8.760.000,00		BPKAD		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									9.680.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Rencana Kerja SKPD *)									16.160.000,00		BPKAD		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan CPA/DPPA - SKPD *)									23.500.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Triwulanan Kabupaten Gunung Mas *)									89.000.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Gunung Mas *)									28.620.000,00		BPKAD		
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)									12.960.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									17.400.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui perda pajak daerah dan retri					4.628.673.894,00		BPKAD		
	Penyusunan standar satuan harga									89.400.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD									126.520.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD									66.520.000,00		BPKAD		

NO	Urusan/Tidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(5)				
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD									114.620.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD									66.520.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perundang-undangan pelaksanaan APBD									173.200.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perundang-undangan pelaksanaan APBD									55.000.000,00		BPKAD		
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah									219.627.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas *)									67.200.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah *)									172.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan RKBU dan RKPELU *)									14.400.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan semester aset/barang daerah *)									73.800.000,00		BPKAD		
	Reformulasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah *)									52.800.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas *)									96.000.000,00		BPKAD		
	Pelayanan Pemeliharaan SP2D Pelaksanaan APBD *)									30.200.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas *)									67.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS *)									23.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS Perubahan *)									23.800.000,00		BPKAD		
	Pelayanan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas Pelaksanaan APBD *)									50.500.000,00		BPKAD		
	Pengelolaan Kas Daerah *)									194.000.000,00		BPKAD		
	Pengelolaan Gaji PNS *)									114.650.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *)									65.500.000,00		BPKAD		
	Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat Sinda Kabupaten Gunung Mas *)									85.082.000,00		BPKAD		
	Peningkatan kualitas perangkat/persediaan Server dan Jaringan Aplikasi Sinda Kabupaten Gunung Mas *)									363.300.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi realisasi pembayaran gaji PNS *)									37.000.000,00		BPKAD		
	Peningkatan pelayanan Tertutup Berbandarhan dan Turunan Ganti Ruel (TPTGR) *)									95.500.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) *)									181.300.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan Rekapitulasi Rincian dan Komposisi PNS untuk pengalokasian DAK *)									58.710.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitulasi Perhitungan Final Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaji PNS se Kabupaten Gunung Mas *)									54.200.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Sinda Keuangan *)									200.500.000,00		BPKAD		
	Penghapusan Barang Milik Daerah *)									124.500.000,00		BPKAD		
	Pertanian Barang Milik Daerah *)									160.500.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah *)									137.770.000,00		BPKAD		
	Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatruhan Persewaan Kabupaten Gunung Mas *)									120.400.000,00		BPKAD		
	Peningkatan dan Penyempaian Informasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan SKD *)									81.200.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tim Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)									71.100.000,00		BPKAD		
	Integrasi Perusahaan BMD *)									61.000.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan *)									138.600.000,00		BPKAD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program			Pagu Indikatif	Praktisi Maju	Keterangan	1/2/1		Jenis Kegiatan
					Hasil Program						1/2/2		
					Target	Tidak Utkur	Target				Target	Tidak Utkur	
							3.200.000,00						
							2.672.000,00						
							2.970.000,00						
							4.500.000,00						
							17.040.000,00						
							5.400.000,00						
							45.280.200,00						
							203.000.000,00						
							69.000.000,00						
							69.000.000,00						
							109.000.000,00						
							1.672.000.000,00						
							1.672.000.000,00						
							221.544.000,00						
							160.544.000,00						
							84.000.000,00						
							1.863.604.800,00						
							42.200.000,00						
							126.500.000,00						
							492.000.000,00						
							7.500.000,00						
							89.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							126.000.000,00						
							39.000.000,00						
							32.000.000,00						
							67.000.000,00						
							27.000.000,00						
							29.000.000,00						
							29.000.000,00						
							126.000.000,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						
							49.000.000,00						
							639.104.800,00						

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2019.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Pertumbuhan PDRB (%)	6,9	7	7,15	7,2	6,41	6,96	7,00	
Laju Inflasi (%)	7,8	6,9	6,4	5,1				
Kenaikan PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (%)	19,26	26,78	27,98	29,12	6,41	6,96	7,00	
Angka Kemiskinan (%)	6,45	6,2	5,93	5,67	6,70	6,17	5,85	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,00%	7,00%	5,00%	4,00%	1,20%	2,70%		
Indeks Pembangunan Manusia (%)	74,42	74,89	74,99	75,03	68,13	69,24	69,73	
Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun				5.238.760	9.965	10.044	10.155	
Jumlah PDRB Perkapita/Tahun				1 buku (Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas	3.378.383,3	3.776.970,5	4.231.787,5	
Angka Pengangguran				58	68,13	69,24	69,73	
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Angka melek huruf (%)	99,79	99,89	99,99	99,99	99,73	99,53	99,95	
Angka Partisipasi Kasar								
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	43	50	57	60				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	115	115	100	100	120,48	120,19	116,41	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	90	90	90	90	90,8	89,17	100,99	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	55	65	70		49,33	67,29	61,15	
Angka Pendidikan yang ditamatkan								
Angka Partisipasi Murni								
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,65	99,75	99,75	99,75	99,34	103,3	95,84	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75	80	85	90	63,35	66,64	65,64	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	40	60	75		47,26	47,69	36,49	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Pendidikan dasar								
SD/MI								
Perbandingan Siswa dan Guru SD/MTs	11,15	10,20	9,12	8,16	1 : 13	1 : 10	1 : 11	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	100	100	100	100	89,63	110,59	110,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:22	1:22	1:22	1:22		14:09	0:00	
SMP/MTs								
Perbandingan siswa dan guru SMP/MTs	9,27	8,67	7,67	7,67	1 : 15	1 : 10	1 : 12	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	98	98	98	98		96,44	97,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:27	1:27	1:27	1:27		2:52	0:00	
Pendidikan Menengah								
Rasio siswa terhadap guru	12,25	12,12	12		1 : 11	1 : 13	1 : 16	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	82	83	83			55,07	41,44	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:36	1:36	1:36			3:21	0:00	
Fasilitas Pendidikan								
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	45,00	50,00	60,00	70,00		22,87	23,61	
Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35,00	45,00	50,00	60,00		15,06	17,58	
Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	98,00	99,00	100,00			24,32	30,4	
Angka Harapan Lama Sekolah								
Angka Harapan Lama Sekolah				12 Thn	10,82	11,44	11,74	
Rata-rata Lama Sekolah				9 Thn	8,74	8,99	8,94	
Angka Putus Sekolah								
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	21,00%	69,00%	89,00%	
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	0,30%	0,30%			337,00%	47,00%	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,00	40,00	50,00	60,00		66,42	77,23	
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,00	85,00	87,00	90,00		76,08	82,98	
Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	90,00	92,00			76,82	98,62	
Angka Kelulusan								
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100		97,32	97,69	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100		96,63	97,79	
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100			99,54	97,95	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100		93,16	85,43	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99	99	99			85,69	84,35	
Kesehatan								
Angka Kelangsungan hidup Bayi	90	91	92	93	90	86,86	92	93,79
Angka Usia Harapan Hidup	70,1	70,1	71	71	72	72	72	72
Angka GBI Buruk (%)	8	7	6	8	4	3	3	3
Angka kematian Ibu	119	106	102	241/100.000 KLM	247	159	223	103/100.000 KLM
Angka Kematian Bayi	15	15	13	8/1.000 KLM	9	10	7	8/100 KLM
Angka Kesakitan				43.980				
Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 11.590	140 : satuan balita tahun 2015	145 : satuan balita tahun 2016	145 : satuan balita tahun 2017	141 : 9.140	141 : 9.188	142 : 10.619	140 : 9.975
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	85 : 130.305	87 : penduduk Tahun 2015	89 : penduduk Tahun 2016	90 : penduduk Tahun 2017	96 : 154.084	96 : 107.500	96 : 109.949	89 : 112.484
Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	1 : 130.305	1 : penduduk Tahun 2015	1 : penduduk Tahun 2016	1 : penduduk Tahun 2017	1 : 154.084	1 : 107.500	30 : 109.949	35 : 112.484
Rasio Dokter per satuan penduduk	26 : 130.305	27 : penduduk Tahun 2015	28 : penduduk Tahun 2016	29 : penduduk Tahun 2017	25 : 154.084	28 : 107.500	30 : 109.949	35 : 112.484
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	492 : 130.305	497 : penduduk Tahun 2015	507 : penduduk Tahun 2016	517 : penduduk Tahun 2017	435 : 154.084	508 : 107.500	864 : 109.949	592 : 112.484
Cakupan Puskesmas	1,41	1,41	1,45	1,45	100	100	100	100
Cakupan Pembantu Puskesmas	0,67	0,69	0,70	0,71	100	100	100	0,69
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4	95	95	96	96	91,09	89,11	90,57	90
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60	65	65	66	45,82	36,94	33,16	60,95

FOKUS/BIDANG URLUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92	93	94	95	87,67	85,86	86,86	86,73
Cakupan Ibu Nifas	92	95	95	96	87,87	87,56	88,8	90,03
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	80	82	82	39,88	31,02	16,88	52,23
Cakupan Kunjungan Bayi	92	95	95	96		91,3	92	
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	127	127	127	127		97	127	80,31
Cakupan pelayanan anak balita	92	95	95	96				80,26
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	95	95	95	100				
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	90	92	93	94	86,33	78,85	83,59	99,4
Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	60	62	62	64	106,49	54,28	49,5	101,95
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2/100	2/100	2/100	2/100	0	0	0	0
Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	100	100	100				0,21
Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	100	100	100	100				
Penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	0	0	1,82	140,46
Penemuan Penderita Demam	100	100	100	100		3216	1564	1152
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	30	35	40	45				
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1	0,1	0,1	0,1				
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100				0
Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis	7 Dokter spesialis	8 Dokter spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis + 1 Dokter Residence	5 Dokter spesialis + 1 Dokter Residence	8 Dokter spesialis
Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	50%	65%	75%	80%	50%	65%	61%	61%
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	60%	65%	75%	80%	60%	65%	138%	98%
Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type O	Type D
Cakupan Desa Slati Aktif	72	74	76	78				

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Penataan Ruang								
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	122.921,34	272.778,69	272.778,69	272.778,69	0,122	0,146	0,176	0,565
Luas Wilayah Kebanjaran (Ha)	87,00	78,00	60,50	60,50	87	21,5	300	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	40,00	89,00	113,00	127,00	7,412	7,114	7,436	7,450
Pekerjaan Umum								
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	15,294%	18,008%	20,940%	23,537%	15,375%	14,768%	20,096%	24,510%
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	45%	48%	54%	59%	45,50%	48%	56,60%	78%
Persentase Rumah Tinggal Bersantias	28%	34%	40%	45%	29%	39%	39%	39%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	4,31%	5,80%	7,51%	9%	9,98%	10,10%	19,76%	10,63%
Persentase penanganan sampah (%)	71%	78%	86%	90%	5,04%	4,51%	12,21%	12,21%
Rasio Rumah Layak Huni	15,300%	18,700%	21,100%	23,425%	18,037%	17,345%	25,855%	23,328%
Pemukiman Layak Huni (Ha)	917,00	926,00	938,00	947,00	4,906	6,856	6,856	6,909
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik				23,54%	-	-	-	24,510%
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik				5%	-	-	-	4,4%
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan				3 Desa	-	-	-	3 Desa
% Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih				3 Desa	-	-	-	3 Desa
% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik				15%	-	-	-	12,42%
Perumahan								
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Iwa)	11.404	12.190	12.940	13.690	3,149	3,397	3,721	14,844
Rumah Tangga Bersantias (%)	28%	34%	40%	45%	29%	39%	39%	39%
Rumah Layak Huni (unR)	18.400	18.620	18.810	18.900	23,504	23,659	35,267	26,241
% Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni				23,43%	-	-	-	23,328%
Pesertaan Ruang								
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,72%	5,75%	10,80%	16,10%	0,29%	0,46%	0,59%	0,81%
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	17,35%	19,35%	20,44%	26,15%	0,04%	0,98%	0,98%	0,98%
% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik				15%	-	-	-	15%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Perencanaan Pembangunan								
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	90%	90%	100%	100%				
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan luruhannya	90%	90%	100%	100%				
Jumlah Dokumen Perencanaan				100%				
Perhubungan								
Jumlah Bandara (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dermaga Sungai (buah)	2	1	1	-	2	1	-	-
Jumlah penumpang / barang melalui bandara								
- Jumlah penumpang (orang)	157	360	360	360	455	278	-	83
- Jumlah barang (kg)	221	360	360	360	821	908	-	458
Persentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas				10	-	-	-	33
Lingkungan Hidup								
Jumlah duta lingkungan (orang)	-	2 Orang	10 Orang	12 Orang		2 orang	2 orang	
Jumlah adiwiyata (sekolah)	2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah		4 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah
Pencemaran status mutu air	-	-	33,3%	66,7%	40%	38%	52%	35%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	40,1%	51,9%	63,0%	88,9%	37%	48%	58%	79%
Penegakan Hukum Lingkungan	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Perusahaan /Wejib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah				30%				73,3%
% Standar Baku Mutu Udara				30%				73,3%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	45	50	55	60				
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia				
Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	45	50	60	65				
Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	35	40	45	50				
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	55	60	65	70				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	11,26	11,48	11,70	11,93				
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	16,804	17,052	17,300	17,458				
Rasio KDRT	0,5%	0,5%	0,5%	1%	2 kasus	1 kasus	2 kasus	
Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	0	1%	1%	2%				
Indek Pemberdayaan Gender (IGD)				77,92				
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga (%)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,8	2,729	
Rasio Akseptor KB (orang)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Catupan Peserta KB Aktif (Orang)	16.727	18.400	20.240	22.264	19.151	15.625	14.594	
Jumlah PLKB Aktif (orang)	9	9	20	30	9	12	13	
Terpadunya program Kerja KB (program)	2	2	2	2	2	2	2	
tersedianya alokasi KB di Klinik (buah)	54	54	60	65	54	54	60	
Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	3	4	6	8	3	4	6	
Keluarga Pra Sejahtera I	18	18	18	18	-	-	16,5	
Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	25	35	45	55	-	-	135	
Jumlah kelompok tribina (kelompok)	33	38	45	55	-	-	36	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	2079	2379	2679	2979	2079	2143	-	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	1025	1225	1475	1703	724	-	-	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Jumlah KDRT (orang)	2	2	2	2	2	1	2	
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	2	7	5	5	-	-	-	
Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	11	7	7	7	-	9	9	
Jumlah balita ikut posyandu (anak)	9605	9715	9806	9923	-	-	-	
Jumlah PIK-R di SMP/SMAA/organisasi kepemudaan	18	18	25	30	-	18	68	
Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	0	0	1	1	-	-	-	
Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	0	0	2	3	-	-	-	
Sosial								
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	-	-	-	1				
PKKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%				
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	,86%	,86%	,86%	,86%				
Ketenagakerjaan								
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,9%	76,9%	76,9%	76,9%		77,44%		
Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,00%	7,00%	5,00%	4,00%	1,20%	2,70%		
Ketenagakerjaan								
Jumlah lulusan S1/S2/S3	1,363	1,363	1,363	1,363	1,373	1,380	1,372	1,399
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,70%	98,13%	98,7%	98,92%
Jumlah Tenaga Kerja S2, S3				0				
Koperasi dan UUM								
Koperasi Aktif (%)	77,92	78,6	79,91	81,22	40%	45%	50%	52%
Jumlah UMKM	2,943	2,955	2,967	2,982	2,9	2,922	2,93	2,943
Jumlah Industri	219	224	229	234				
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4	6	8	10				4
% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	4%	7%	9%	12%	20%	21%	25%	27%
% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat				61,18%				40,90%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Penanaman Modal								
Jumlah Investor PMDN dan PMA	116	118	120	132	116	118	120	42
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	75%	75%	75%	80%	75%	75%	75%	80%
Lamanya hari proses perizinan	10	10	10	10	10	10	10	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	72	75	77	79	72	72	70,25	79,06
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Investasi Daerah								
Kebudayaan								
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	1	1	1	0	0	1	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	1	1	1	1	1	9	12	
Kesenian								
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	1	1	1	1	26	26	26	
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	0	0	1	
Kepemudaan dan Olahraga								
Jumlah Klub Olahraga (buah)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Organisasi Pemuda	1	1	1	1				
Jumlah Organisasi Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1				
Jumlah Lapangan Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Pemuda Berprestasi				70%				
Jumlah Mandali				15 Buah				
Pariwisata								
Kunjungan Wisata	4.000	4.300	4.500	4.700	1100	1250	1600	9457
Jumlah objek wisata daerah	1	1	1	1				1
PDRD Sektor Pariwisata				70%				70%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	100%	100%	100%	100%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	
Kegiatan Pembinaan politik daerah	100%	100%	100%	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
Administrasi Pemerintahan								
Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	46	55	62	69				
Jumlah LHMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	564	570	580	590				
Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	132	137	142	147				
Penegakan PERDA	7	10	12	14				
Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian secara Online (%)	10	20	30	40				
Nilai Reformasi Birokrasi				65				
Nilai Sakip				B				
Opini BPK				WTP				
Level Kapabilitas				Level 2				Level 2
Level Maturitas				Level 2				Level 2
IKM				10				
Angka Kriminal				20				
Jumlah Konflik yang Diselesaikan				30				
Tingkat Pelanggaran Terhadap Perda				40				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	45 desa/kel	87 desa/kel	127 desa/kel	127 desa/kel	43	0	0	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat	0 desa/kel	24 desa/kel	48 desa/kel	72 desa/kel	0	24	48	72
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1	1	1	1
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	191 orang	247 orang	325 orang	383 orang	191	247	325	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TIG	0	0	1 desa/kel	2 desa/kel	1	4	8	4
Kearsipan								
Pengelolaan arsip secara baku :								
a. Umum	85	115	120	115				
b. Pemerintahan	75	90	110	115				
c. Politik	35	50	70	75				

FORUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Padi sawah (Kwintal/Ha)	33,5	33,83	34	45,66	33,77	35,39	22,71	
Padi ladang (Kwintal/Ha)	22,86	23,84	22,48	24	21,46	22,01	19,73	
Jagung (Ton/Ha)	19,54	23,5	24,68	25,66	27,27	27,08	25,42	
Produksi Tanaman Pangan								
Padi sawah (Ton)	2.550	2.757	3.128	4.976	2.070	1.918	2.133	
Padi ladang (Ton)	6.192	6.807	12.353	11.790	6.264	9.380	4.395	
Jagung (Ton)	57	62	64	66	30	325	150	
Populasi Ternak								
Kerbau (ekor)	120	130	150	165	191	341	152	
Sapi (ekor)	3.609	3.860	4.060	4.310	3.865	4.034	4.100	
Babi (ekor)	22.340	24.320	26.210	27.250	25.054	28.580	30.876	
Ayam buras (ekor)	66.560	68.450	69.750	70.820	69.540	76.830	78.751	
Ayam ras pedaging (ekor)	60.216	65.750	70.120	72.540	62.920	89.550	88.640	
Produksi Ternak								
Kerbau (Ton)	1,8	2,2	2,4	2,6	2	4,55	5,749	
Sapi (Ton)	82	84	87	90	83,4	84,5	88,793	
Babi (Ton)	208	212	214	216	215	220,52	226,128	
Ayam buras (Ton)	66,5	67,8	68,5	69,9	26,74	27,008	27,023	
Ayam ras pedaging (Ton)	380,2	390,4	395,2	397,5	189,49	390,29	396,814	
Produksi Telur								
Ayam buras (Ton)	24,5	26,2	27,5	28,7	26,56	27,07	41,039	
Pengembangan/pelebaran area perkebunan								
Karet (Ha)	175	125	100	75	68.100	68.281	118.772	
Kelapa Sawit (Ha)	280	200	280	300	977	1.396	3.330	
Produksi Komoditi Perkebunan								
Karet (Ton)	48.562	48.567	48.574	48.583	45.351	17.570	20.405	
Kelapa Sawit (Tbs) Ton	-	11.000	5.880	4.400	60	-	-	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Komoditi Perkebunan								
Karet (kg/ha)	1.180	1.200	1.250	1.250	6,66	2,57	1,72	
Kelapa Sewit	-	435	450	500	0,61			
Ketahanan Pangan								
Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	1	2	1	1	1	1	1	
Ketersediaan Pangan Utama (%)	5,8	6,3	6,9	33,6	94,2	42,9	91,94	
Transmigrasi								
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	82,4	86,8	91,2	95,6	76,41	81,56	86,71	93,22
Kehutanan								
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	26.477	24.570	20.000	18.270				
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	37.514.161.455	40.065.650.000	40.065.650.000	40.065.650.000				
Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	0	75 Km	75 Km	75 Km				
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	1.000	1.000	1.000	1.000				
Pembangunan KPHP (unit)	1	0	2	0				
Pembangunan TAHURA	0	1	0	0				
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	0	5	0	0				
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	0	6	1	1				
Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun				20				9
Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Milik Tepat Waktu				10				0
% Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu				30				57,14%
Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya				4119 Ha				12 Ha
Energi dan Sumber Daya Mineral								
Luas wilayah yang dilertibkan (Ha)	485,26 Ha	422,948 Ha	422,948 Ha	422,948 Ha				
Kontribusi sektor pertambangan dari PNDP dan PAD (Rp)	2.200.000.000 dan 2.051.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000				
Rasio ketersediaan daya listrik	4,870 MW	4,896 MW	4,922 MW	4,948 MW				
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	56,36%	65,08%	72,35%	79,62%				

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa berlistrik	74 Desa	83 Desa	92 Desa	101 Desa				
Kelautan dan Perikanan								
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.430,00	1.975,00	3.358,00	5.036,00	1.430,00	1.978,00	3.363,06	3.701,82
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	216,24	218,40	222,77	227,23	200,2	535,1	351,4	260,60
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	33	34	35	38	27	36	37	39
Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	140	200	240	270	89,2	118	240	207,88
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	23,7	25	26,25	27,56	7,7	6,27	103,97	27,84
% PDRB Sub Sektor Perikanan				6,5				
Perdagangan								
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,3	13,25	13,26	13,26	9,10	9,10	8,81	9,41
Perindustrian								
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,07%	2,33%	2,43%	2,53%	3,45%	3,50%	3,97%	3,85%
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	40,63%	41,40%	42,17%	42,94%				
Pertumbuhan Industri (jumlah)	50	50	50	50	1	4	46	35
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	268	318	368	418	219	223	269	304
Penanggulangan Bencana								
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	1	5	6	8				
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	5	6	4	3				
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100	100				

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2019, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2019 adalah komitmen seluruh Stakeholder di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 merupakan Komitmen Stakeholder di daerah, maka dokumen RKPD dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja serta acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2019 merupakan rencana program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
3. RKPD Tahun 2019 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2019.
4. RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari seluruh Stakeholder termasuk DPRD Kabupaten Gunung Mas pada saat Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Unit Satuan Kerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang RKPD sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk itu agar semua PD dari Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana kerja hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku pembangunan serta stakeholder

yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Perlu kesungguhan/konsistensi dari semua pihak terutama harus adanya satu kesatuan langkah dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sehingga sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I, II, III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI GUNUNG MAS,

[Signature]
ARTON S. DOHONG